



**PENGEMBANGAN USAHA PERSEROAN TERBATAS
MENURUT SYARIAH ISLAM**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan S2
Fakultas Hukum**

OLEH

**H. MOCHAMAD IMRON. S.H
B.4.B.001.242.**

**P E M B I M B I N G
PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2002**

PENGEMBANGAN USAHA PERSEROAN TERBATAS MENURUT SYARIAT ISLAM

Disusun oleh :

H. MOCHAMAD IMRON, SH

NIM. B.4.B.001.242

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal

07 Januari 2003

Tesis ini telah diterima

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH

NIP. 130368053

Mengetahui Ketua Program

Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmad, hidayah dan inayahNya kepada kita semua, sehingga Tesis dengan judul : Pengembangan Usaha Perseroan Terbatas menurut Syariat Islam, dapat diselesaikan. Sholawat dan Salam bagi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan, karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang Penulis miliki, karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan nantinya.

Pada waktu menyusun Tesis Penulis mendapat bantuan, masukan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak dan atas bantuan dan masukan tersebut semoga mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya, khususnya kepada :

1. Ibu Prof. DR. Sri Rejeki Hartono, S.H, selaku pembimbing telah dengan sabar dan telaten memberikan masukan dan saran-saran selama bimbingan Tesis ini.

2. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, S.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas segala saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.
3. Bp. Suharto, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan pengarahan dan masukan selama pendidikan.
4. Bp. Ir. Suparhari Mursito, Kepala Diperindag Klaten, atas segala informasi yang telah diberikan.
5. Bp. Ir. Sihono, Kepala Laboratorium Logam Ceper, atas segala informasi yang dapat diberikan.
6. Bp. H. M Husnun HS, Direktur PT. Aneka Adhilogam Karya dan H.Badrul Munir, BSc, Pimpinan Perusahaan, atas segala keterangan yang luas mengenai gerak dan kegiatan perusahaan.
7. Bp. Prof. DR. H. Musa Asyari, Direktur PT. Baja Kurnia, dalam waktunya yang sempit masih bersedia memberikan keterangan.
8. Drs. H. Anas Yusuf, Ketua Koperasi Industri Batur Jaya, atas segala saran dan masukannya.
9. Bp. K.H. Drs. Muchlis Hudaf, Klaten, atas segala masukan, saran dan kesediaanya memberi referensi buku-buku penting.
10. Puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bp. K.H.Drs. Achmad Muzni, Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta, yang dengan ikhlas membantu dan memberikan masukan-masukan, lebih-lebih atas kesediaannya menterjemahkan Kitab Kuning “ Al Madkhol Lil Fiqhil Islam” Mu’allif : Iswij Ahmad “Iswin Bab I pasal I dari bahasa aslinya.

11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf pengajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
12. Rekan-rekan peserta Program Magister Kenotariatan Angkatan Ke II (2001) yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan studi.
13. Puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa almarhum Ayahanda H.M. Salim dan almarhumah Ibunda Hj. Aspinah Salim, yang telah membesarkan dan mendidik putra-putrinya, lebih-lebih dengan menanamkan dengan kokoh Akidah Islam, sehingga putra-putrinya tetap tegar dalam menghadapi gelombang dan badai kehidupan.
14. Puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa almarhum kakanda M. Sobari Rusdy dan almarhum kakanda H.M. Sulkan Djunaidi, S.H, telah mengambil alih kepemimpinan keluarga pada waktu Ayahanda wafat dan meneruskan tugas Ayahanda dengan mengadakan pertemuan-pertemuan maupun secara tertulis, lebih-lebih tulisan kakanda H.M. Sulkan Djunaidi, S.H dengan judul : “Jubah hitam-jubah putih” telah mendorong adik-adiknya menyelesaikan studi di Fakultasnya masing-masing dan seterusnya melaksanakan ibadah Haji.
15. Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta dan tersayang Ny. Hj. Ulfa Maria, Bc.Hk, yang lebih dari 35 tahun mendampingi menempuh gelombang kehidupan, lebih-lebih dalam satu tahun terakhir telah mengantarkan dan menunggu selama kuliah, dan dalam keadaan semangat sudah gempur, kembali membangkitkan semangat.

16. Pada usia yang sudah hampir Maghrib, tulisan Tesis ini barangkali untuk kenang-kenangan bagi anak-anakku : H. Rachmad Imantyoko Munajad, S.H, dengan istrinya Ny. Hj. Djanjang Krisnasari, S.H, cucu Soraya Chalilah Permatasari, dan Muhammad Rois Syarifuddin. Untuk anakku : Notaris H.M. Sofi Ariotedjo, S.H, dengan istrinya Nur Chasanah, S.H dan cucu Muhammad Miqdad dan Muhammad Aqif, dan anak ragil H.M. Imantyoko Ali Ibrahim, Sarjana Teknik Arsitektur.

Penulis berharap semoga segala amal baik yang telah diberikan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Amin...

Akhirnya semoga tulisan ini dengan segala kekurangan dan kelemahannya dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan, Almamater, Bangsa, Negara dan Agama.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metodologi	8
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.	
A. 1. a. Perseroan Terbatas pada umumnya	18
1 b. Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha	18
1 c. Perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas	19
2. a. Landasan Hukum Perseroan terbatas	20.
2. b. Alasan Pemerintah mengganti peraturan perundang-undangan yang lama	- 21
2. c. Kedudukan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama	- 23
3. Perumusan Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995	- 25.
3. a. 1 Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum	25
3. a. 1.1 Teori Badan Hukum	25.
3. a. 1.2 Perumusan Badan Hukum	27
3. a. 1.3 Unsur-unsur Badan Hukum	28
3. a. 2 Perseroan Terbatas didirikan atas dasar perjanjian	29
3. a. 3 Perseroan Melakukan Kegiatan Usaha	33
3. a. 4 Modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham	33

3. a. 4. 1	Modal	33
3. a. 4. 2	Saham	41
3. a. 5	Memenuhi Persyaratan Undang-Undang	55
4.	Organ-Organ Perseroan	55
4. 1	Rapat Umum Pemegang Saham	55
4. 2.	Direksi	61
4. 3	Komisaris	67
5.	Perseroan Tertutup	69
B.	Perseroan Terbatas ditinjau dari Hukum Islam	72
1.	Hukum Islam dan Syariat Islam	72
2.	Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas dalam Hukum Islam	74
3.	Perseroan Terbatas dengan wawasan syariat islam	74
4.	Persamaan dan Perbedaan antara Perseroan Terbatas dengan Syirkah	92
C.	Pengembangan Usaha menurut syariat Islam	96
1.	Alasan Pengusaha mengembangkan Usaha	96
2.	Arah Pengembangan Usaha	97
2. a	Peningkatan produksi dan distribusi	97
2. b.	Membuka jenis produk atau usaha baru	114
2. c.	Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas	116
3.	Membutuhkan Modal melalui Bank Syariah	134
3. a	Landasan hukum keberadaan Bank Syariah	135
3. b.	Kedudukan Bank Syariah	137
3. c.	Kegiatan Usaha Bank Syariah	138
3. d.	Mudharabah dan Musyarakah	144
3. e.	Penyelesaian Sengketa	152

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. 1	Gambaran umum pengusaha di Kabupaten Klaten	156
2.	Penelitian Lapangan	160
2. a	Dari kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten	160
b.	Laboratorium Logam Ceper	161
c.	PT. Aneka Adhilogam Karya	162
d.	PT. Baja Kurnia	167
e.	Koperasi Industri Batur Jaya	170
f.	Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	178
g.	Bank Konvensional	181
h.	Pendapat Ulama	188
i.	Pendapat Hakim Agama	193
B. 1.	Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mampu menampung 2 (dua) sistem hukum	199
2.	Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mampu menampung 2 (dua) sistem hukum Di dalam praktek	202
C.	Kendala untuk memanfaatkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas yang mampu menampung 2 (dua) sistem hukum	202

PEMBAHASAN

A.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mampu menampung 2 (dua) sistem hukum yaitu Hukum Perdata, khususnya tentang perseroan terbatas dengan syariat islam dalam satu wadah secara harmonis	205
a.	Ditinjau dari segi hukum, UU Nomor 1 Tahun 1995 adalah undang-undang Terbuka	205

b.	Ditinjau dari segi syariat islam	211
c.	Ditinjau dari kegiatan pengusaha muslim dalam praktek	213
B.	Kendala untuk memanfaatkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 , sebagai undang-undang yang mampu menampung 2 (dua) sistem hukum	218
C.	Konsep Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang untuk Melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan syariat islam	221
Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN		269
KESIMPULAN		
1.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang yang terbuka yang mampu menampung dua sistem hukum dalam satu wadah dan Perseroan Terbatas telah-melaksanakan Syariat Islam tidak saja pada waktu pengembangan-usaha tetapi dimulai sejak permulaan kegiatan usaha	269
2.	Kendala-kendala	
a.	yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak bisa sebagai wadah untuk menampung 2 (dua) prinsip hukum adalah karena salah pengertian	270
b.	Sedangkan yang mengusulkan akan adanya perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 adalah karena mereka tidak melihat bahwa Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 adalah undang-undang yang terbuka	270

DAFTAR PUSTAKA

Bab I Pendahuluan :

A. Alasan :

Akhir abad 20 adalah lahirnya teknologi canggih di segala bidang, lebih-lebih di bidang komunikasi, yang kesemuanya mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat, baik pengaruh yang bersifat positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan teknik industri membawa perkembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang pesat semakin meningkatkan perekonomian dunia, perdagangan bebas, terbukanya pasar dunia dengan sifat persaingan yang semakin tajam.

Pada saat ini kita di hadapkan pada kontalasi politik dan ekonomi dunia yang berkembang dan berubah dengan cepat. Perkembangan, perubahan dan gejolak internasional itu ditandai oleh gejala baru yaitu globalisasi dan perdagangan bebas, yang didorong dan didukung oleh kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di satu sisi negara-negara di dunia seolah menjadi satu, sehingga batas-batas antar negara seringkali menjadi kurang jelas. Dalam keadaan demikian, tidak ada negara yang dapat menghindarkan diri dari situasi globalisasi, jika tidak ingin terpencil dan merugi. Perkembangan ini memberi peluang bagi perkembangan perekonomian nasional dan tercapainya cita-cita nasional dalam pembangunan, dan karenanya harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya perkembangan perekonomian dunia. Di satu pihak globalisasi itu dapat menarik produk-produk Indonesia kepasar dunia, apabila semakin banyak komponen dari produk-produk Indonesia yang mempunyai standar mutu internasional dan atau komponen dari produk-produk

UPT-PUSTAK-UNDIP

yang hak patennya dimiliki oleh perusahaan transnasional, dapat diproduksi di Indonesia. Namun pada sisi lain, munculnya pengelompokan antar negara yang bersifat regional dan cenderung meningkatkan proteksionisme dan diskriminasi pasar hal ini dapat mendorong pada persaingan yang kurang sehat dan dapat menghambat pemasaran produksi dalam negeri. Sebaliknya, kita juga tidak perlu dan tidak boleh menutup diri terhadap modernisasi dan globalisasi itu, karena suka atau tidak suka akhir abad ke-20 ini diluar kehendak bangsa kita, memang sudah merupakan suatu realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri. Karena itulah perlu kita persiapkan diri untuk dapat menarik manfaat dari arus globalisasi itu dan di lain pihak dapat menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang dapat membawa bangsa kita dalam situasi yang hampir serupa dengan situasi yang dihadapi nenek moyang kita pada abad ke-17, bangsa kita akan tertekan bukan oleh bangsa atau negara lain, tetapi oleh *perusahaan-perusahaan transnasional*. Di sinilah diperlukan peraturan-peraturan Hukum Ekonomi Indonesia yang cukup handal yang mampu memberi proteksi terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional, yang di satu pihak mampu memberi peluang untuk mengembangkan kerjasama internasional di bidang ekonomi, tetapi di lain pihak memasang rambu-rambu yang cukup ampuh untuk melindungi hajat hidup maupun kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia di dalam badai globalisasi itu. Di sini pula tampak betapa Hukum Nasional ikut menentukan Ketahanan Nasional.

Hubungan antara hukum dan pengembangan ekonomi dan diantara sistem hukum dan sistem ekonomi, mempunyai hubungan yang sangat erat dan mempunyai pengaruh timbal balik, sehingga hukum yang pasti dan kondusif

akan sangat memperlancar jalannya pembangunan perekonomian dan sebaliknya. Hukum perusahaan yang merupakan bagian dari sistem hukum adalah hukum yang mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dengan sistem ekonomi. Di dalam Hukum Perusahaan terdapat bentuk-bentuk badan usaha dan salah satu bentuk badan usaha yang mampu menjadi badan usaha pada kegiatan berskala Internasional adalah perseroan terbatas. Dengan demikian jawaban terhadap segala pemicu-pemicu globalisasi, dengan segala segi positif dan negatifnya adalah dengan mengadakan perubahan landasan hukum adanya perseroan terbatas. Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan mulai berlaku secara efektif mulai 7 Maret 1996, maka undang-undang tersebut merupakan produk hukum nasional yang monumental dan bersejarah.

Kehadiran undang-undang tentang Perseroan Terbatas ini memberi dampak positif, berupa adanya kepastian hukum bagi kepastian usaha, membuka peluang bagi pemerataan pembangunan, serta menciptakan iklim yang menarik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi investor baik dalam negeri maupun asing, yang selanjutnya memberikan daya dorong dan daya gerak pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan ekonomi adalah SWASTA, yang antara lain merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan segala usaha dan kegiatan pembangunan hukum termasuk terbentuknya undang-undang tentang perseroan terbatas ini, dijiwai, digerakkan

dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika, dalam rangka Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Penduduk Indonesia yang berjumlah 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta) yang mayoritas beragama islam, terdapat diantaranya jutaan pengusaha muslim, dari pengusaha perorangan tingkat gurem, yang berada ditingkat menengah dan ada juga yang berada di kelas kakap. Ada diantara mereka yang bergabung dalam suatu badan usaha bahkan ada yang membentuk perseroan terbatas. Di bidang ekonomi tidak mengenal perbedaan etnis, ras maupun agama, demikian juga didalam membentuk/mendirikan perseroan terbatas, sehingga ada perseroan terbatas yang para pemegang sahamnya terdiri dari berbagai etnis, ras dan agama. Hal ini tergantung sepenuhnya kepada para pengusaha untuk bergabung dengan sesama rekan pengusaha lainnya, yang mempunyai kesamaan ide, kesamaan wawasan, kesamaan tujuan, dan kecocokan hati.

Tentunya sangat idealis, suatu perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, yang para pemegang sahamnya para pengusaha muslim, tentunya memilih Direksi dan Komisaris juga orang-orang muslim, dengan harapan, semua kebijakan perusahaan, kebijakan Direksi selalu berpedoman pada syariat islam, sebab sebagai orang muslim yang setiap pagi, petang dan malam selalu berdoa :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة ٢٠١)

‘Ya Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.’”

Sehingga pada waktu menjalankan usahanya baik pada waktu memproduksi, didalam menjalankan dan mengembangkan perusahaannya selalu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Indonesia adalah Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan mengayomi warga negaranya yang beragama islam dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia (muamalah) baik selaku konsumen maupun selaku pengusaha.

Bertolak dari pemikiran perseroan terbatas yang telah sah sebagai badan hukum, yang para pemegang sahamnya, para Direksinya dan para Komisarisnya beragama Islam, yang menjalankan perseroan berpedoman pada syariat islam, akan diteliti mengenai aspek-aspek hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan aspek-aspek hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah, khususnya hal perjanjian yang berkaitan dengan persekutuan usaha, dalam rangka melihat pertumbuhan dan perkembangan perseroan terbatas dimasa mendatang.

B. Permasalahan :

1. Apakah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995) mampu menampung dalam satu wadah 2 (dua) sistem hukum yang berbeda yaitu Hukum Perdata dan Syariat Islam?

2. Adakah kendala-kendala yang menjadi batu sandungan Pengusaha Muslim melaksanakan Syariat Islam pada waktu menjalankan perseroan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut di atas, sehingga :

- a. Terjadi suatu “perkawinan” yang harmonis antara hukum perdata dan hukum islam, yang memberi kepastian hukum dan kepastian usaha, yang memberi rasa tentram, aman dan bahagia;

Konsepsi bentuk hukum, landasan hukum mengenai pengembangan usaha Perseroan Terbatas berdasarkan syariat islam akan menghilangkan batu sandungan bagi pengusaha muslim, setidaknya mengurangnya.

- b. Memberi masukan kepada Pemerintah, agar pembentukan Undang-Undang, peraturan-peraturan, yang telah ada maupun yang akan ada, dapat mengayomi dan melindungi umat islam dalam melaksanakan usahanya.

D. Manfaat Penelitian :

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi Para Pengusaha Muslim, para Mubaligh maupun kepada Pemerintah, sehingga bahan-bahan masukan dapat digunakan sebagai pedoman, petunjuk maupun tindakan-tindakan yang berguna bagi masyarakat.

Bagi para Pengusaha Muslim maupun masyarakat muslim pada umumnya masukan hasil penelitian dapat digunakan untuk mengintropeksi diri

(mawas diri) apakah tindakannya, perbuatannya, usahanya sudah berjiwa dan bernafaskan islami. Bagi para Mubaligh dapat digunakan sebagai bahan untuk berdakwah, baik kepada para Pengusaha Muslim maupun kepada masyarakat pada umumnya. Adalah kewajiban bagi Pemerintah untuk melindungi, mengayomi dengan memberi sarana-sarana hukum dan atau membuat Undang-Undang atau Peraturan –Peraturan yang memberi nafas islami bagi masyarakat islam pada umumnya dan pada Pengusaha Muslim di dalam menjalankan usahanya.

Bagi Pemerintah, hasil penelitian dapat dimanfaatkan, dalam rangka menyusun Undang-Undang peraturan-peraturan, khususnya mengenai perseroan terbatas dimasa mendatang dapat memadukan kedua sistem hukum, yaitu hukum perdata dan hukum islam secara terpadu dan berjalan secara harmonis.

E. Metodologi

1. Metode Pendekatan :

Penelitian mengenai pengembangan usaha perseroan terbatas menurut syariat islam adalah menyangkut dua landasan hukum yaitu hukum positif yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan Syariat islam yang berkaitan dengan akidah dan muamalah yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadist.

Penelitian kepada landasan kedua hukum tersebut adalah suatu penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian perpustakaan. ini berarti penelitian terhadap data sekunder. Oleh karena itu titik berat penelitian tertuju

penelitian kepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan meneliti data sekunder dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis¹

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Inventarisasi terhadap peraturan-peraturan yang mencerminkan kebijaksanaan pemerintah di bidang perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaan pengembangan usaha Perseroan Terbatas menurut Syariat Islam.
- (2) Menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang telah diinventarisir tersebut untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif juga menggunakan penelitian langsung di lapangan dalam arti ingin mengetahui langsung dari perseroan terbatas yang para pemegang sahamnya, para Direksinya dan para Komisarisnya, beragama islam dengan pertimbangan bahwa pendekatan yuridis normatif saja tidak dapat mengetahui realitas yang terjadi dalam masyarakat, khusus penerapan pengusaha muslim terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun menurut Al Qur'an dan Hadis.

Dengan kedua pendekatan diharapkan dapat memahami permasalahan yang ada secara lebih mendalam dan komprehensif sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikannya.

¹ Soerjono Soekanto : Pengantar Penelitian Hukum, hal 52
 Maria S.W. Soemadjono : Pedoman Pemberatan Usulan Penelitian, sebuah panduan dasar.

2. Penentuan Responden Penelitian

Jumlah Perseroan Terbatas yang islami (yang para pemegang sahamnya, Direksinya, Komisarisnya beragama islam) cukup banyak dan tersebar di berbagai kota. Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penentuan responden sebagai sampel di lakukan secara *purposive*²

Oleh karena itu, dipilih lokasi hanya pada 2 (dua) kota saja yaitu Klaten, dan Kudus dari tiap-tiap kota dipilih 3 (tiga) perseroan terbatas yang islami atau disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kebutuhan.

Untuk melengkapi data dari responden tersebut, maka diambil pula informasi/pendapat dari institusi pemerintah yang terkait erat dengan fokus penelitian. Adapun instansi yang terkait adalah :

1. Kepala Kantor/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten.
2. Direktur Bank Syariah.
3. Direktur Bank (bank umum).

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan fokus utama penelitian yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder³. Bahan-bahan itu meliputi semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan.

² Ronny Hanitijo Soemitro : Penelitian Hukum dan Jurimetri hal 51.

³ Ronny Hanitijo Soemitro : Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri hal 52.

Selain daripada itu di kaji juga ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis yang berkaitan akidah dan muamalah khususnya yang berkaitan umat islam sebagai pengusaha.

Berkaitan dengan penelitian di lapangan juga dikumpulkan data primer yang diperoleh dari responden dari berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Responden ditentukan berdasarkan sampel dipilih dan ditentukan sebelumnya yaitu mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dari perseroan terbatas yang islami.

Selain daripada itu data Sekunder didapat juga dari : Kepala Kantor/Dinas Perdagangan/Perindustrian, Undang-Undang dan Literatur.

Data Sekunder berupa :

A. Bahan hukum Primer :

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya
- b. Tafsir Al-Qur'an, makalah, kliping surat kabar.
- c. Hadits.
- d. U.U No. 24 Tahun 1997 : Tentang Dokumen Perusahaan.
- e. U.U No. 3 Tahun 1982 : Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- f. U.U No. 23 Tahun 1999 : Tentang Bank Indonesia.
- g. U.U No. 5 Tahun 1999 : Tentang Larangan Praktek Monopoli.
- h. U.U No. 8 Tahun 1999 : Tentang Perlindungan Konsumen.
- i. U.U No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan.

- B. Bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku para pakar, makalah-makalah seminar dan berbagai tulisan di media massa.
- C. Bahan hukum Tersier, terdiri dari Kamus Hukum, terjemahan Al Qur'an dan Tafsir Al Qur'an.

Semua sumber tersebut diambil yang dapat membantu peneliti dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data-data sebagaimana tersebut diatas, digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi dokumen atau kepustakaan.

Studi ini dilakukan terlebih dahulu agar data yang diperoleh dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam melakukan wawancara.

b. Wawancara.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana dimana responden yang telah diseleksi untuk diwawancarai, kepada mereka diajukan pertanyaan atas dasar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.⁴

Terhadap data primer, data yang berasal dari responden yang merupakan sumber informasi atau sumber data, dipilih pihak-pihak yang mempunyai kemampuan (kapabilitas) dibidangnya, baik berupa pandangan-pandangan, pendapat-pendapat maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

⁴ Koentjoroningrat : Metode-metode Penelitian Masyarakat . Edisi ketiga, hal 144.

Berdasarkan pada alat pengumpulan data, dilakukan berbagai klasifikasi data, pengolahan serta analisis data sehingga sampai pada hasil yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung data primer dianalisis dengan metode kualitatif. Hal ini erat kaitannya dengan tipe penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.

Penelitian kategori ini pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis.⁵

Keseluruhan data yang diperoleh tersebut selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

Perseroan Terbatas yang dapat mengembangkan usaha adalah perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebab perseroan yang telah mendapat pengesahan memperoleh status badan hukum (pasal 7 ayat (6), sebagai badan hukum maka organ perseroan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris (pasal 1.2) telah dapat beroperasi atau bekerja sebagaimana seharusnya.

Yang menjalankan perseroan adalah Direksi yang diangkat oleh RUPS (pasal 80 ayat (1)). Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan

⁵ Maria S.W Sumardjono : Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian sebuah panduan dasar

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan

Sedang untuk melaksanakan tugasnya Direksi diawasi oleh Komisaris yang telah diangkat oleh RUPS (pasal 95 ayat (1).

Komisaris berkewajiban untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada perseroan (pasal 97).

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang meliputi kegiatan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan jasa dengan tujuan untuk mendapat laba. Direksi akan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut yaitu mendapat laba, untuk itu Direksi akan mencari pembantu-pembantu yang mampu atau cakap, punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan menempatkan pada posisi yang tepat.

Direksi juga akan mencari manager-manager yang cakap dan bertanggung jawab sehingga usaha perseroan bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Direksi juga akan berusaha meningkatkan teknologi yang dimiliki, sehingga bisa menghasilkan hasil produksi yang berkualitas yang mampu bersaing baik dalam bidang kualitas, desain maupun harga. Direksi akan mengevaluasi dalam segala bidang apa yang telah dikerjakannya. Dari hasil evaluasi Direksi berpendapat bahwa usaha perseroan akan lebih berkembang dan maju apabila perseroan mengembangkan usaha.

Hasil evaluasi dan rencana pengembangan usaha dirundingkan dengan Komisaris yang mempunyai kewajiban mengawasi kebijaksanaan Direksi akan memberi nasehat.

Dari analisa Komisaris, apa yang direncanakan Direksi mempunyai prospek yang bagus, karena itu Komisaris tidak berkeberatan dan mendukung rencana Direksi. Atas persetujuan Komisaris, maka Direksi mengajukan proposal apa yang akan dikerjakan dan tambahan modal yang dibutuhkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang saham, pada hakekatnya adalah rapat para pemilik perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris (pasal 63). Dari proposal yang diajukan Direksi, maka RUPS akan mempelajari dari segala segi, dari segi teknologi, Sumber Daya Manusia dan Manager dan segi-segi lain yang pada akhirnya menghasilkan laba yang lebih besar.

Pada dasarnya RUPS menyetujui proposal yang diajukan oleh Direksi, masalahnya dari mana modal segar tadi didapat.

Ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan modal tambahan yaitu dari pemegang saham sendiri atau dari Bank. Karena dari pemegang saham sendiri sudah tidak mungkin, maka tinggal satu cara yaitu melalui Bank.

Kerangka pemikiran sebagaimana tersebut diatas, bertitik tolak dari perseroan terbatas. Pada umumnya, dalam hal perseroan terbatas yang para pemegang sahamnya, para Direksinya dan para Komisarisnya beragama islam, yang segala tingkah laku dan perbuatannya berlandaskan pada akidah dan syariat islam, maka sejak perseroan melakukan kegiatan usaha sudah berpedoman pada syariat. Demikian juga pada saat perseroan membutuhkan modal segar, pertimbangan atas dasar akidah dan syariah juga diperhitungkan. Bagi para pemegang saham, pinjaman pada Bank (bank biasa/bank konvensional) berpendapat bunga bank adalah haram.

Karena itu Rapat Umum Pemegang Saham menentukan dan memberi kewenangan kepada Direksi untuk mendapatkan tambahan modal dari Bank Syariah yang bebas bunga.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan terdiri dari empat bab yang disusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Pada alasan penulisan, penulis menguraikan arti penting lahirnya teknologi canggih di segala bidang yang membawa dampak perkembangan kegiatan ekonomi di tingkat internasional maupun nasional yang ditandai dengan globalisasi. Perkembangan ini memberi peluang bagi perkembangan perekonomian nasional. Penduduk Indonesia 90% (sembilan puluh persen) beragama Islam, perlu adanya peluang bagi mereka dengan diadakannya

peraturan-peraturan hukum yang memadukan 2 (dua) sistem hukum yaitu hukum perdata dan hukum Islam, yang berjalan secara harmonis.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu pertama tentang perseroan terbatas pada umumnya. Didalam sub bab ini diuraikan mengenai landasan hukum perseroan terbatas, pengertian perseroan terbatas, unsur-unsur perseroan terbatas dan macam-macam perseroan terbatas.

Selanjutnya sub bab kedua mengenai badan hukum ditinjau dari hukum Islam, yang meliputi aspek perjanjian, kegiatan usaha, dan saham.

Sedangkan didalam sub bab ketiga diuraikan pengembangan usaha perseroan terbatas menurut syariat Islam yang meliputi landasan pengembangan usaha perseroan terbatas. Kewajiban umat Islam memilih Bank Syariah sebagai Bank bebas riba, dan segala apa saja yang terkait dengan Bank Syariah.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Dalam sub bab hasil penelitian disajikan data mengenai profil perusahaan yang menjadi sampel penelitian, yaitu perusahaan milik perseroan terbatas yang para pemegang saham, Direksi dan Komisaris adalah pengusaha muslim. Disamping itu juga disajikan pula data tentang faktor-faktor yang menjadi kendala para pengusaha muslim tidak ke Bank Syariah.

Sedangkan dalam sub bab pembahasan diuraikan mengenai hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang merupakan kendala bagi pengusaha muslim.

Bab IV Penutup :

Dalam sub bab kesimpulan disajikan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan, sedangkan dalam sub bab saran, penulis menyampaikan beberapa saran dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha perseroan terbatas berdasarkan syariat Islam.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

A. 1. a. Perseroan Terbatas pada umumnya.

Perseroan Terbatas terdiri dari kata “perseroan” yang menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham), sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung-jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal dalam saham yang diambil bagian dan dimilikinya.⁶

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

1. b. Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha.

Bentuk perseroan terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk PT ini datang dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya “perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja : Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawaban yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti di Malaysia disebut SENDIRIAN BERBAD (SDN BHD), di Singapura disebut Private Limited (PTE. LTD), di Jepang disebut KABUSHIKI KAISA dan lain-lain.⁷

1. c. Perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dapat ditemukan di :

1. Buku I Bab III Bagian III pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23) sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 : (per tanggal 7 Maret 1996), dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen (Stb 1939-569 jo. 717)) (per tanggal 7 Maret 1999).

Ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD diperuntukkan bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan golongan Eropa, sedangkan bagi golongan Bumiputera berlaku ketentuan yang diatur di Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Hal ini memang dikehendaki oleh

⁷ I.G Rai Widjaya, S.H, M.A : Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas.

pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu yang membedakan golongan penduduk dan hukum yang berlaku.

Keadaan tersebut menyebabkan dualisme yang mengatur perseroan, tetapi yang lebih mendasar adalah Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat, adalah tidak pantas dan janggal adanya diskriminasi dalam pemberlakuan hukum perseroan. Karena itu adalah pantas dan seharusnya peraturan perundang-undangan tersebut dicabut dan diganti yang baru.

2. a. Landasan hukum perseroan terbatas.

Baik KUHPerdata maupun KUHD yang mengatur tentang PT, secara formal belum pernah diganti melalui undang-undang. Undang-undang tersebut telah berlaku sejak lama berdasarkan Staatsblad 1847 Nomor 23. barulah pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan oleh pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk menggantikan undang-undang peninggalan Belanda, setelah melalui proses yang cukup lama.

Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 7 Maret 1995 dan berlaku efektif sejak 7 Maret 1996 berdasarkan pasal 128, maka :

1. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian III Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Werboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23) yang mengatur mengenai perseroan terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.

2. Segala peraturan pelaksanaannya dari Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Werboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1971 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
3. Terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie opde Indonesische Maatchappij op Aandeelen, Staatsblad 1939:569 jo 717) dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian sejak tanggal 7 Maret 1996, peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas adalah UU No. 1 Tahun 1995, berikut peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan atau yang menyertainya dan untuk selanjutnya untuk membahas tentang perseroan Terbatas landasannya adalah UUPT.

2.b. Alasan Pemerintah mengganti peraturan perundang-undangan yang lama.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama. Dengan ketentuan-ketentuan baru ini, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-

dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 (empat) alasan yang dijadikan pertimbangan pembaruan undang-undang Perseroan Terbatas seperti yang tercantum dalam konsiderannya. Pertama, peraturan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Seperti kita ketahui KUHD dibuat lebih dari satu abad yang lalu, yang tentu sudah tidak lagi dapat mengikuti kebutuhan perkembangan perekonomian saat ini dan sudah *out of date*. Banyak hal-hal baru yang perlu diakomodasi dalam Undang-undang tersebut. Kedua, adanya dualisme bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, seperti disebutkan diatas yaitu disamping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD, juga masih terdapat badan hukum dalam Bentuk Maskapai Andil Indonesia. Hal ini dianggap tidak sesuai lagi karena tidak berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, Undang-undang Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional. Dengan adanya kesatuan hukum dan unifikasi hukum tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan pemilik modal, pemegang saham, kepentingan umum, dan kepentingan perseroan itu sendiri, serta dapat mencegah timbulnya monopoli. Keempat, pembaruan hukum perseroan harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

2.c. Kedudukan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama.

Untuk perseroan yang didasarkan pada KUHD, dalam waktu 2 (dua) tahun Akta Pendirian perseroan yang didalamnya memuat Anggaran Dasar harus telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas. Ini berarti Anggaran Dasar perseroan tersebut harus diadakan perubahan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam undang-undang perseroan.

Sedangkan yang didirikan berdasarkan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia, dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib mengajukan permohonan pengesahan atas Akta Pendirian dan Anggaran Dasar kepada Menteri. Ini berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perseroan dianggap tidak berlaku dan harus membuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar baru, sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang perseroan terbatas.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 125 dan pasal 126 undang-undang perseroan terbatas tentang Ketentuan Peralihan.

Ketentuan dalam pasal 125 :

- (1) Akta Pendirian perseroan yang telah disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Akta Pendirian perseroan yang belum disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya belum disetujui oleh Menteri pada saat berlakunya Undang-undang ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini.

- (3) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), harus telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini.

Ketentuan pasal 126 :

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini, badan hukum yang didirikan berdasarkan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939:569 jo 717), wajib mengajukan permohonan pengesahan atas Akta Pendirian dan Anggaran Dasar kepada Menteri.
- (2) Terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku ketentuan Undang-undang ini.

Dengan demikian sejak pada tanggal 7 Maret 1996, semua perseroan terbatas yang ada, sudah didirikan berdasarkan UU nomor 1 Tahun 1995.

Kalau sekiranya sampai sekarang ada perseroan terbatas yang akta pendiriannya belum diadakan perubahan atau disesuaikan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, maka perseroan tersebut tidak sah dan karenanya tidak dapat memperoleh ijin operasi, semua perijinan antara lain T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan) S.I.U.P (Surat Ijin Usaha Perdagangan) tidak dapat diperpanjang.

3. Perumusan Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 perseroan terbatas didalam pasal 1.1 dirumuskan sebagai berikut :

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari perumusan ini kalau dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum
2. Didirikan atas dasar perjanjian.
3. Melakukan kegiatan usaha.
4. Modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

3. a. 1 Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.

3. a.1.1 Teori Badan Hukum.

Undang-undang telah menyatakan dengan tegas bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum, tetapi undang-undang tidak memberi penjelasan apa dan bagaimana badan hukum itu, demikian juga didalam KUHD tidak ada perumusan atau penjelasan tentang Badan Hukum.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Ada beberapa teori tentang adanya badan hukum ini yang dikemukakan para ahli, antara lain :⁸

1. Teori Fiksi :

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny berpendapat, badan hukum itu semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara.

Badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu.

Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku

Subyek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

Orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum yang lain tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

2. Teori Organ :

Teori ini dipelopori oleh Otto Von Gierke yang berpendapat :

Badan hukum yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang (Organ) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.

⁸ Chidir Ali, S.H : *Badan Hukum* hal. 31-35.

Dengan demikian menurut teori Organ, badan hukum bukan sesuatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada.

Badan hukum itu seperti manusia menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan hukum tidak berbeda dengan manusia.

3. Teori kenyataan yuridis.

Teori ini dikemukakan oleh E. M. Meijer dan dianut oleh Paul Schoeten, yang berpendapat :

Badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.

Badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia, tetap riil ini hanya untuk hukum. Artinya badan hukum itu ada sekedar diperlukan oleh hukum.

3. a.1.2 Perumusan Badan Hukum.

Dari beberapa teori tentang badan hukum, maka badan hukum dirumuskan sebagai berikut :

Sri Soedewi Maschum sofwan :

Badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang tersendiri untuk tujuan tertentu.

R. Subekti :

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia,

serta memiliki kekayaan tersendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

I.G Rai Widjaya, S.H.M.A :

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, karena itu disebut manusia buatan.

Suatu badan hukum lahir karena diciptakan oleh undang-undang, karena badan ini diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian ada 2 (dua) subyek hukum yaitu :

1. Manusia yang nyata (*natuurlijk person*) dan
2. Badan Hukum, manusia tiruan (*rechts person*).

Perseroan terbatas memperoleh status secara sah sebagai badan hukum sejak saat akta notaris yang menurut Anggaran Dasar perseroan terbatas mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (pasal 7 ayat 6 UUPT)

3. a.1.3. Unsur-unsur Badan Hukum.

Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT yaitu :

a. Organisasi yang teratur.

Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT).

Keteraturan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

b. Harta kekayaan sendiri.

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) UUPT) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 27 ayat (1) UUPT).

c. Melakukan hubungan hukum sendiri.

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu “membantu” Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

d. Mempunyai tujuan sendiri.

Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba.

3. a. 2. Perseroan Terbatas didirikan atas dasar perjanjian.

Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena merupakan

perjanjian, maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut artinya ada lebih dari satu sekurang-kurangnya dua orang atau dua pihak, jadi dalam pendirian Perseroan Terbatas terdapat sekurang-kurangnya dua orang.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Perjanjian menurut undang-undang adalah suatu perbuatan, oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. (pasal 1313 KUHPdt).

Dalam pasal 7 ayat (1), pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam KUHPdata. Sebagai perjanjian **khusus** yang **bernama**, perjanjian pembentukan perseroan terbatas itu juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, disamping ketentuan khusus yang diatur UUPT tersebut.

Pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Sekalipun mereka yang membuat perjanjian adalah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan ada kesepakatan diantara mereka,

tetapi apabila tujuan didirikannya suatu perseroan bertentangan dengan undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 KUHPdata), maka perseroan tadi dilarang untuk didirikan.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa perseroan didirikan atas dasar perjanjian, dan perjanjian itu baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Dengan demikian kalau ada perseroan terbatas yang pemegang sahamnya kurang dari 2 (dua) orang maka perseroan terbatas tersebut tidak memenuhi syarat hukum adanya perseroan terbatas, hal mana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (3) dan (4).

Pasal 7 ayat (3) :

Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Pasal 7 ayat (4) :

Dalam hal setelah sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan pemegang sahamnya tinggal satu orang, maka pemegang saham tersebut berkewajiban :

1. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain;
2. setelah lebih dari 6 (enam) bulan, saham belum dialihkan, pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan;
3. atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Bagaimana kalau sebagian saham yang dipegang oleh pemegang saham tunggal dialihkan kepada suami atau istrinya ?

Tidak ada larangan undang-undang baik secara tersurat maupun tersirat, perseroan yang telah mendapat pengesahan, pemegang sahamnya tinggal 1 (satu) orang, kemudian mengalihkan sebagian sahamnya kepada suami atau istri. Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa perseroan yang telah mendapat pengesahan, pemegang sahamnya paling tidak terdiri dari 2 (dua) orang pemegang saham, yang masing-masing pemegang saham bertanggung jawab sebatas besarnya saham yang telah diambarnya.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUPT yang berbunyi :

Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambarnya.

Dengan demikian perseroan yang telah mendapat pengesahan pemegang sahamnya terdiri dari suami dan istri, tidak bertentangan dengan undang-undang khususnya pasal 7 ayat (3) dan (4).

3. a. 3. Perseroan Melakukan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan meliputi bidang yang sangat luas, yaitu bidang :

1. Produksi meliputi kegiatan :

- a. mengambil dari alam (bahan tambang, dari lautan, dari hutan) untuk diproses menjadi bahan mentah;
- b. memproses dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi;
- c. memproses dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.

2. Distribusi dan Pemasaran;

3. Perdagangan; dan

4. Jasa.meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, kecantikan.

3. a. 4. Modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

4.1 Modal :

Modal perusahaan adalah harta kekayaan milik perseroan yang terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan dari para pendiri, pemegang saham, yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai modal kerja. Secara teori, modal perusahaan berjenjang, yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, modal yang

ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang disediakan pada waktu perseroan mulai melakukan kegiatan usaha sebagai modal kerja. Modal yang disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan, yang disetor oleh para pemegang saham sebagai penyertaan modal.

Pada umumnya, penyeteran atas saham dalam bentuk uang, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penyeteran atas saham dalam bentuk lain, yang dapat berupa benda berwujud atau benda yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

Penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan, yaitu orang perorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah, yang berdasar keahlian atau pengetahuannya untuk menilai harga benda tersebut.

Penyeteran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan maksud agar diketahui oleh umum dan memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. Pengumuman mengenai penyeteran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dilakukan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar di tempat kedudukan perseroan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional. Pengumuman tersebut memuat jumlah penyeteran saham dalam bentuk benda tidak bergerak serta rinciannya sebagaimana

dimaksud diatas. Penyetoran atas saham yang dilakukan pada saat pendirian, selain dalam bentuk uang, dicantumkan dalam Akta pendirian.

Ditinjau dari saat berdirinya perseroan secara sah sebagai badan hukum, kewajiban penyetoran saham oleh para pendiri maupun para pemegang saham, kewajiban penyetoran dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori :

1. pada saat akta pendirian ditandatangani.
2. pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.
3. penyetoran yang dilakukan sesudah perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum.

Penyetoran saham pada waktu akta pendirian perseroan ditandatangani, undang-undang menetapkan sebagai berikut :

Undang-Undang Perseroan terbatas menetapkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit RP. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedang modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, sedangkan modal yang disetor pada saat akta pendirian ditandatangani paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan.

Penyetoran saham yang dilakukan pada saat akta pendirian mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, modal yang ditempatkan harus sudah disetor penuh, dengan demikian modal yang ditempatkan

sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sudah disetor penuh sebanyak 100% (seratus persen).

Untuk melaksanakan pengawasan atas penyetoran modal perseroan, menteri Kehakiman telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PR.08.01.TAHUN 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Tata Cara pengajuan permohonan dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf c.-nya mewajibkan *perseroan yang ingin memperoleh pengesahan dari Menteri* untuk melampirkan bukti setoran modal dari bank. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan tersebut hanya akan diterima jika telah memenuhi persyaratan tersebut. Demikian juga Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-PR.08.01. TAHUN 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang Tata Cara penyampaian laporan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang mewajibkan setiap *perseroan yang bermaksud untuk menyampaikan laporan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri* (pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas), untuk melampirkan bukti setoran modal dari bank pada saat pelaporan dilakukan.

Melalui Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, Departemen Kehakiman diharapkan dapat melakukan monitor langsung pelaksanaan penyetoran modal perseroan oleh para pendiri maupun pemegang saham. walau demikian ada hal yang luput dari pengawasan tersebut, yaitu penyetoran oleh pemegang saham setelah Akta pendirian Perseroan

memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, ternyata para pendiri dan atau pemegang saham, tidak juga menyetor kekurangan setor sebanyak 50% (lima puluh persen), yang menjadi kewajibannya.

Dalam hal ini pelaksanaan penyetoran saham sangat tergantung pada Direksi perseroan. Disini Direksi perseroan diharapkan dapat bertindak "*pro-aktif*" untuk melakukan penagihan atas utang pemegang saham terhadap perseroan. Dalam hal penagihan telah dilakukan, namun penyetoran modal tidak juga dilaksanakan maka perseroan dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Meminta dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham yang bertujuan untuk :

- a. membeli kembali saham perseroan yang tidak disetor oleh pemegang saham sebagai *treasury stock*; atau
- b. secara tegas menyatakan pengurangan modal perseroan; atau
- c. memberikan hak kepada pemegang saham lainnya atau pihak ketiga yang disetujui untuk secara langsung mengambilalih, dengan menyetor penuh dan sekaligus, seluruh saham yang belum disetor oleh pemegang saham lama.

Penyetoran saham yang dilakukan setelah perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum untuk keperluan peningkatan modal, harus dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penyetoran saham dalam rangka peningkatan modal, harus disetor secara penuh, hal ini sebagai konsekwensi dari kewajiban penyetoran saham

secara penuh pada saat akta pendirian mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Dengan demikian sejak perseroan sah menjadi badan hukum, penyetoran saham harus secara penuh, tidak ada lagi dengan cara mengangsur, hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 26 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan ini menegaskan bahwa sejak tanggal pengesahan tidak dimungkinkan penyetoran atas saham secara mengangsur, kemungkinan mengangsur saham hanya dilakukan sebelum pengesahan diberikan.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, penyetoran saham dapat berupa uang, barang berwujud atau barang tidak berwujud, maupun barang tidak bergerak. Selain daripada itu undang-undang juga memberi kemudahan, penyetoran saham dapat berbentuk lain, UUPT dalam pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya, akan tetapi didalam pasal 28 ayat (2) memberi kemungkinan lain,; pasal 28 ayat (2) :

“Bentuk-bentuk tagihan tertentu selain tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan demikian ada 2 (dua) bentuk tagihan, ada tagihan yang tidak dapat dikompensasikan dengan penyetoran saham, tetapi ada tagihan yang dapat

dikompensasikan dengan setoran saham, tagihan jenis ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, pada tanggal 25 februari 1999 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 tentang BENTUK-BENTUK TAGIHAN TERTENTU YANG DAPAT DIKOMPENSASIKAN SEBAGAI SETORAN SAHAM. Dari penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya, semua bentuk tagihan tertentu perseroan dapat dikompensasikan sebagai setoran saham., sepanjang kompensasi tersebut dilakukan oleh atau disetujui perseroan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan. Adapaun maksud ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah untuk mencegah bahwa pemegang saham yang juga merupakan kreditor perseroan, secara sepihak tanpa sepakat dari perseroan menggunakan hak kompensasi dan dengan demikian menempatkan dirinya dalam kedudukan yang menguntungkan berkenaan dengan kewajiban penyetorannya yang menjadi jaminan semua kreditor perseroan.

Menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999, bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan dengan penyetoran modal dalam perseroan adalah bentuk tagihan terhadap perseroan yang timbul karena :

- a. perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

- b. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak, dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang; atau
- c. Perseroan yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.

Kompensasi tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham mana harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau berdasarkan Anggaran Dasar perseroan, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara khusus bagi perseroan terbatas tertentu, termasuk perseroan terbatas terbuka. Penyetoran saham yang demikian harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 memungkinkan Anggaran Dasar perseroan untuk memuat ketentuan bahwa pengeluaran saham yang dilakukan oleh perseroan sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu tidak harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham perseroan.

3. a. 4. 2. Saham.

Perumusan Undang-Undang :

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.

Prof. DR. C.S.T.Kansil S.H

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

I.G Rai Widjaja, S.H. M.A (2000) merumuskan saham sebagai berikut :

“Saham adalah bagian pemegang saham didalam perusahaan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar saham itu disebut nilai nominal.”

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) :

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham

Saham ini berbeda-beda menurut jenis perseroan, dapat dikeluarkan dalam macam jenis dan bentuk yang beragam, asal saja saham-saham ini dikeluarkan dalam nilai nominal mata uang Indonesia. UUPT tidak mengakui saham-saham yang dikeluarkan tanpa nilai nominal.

Ada 2 (dua) macam saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan yaitu saham atas nama dan saham atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang

mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak menentukan nama pemegang atau pemiliknya.

Saham-saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan dan diserahkan kepada pihak yang mengambil bagian. Jika seluruh nilai nominal saham yang dikeluarkan atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa perseroan berhak untuk menerbitkan berbagai jenis dan klasifikasi saham.

Yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah suatu kelompok saham mempunyai karakteristik yang sama dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.

Dalam hal perseroan menerbitkan lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka perseroan harus menetapkan 1 (satu) klasifikasi sebagai **saham biasa**.

Yang dimaksud dengan saham biasa adalah saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan perseroan, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi.

Dalam hal perseroan menerbitkan satu atau lebih kelas saham dengan hak suara yang sama pada pemiliknya, maka yang dapat memberikan suara dalam rapat hanyalah mereka yang memiliki saham dengan nilai nominal penuh yang terkecil. Jika karena suatu hal, saham dengan nilai nominal terkecil tersebut kemudian dipecah menjadi bagian nominal yang lebih kecil lagi, maka

saham pecahan tersebut masing-masing tidak dapat mengeluarkan suara dalam rapat jika mereka bersatu untuk membentuk suatu jumlah yang bulat atas nilai nominal saham terkecil tersebut yang dapat memberikan suara dalam rapat.

Sedangkan jika terdapat lebih dari satu kelas saham yang dapat memberikan suara, maka dalam Anggaran Dasar perseroan harus mengatur secara tegas dan proporsional hak-hak suara dari masing-masing pemegang saham dari kelas yang berbeda-beda tersebut.

Disamping diperkenalkannya perseroan untuk menerbitkan kelas saham dengan berbagai macam jenis hak suara, perseroan juga dimungkinkan untuk mengeluarkan kelas-kelas saham lainnya berdasarkan pada :

1. dapat ditarik kembali atau tidaknya saham tersebut setelah suatu jangka waktu tertentu.
2. dapat ditukar atau tidaknya saham tersebut dengan kelas saham yang lain;
3. ada tidaknya hak untuk menerima pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif;

Pengeluaran saham baru oleh perseroan.

Larangan Bagi Perseroan Untuk Mengeluarkan Saham Untuk Dimiliki Sendiri.

Undang-Undang Perseroan Terbatas melarang perseroan untuk mengeluarkan saham untuk dimiliki olehnya sendiri. Ketentuan ini juga diberlakukan bagi anak perusahaan terhadap setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya.

Yang dimaksud dengan **anak perusahaan** adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya.
- b. Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaan; dan atau
- c. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.

Jika kita cermati, pelarangan saham untuk dimiliki sendiri karena pada prinsipnya pengeluaran saham adalah untuk pengumpulan modal. Karena itu kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.

Keikutsertaan perseroan untuk mengambil bagian saham-saham yang baru dikeluarkan berarti gangguan terhadap kekayaan nyata perseroan, dalam arti terhadap modal tersebut tidak ada tambahan yang riil dalam bentuk keikutsertaan pihak ketiga di luar perseroan. Kekayaan perseroan akan bertambah dengan nihil, apabila perseroan mengambil bagian saham-saham yang dikeluarkan olehnya.

Penawaran Saham Kepada Karyawan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan dua macam pengaturan penawaran saham kepada karyawan :

1. yang terbit sehubungan dengan pengeluaran saham baru, dalam rangka peningkatan modal perseroan;
2. penjualan saham oleh pemegang saham lama.

Masalah penawaran pengeluaran saham baru kepada karyawan diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut ketentuan tersebut setiap pengeluaran saham baru yang tidak ambil bagian oleh pemegang saham yang ada dalam perseroan setelah ditawarkan kepada mereka, hanya dapat ditawarkan kepada pihak ketiga setelah dilakukan penawaran terlebih dahulu kepada karyawan perseroan. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dijanjikan, yang akan mengatur mengenai masalah penawaran saham kepada karyawan ini masih belum dikeluarkan.

Daftar Pemegang Saham

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan **Daftar Pemegang Saham**, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; dan
 - e. keterangan penyetoran atas saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
- Penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.

Yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga benda tersebut.

Daftar Khusus.

Selain Daftar Pemegang Saham seperti tersebut diatas, perseroan wajib mengadakan dan menyimpan **Daftar Khusus** yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta **keluarganya** yaitu isteri/suami dan anak-anaknya pada perseroan tersebut dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Daftar Khusus tersebut merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

Bukti Kepemilikan Saham

Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham. Bukti pemilikan saham atas nama diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan.

Setiap saham memberi hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat

dilakukan dengan bantuan perseroan yang dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam Anggaran Dasar.

Pecahan Nilai Nominal Saham.

Anggaran Dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham, atau dengan perkataan lain pecahan saham hanya dapat dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang memungkinkan untuk melakukan pemecahan saham tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemecahan saham.

Pemegang nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama pemegang saham lainnya yang sejenis memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Hak untuk Mengajukan Gugatan Derivatif

Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham perseroan yang mewakili sekurangnyanya sepuluh persen dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk mengajukan gugatan derivatif untuk dan atas nama perseroan terhadap Direksi dan atau Komisaris Perseroan, yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian bagi perseroan. Hak derivatif mana diberikan oleh ketentuan pasal 85 ayat (3) terhadap Direksi perseroan, dan pasal 98 ayat (2) terhadap Komisaris perseroan. Kepada pemegang saham minoritas guna dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang

merugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi dan atau Komisaris.

Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap Anggaran Dasar perseroan memuat ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang wajib disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, bisa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta dibawah tangan.

Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995.

Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham. Tidak ada suatu aturan umum mengenai formalitas dan bentuk akta pemindahan hak yang diperlukan bagi pemindahan hak atas saham atas nama, hanya saja akta pemindahan hak tersebut atau salinannya harus disampaikan secara tertulis kepada perseroan, untuk dicatat tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus yang disediakan untuk itu.

Undang-undang memberikan keleluasaan kepada para pihak (pendiri atau pemegang saham) untuk mengatur dalam Anggaran Dasar perseroan

ketentuan-ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu yang berupa :

1. keharusan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau
2. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.

Dalam hal hak-hak istimewa tersebut diberikan maka setiap pelaksanaan dan pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diberikan dalam pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 51 ayat (1) mewajibkan bahwa :

“Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.”

Yang dimaksud dengan **harga yang wajar** dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan para ahli penilai harga saham yang tidak terikat kepada perseroan. Penetapan jangka waktu 30 (tigapuluh) hari dimaksudkan agar terdapat kepastian bahwa setelah jangka waktu tersebut pemegang saham mempunyai kebebasan untuk menawarkan saham tersebut kepada pihak lain.

Jika kemudian perseroan tidak dapat menjamin kelayakan harga penjualan dan pelaksanaan pembayaran dalam jangka waktu yang telah

ditentukan, maka pemegang saham mempunyai hak untuk melakukan penawaran dan melaksanakan penjualan saham yang ditawarkan tersebut kepada karyawan, mendahului penawaran kepada pihak ketiga.

Dijelaskan bahwa pemilikan saham oleh karyawan berdasarkan ketentuan ini tidak mengubah status saham tersebut menjadi saham karyawan.

Setiap pemegang saham yang diharuskan menawarkan sahamnya terlebih dulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lampainya jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak penawaran dilakukan. Penawaran demikian hanya dapat dilakukan satu kali. Sebagaimana halnya ketentuan pasal 36 ayat (3), ketentuan mengenai penawaran dan penjualan saham kepada karyawan yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) juga akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Persetujuan dan Penolakan

Pemberian persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas **saham** yang memerlukan persetujuan organ perseroan harus **diberikan secara tertulis** dalam waktu paling lama sembilan puluh hari terhitung sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak tersebut. apabila jangka waktu tersebut lampau namun organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, organ perseroan **dianggap telah menyetujui pemindahan** hak atas saham tersebut.

Apabila pemindahan hak atas saham atas nama disetujui oleh organ perseroan, maka pemindahan haknya dilakukan dalam waktu paling lama sembilan puluh

hari terhitung sejak persetujuan diberikan yaitu dengan akta pemindahan hak dan akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan **secara tertulis** kepada perseroan. Dalam hal ini Direksi diwajibkan mencatat tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan pasal 49 jo pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT.

Dalam hal pemindahan hak atas saham **ditolak**, maka organ perseroan harus **menunjuk** calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam pasal 51 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, yaitu perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

Tetapi, apabila penolakan tidak disertai penunjukan, berlaku ketentuan pasal 52 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1995 bahwa dengan lampaunya waktu paling lama sembilan puluh hari terhitung sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ **perseroan dianggap menyetujui** pemindahan hak atas saham tersebut.

Gadai Saham

Saham atas tunjuk dapat digadaikan, tetapi saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status saham, maka gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan

Daftar Khusus, sedangkan **hak suara** atas saham yang digadaikan *tetap ada pada pemegang saham*.

Saham dengan Hak Kebendaan

Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. (pasal 499 KUHPdt). Berdasarkan pasal 511 ayat (4) KUHPdt, saham sebagai barang bergerak atas dasar ketentuan undang-undang. Pasal 54 ayat (1) UUPt menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya dan didalam aturan penjelasannya dijelaskan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberi hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Hak Kebendaan adalah hak yang bersifat mutlak atas suatu kebendaan, yang memberikan kepada pemiliknya "*kekuasaan*" secara langsung atas kebendaan tersebut yang bersifat mutlak, yang dapat ia pertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan ini dibedakan dari Hak Perseorangan yang bersifat relatif, yang hanya dapat dipertahankan oleh pemilik hak tersebut terhadap orang-perorangan tertentu saja, terhadap siapa pemilik hak perseorangan ini berhubungan hukum.

Dalam hal ini sebagai subjek hukum, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang.

Hak dan kewajibannya terhadap perseroan dan pemegang saham lainnya berada dalam **hubungan perikatan** sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan dalam Anggaran Dasar.

Dengan demikian maka pemegang saham selaku subjek hukum mempunyai hak perseorangan atau **personal right** yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Dalam pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Gugatan terhadap perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil (*unfair*) dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris. Gugatan yang diajukan pada dasarnya dimaksudkan untuk memohon agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Dalam hal ini jelas bahwa ketentuan UUPT tersebut memberi perlindungan yang baik kepada pemegang saham.

Perlindungan Untuk Pemegang Saham Minoritas dan Pihak Ketiga

Umumnya didalam suatu perseroan apabila terdapat perbedaan pemilikan saham dengan selisih jumlah yang besar, maka dibedakan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dengan hak suaranya masing-masing. Kondisi yang dijumpai dari pengalaman yang lampau sebelum Undang-undang No.1 tahun 1995 (UUPT) adalah :

Prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT bahwa para pemegang saham, baik individual maupun secara kolektif, yang memiliki saham perseroan berjumlah sampai dengan sepersepuluh dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh perseroan, diberikan hak untuk

1. Meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
2. atas nama perseroan menggugat Direktur, dan Komisaris yang karena perbuatan atau keputusannya telah menerbitkan kerugian pada perseroan (gugatan derivatif);
3. meminta diadakannya pemeriksaan atas perseroan;
4. menuntut dibubarkannya perseroan.

Selain itu seperti telah dibahas sebelumnya, UUPPT juga memberikan hak kepada setiap pemegang saham (berapapun jumlahnya) untuk meminta agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar oleh perseroan, jika yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam bentuk perubahan Anggaran Dasar, penjualan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan perseroan maupun

dalam rangka penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan; serta untuk menggugat perseroan atas tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam pasaran sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi maupun Komisaris Perseroan.

3. a. 5. Memenuhi Persyaratan Undang-Undang

Sebagaimana diuraikan pada bagian landasan hukum perseroan terbatas, bahwa UU No. 1 tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas, telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan berlaku efektif sejak 7 Maret 1996, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas sudah dicabut dan harus sudah menyesuaikan diri dengan undang-undang sekarang.

Dengan demikian sejak tanggal 7 Maret 1996, perumusan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas hanya UU No.1 tahun 1995.

4. Organ-Organ Perseroan.

Menurut ketentuan pasal 1 UUPT, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

untuk selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dan berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris. Wewenang RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain :

- a. penetapan perubahan Anggaran Dasar (pasal 14)

- b. penetapan Pengurangan Modal (pasal 37)
- c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (pasal 60)
- d. Penetapan penggunaan laba (pasal 62)
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (pasal 80,91,92)
- f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (pasal 105)
- g. Penetapan pembubaran perseroan (pasal 105)

Tempat Kedudukan dan Tempat RUPS Diadakan

Tempat kedudukan perseroan adalah tempat dimana kantor pusatnya berada atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya.

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa RUPS dapat dilakukan di luar tempat kedudukan

Perseroan atau kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Macam-macam RUPS

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan dalam RUPS tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen perseroan.

RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Penyelenggaraan RUPS adalah Direksi.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan, ia berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya, atau dapat juga dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili

1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya. RUPS seperti itu hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang diajukan tersebut.

Dalam tiap-tiap Rapat Umum Pemegang Saham, yang harus dilaksanakan minimum setahun sekali, setiap lembar saham dalam perseroan, berhak mewakili/mengeluarkan satu suara dalam rapat. Pelaksanaan dari hak suara ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan sendiri oleh pemegang saham atau diwakilkan pada seseorang pihak ketiga selaku Kuasa Pemegang Saham.

Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri **tidak mempunyai hak suara**. Dengan ketentuan ini, saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan **tidak dihitung dalam penentuan kuorum**. Saham untuk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga **tidak mempunyai hak suara**.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Ketentuan pasal 66 ayat (1) pasal 68 ayat 91) Undang-undang Perseroan terbatas memberikan kewenangan penuh kepada Direksi perseroan untuk secara langsung memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan

kepentingan antara Direksi dan Perseroan, maka pemanggilan dapat dilakukan oleh Komisaris perseroan (penjelasan pasal 68 ayat (2)).

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat paling lambat empat belas hari sebelum RUPS diadakan. Maksudnya untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham.

Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam dua surat kabar harian.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan dan perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan kepada pemegang saham secara cuma-cuma .

Dalam hal waktu dan cara pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Korum Rapat Umum Pemegang Saham

Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perseroan dan disyaratkan secara khusus dalam Undang-Undang Perseroan terbatas, pada umumnya suatu Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah. Jika pada rapat pertama korum tersebut tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua, yang pemanggilannya harus dilakukan dalam

jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut diselenggarakan. Penyelenggaraan RUPS kedua itu sendiri wajib diselenggarakan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari terhitung tanggal dan hari penyelenggaraan RUPS pertama tersebut. RUPS kedua ini dianggap sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat para pemegang saham, jika rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan diambil bagian, dan yang mempunyai hak suara yang sah. Jika rapat kedua juga gagal mencapai korum yang telah ditetapkan, maka atas permohonan perseroan, korum dapat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya, keputusan RUPS diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**. Bila hal tersebut tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan **suara terbanyak biasa** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah kecuali UU No.1/1995 dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar daripada suara terbanyak biasa.

Macam-macam Korum dan Keputusan RUPS

Selain korum kehadiran yang telah ditentukan secara umum tersebut diatas, Undang-undang juga mensyaratkan korum yang berbeda untuk berbagai macam putusan rapat sebagai berikut :

1. untuk setiap perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan, RUPS hanya sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang

memiliki hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Dalam hal korum pada rapat pertama tersebut tidak tercapai maka dapat diselenggarakan rapat kedua, dan rapat hanya sah dan selanjutnya berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat pemegang saham jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara yang sah, dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir dalam rapat;

2. untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, pembubaran dan perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, disyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam rapat;
3. untuk mengalihkan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan disyaratkan persetujuan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

Selain itu, Undang-undang Perseroan terbatas juga memungkinkan diadakannya rapat tanpa didahului formalitas pemanggilan rapat, selama dan sepanjang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh seluruh

pemegang saham yang mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah dan disetujui secara aklamasi (bulat) oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat.

4. 2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS meskipun masa jabatan keanggotaan masing-masing anggota Direksi telah ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan, namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota Direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, baik dengan mengangkat penggantinya yang baru maupun dengan hanya memberhentikan

keanggotaan Direksi yang bersangkutan saja, selama dan sepanjang syarat minimum jumlah anggota Direksi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, tetap dipertahankan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut hanya dapat diambil setelah anggota Direksi yang hendak diberhentikan tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Kewenangan Direksi

Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang mewakili perseroan .

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekwensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut. sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukannya diluar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, dapat tidak diakui oleh perseroan. Dengan ini berarti Direksi bertanggung

jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar perseroan.

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 atau Anggaran Dasar, dan Anggaran Dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi tersebut. dijelaskan bahwa undang-undang ini memilih sistem perwakilan kolegial. Akan tetapi, untuk kepentingan praktis masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan.

Namun, adakalanya anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, yaitu apabila :

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan (*conflicts of interest*).

Kedudukan Direksi

Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam persetujuan/perjanjian, yaitu :

1. perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi; dan
2. perjanjian kerja/perburuhan, di sisi yang lain.

Dan karena itu pelaksanaannya harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1601 c Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberatkan pada

pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut sebagai suatu *perjanjian perburuhan*.

Merumuskan kedudukan Direksi dalam dua hubungan hukum bukan masalah, sepanjang kedua hubungan hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan sejalan. Dalam hubungan hukum yang dirumuskan untuk Direksi tersebut diatas, Direksi di satu sisi, diperlakukan sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam Anggaran Dasar perseroan, dan disisi lain diperlakukan sebagai karyawan perseroan, dalam hubungan atasan-bawahan dalam suatu Perjanjian perburuhan yang mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya. Di sinilah sifat pertanggung jawaban renteng dan pertanggung jawaban pribadi Direksi menjadi sangat relevan, dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas “kuasa” dan “perintah” perseroan, untuk kepentingan perseroan.

Kewajiban Direksi/Anggota Direksi

1. Direksi wajib :

- a. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; dan
- b. menyelenggarakan pembukuan perseroan yang semuanya disimpan di tempat kedudukan perseroan.

Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan

Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan seperti tersebut pada huruf a dan b diatas.

2. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik serta mengumumkan dalam dua surat kabar paling lambat tiga puluh hari sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan. Dan keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.
3. Direksi wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:
 - a. akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman (yaitu setelah perseroan memperoleh status badan hukum);
 - b. akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan tertentu yang sifatnya mendasar seperti dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PT;
 - c. akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman atas perubahan selain yang dimaksud pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PT.

Dalam waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak pendaftaran, Direksi melakukan permohonan pengumuman perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka anggota Direksi secara **tanggung renteng bertanggung jawab** atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Selain itu, anggota Direksi juga bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum karena perolehan saham oleh perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

4. Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya, dan atau keluarganya (isteri/suami dan anak-anaknya) kepada perseroan tersebut dan perseroan lain.
5. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.
6. Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan RUPS tentang pengurangan modal perseroan kepada semua Kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar harian paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal keputusan.
7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila :
 - a. bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat (bank, asuransi dan Reksa Dana);
 - b. perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang (obligasi); atau

c. perseroan merupakan Perseroan Terbuka.

8. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. Panggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.

4.3. Komisaris

Menurut ketentuan pasal 1 UUPT, komisaris dirumuskan sebagai berikut :

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau Khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas perkataan Komisaris meliputi dua pengertian, yang pertama adalah organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Komisaris tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai tugas, wewenang maupun hak dan kewajiban dari Komisaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak sepenuhnya kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban Komisaris dalam perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas menugaskan Komisaris untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi perseroan. Dalam praktek kegiatan perseroan, termasuk untuk menyetujui Laporan Tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan. Oleh

karena itu wajarlah jika dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Sebagai konsekwensi dari “turut sertanya” Komisaris dalam mengawasi jalannya perseroan dan dalam hal-hal tertentu “turut membantu” jalannya perseroan, sebagaimana halnya anggota Direksi perseroan, Komisaris juga diwajibkan untuk melaporkan saham-saham yang dimiliki olehnya atau keluarganya pada perseroan maupun perseroan terbatas lainnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan Komisaris dalam Akta Pendirian.

Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS dengan memberitahukan secara tertulis kepada anggota Komisaris yang bersangkutan.

Anggota Komisaris yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugasnya.

Dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus diadakan RUPS dan anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Komisaris yang bersangkutan.

Apabila dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Komisaris yang bersangkutan.

Anggota Komisaris dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Dengan keputusan tersebut maka kedudukannya sebagai anggota Komisaris berakhir. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga dikatakan bahwa seluruh syarat-syarat yang berlaku bagi orang-perorangan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi berlaku juga bagi pengangkatan Komisaris perseroan.

Gugatan terhadap Komisaris

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (*derivative action*) , pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. segala kesalahan dan kelalaian oleh Komisaris dalam melaksanakan tugasnya melahirkan pertanggung jawaban pribadi dari Komisaris bersangkutan kepada perseroan dan pemegang saham perseroan.

5. Perseroan Tertutup.

Perseroan tertutup dan Perseroan Terbuka

Undang-Undang tidak memberi perumusan dengan jelas apa yang dimaksud dengan perseroan tertutup, yang ada perumusannya adalah perseroan terbuka. Dalam pasal 1.6 UUPT, perseroan terbuka dirumuskan sebagai berikut :

Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari perumusan ini, perseroan terbuka ada 2 (dua) kriteria yaitu :

1. modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu;atau
2. perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam pasal 1 ayat (22) perseroan terbuka dirumuskan sebagai berikut :

Perusahaan Publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau sejumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dari perumusan kedua undang-undang tadi maka yang dimaksud dengan perseroan terbuka adalah perseroan yang memenuhi kriteria :

1. memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan pemegang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham, atau
2. perseroan yang melakukan penawaran umum.

Dengan demikian lawan dari perseroan terbuka adalah perseroan tertutup dan perseroan tertutup adalah :

1. perseroan sebagaimana dirumuskan pada pasal 1.1 UUPT.
2. Modal yang disetor tidak lebih dari Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan pemegang sahamnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pemegang saham.
3. perseroan yang tidak melakukan penawaran umum

Untuk selanjutnya tulisan ini hanya terfokus pada perseroan terbatas yang tertutup, milik pengusaha swasta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman.

B. Perseroan Terbatas ditinjau dari Hukum Islam.

B 1. Hukum Islam dan Syariat Islam.

Pada penggunaan sehari-hari seringkali terjadi penggunaan istilah **Hukum Islam** (Fikih Islam) dan **Syariat Islam**, untuk menunjuk aspek hukum sehingga kedua istilah tersebut menjadi jumbuh, padahal kalau diperhatikan dari segi bahasa terdapat perbedaan isi, serupa tetapi tidak sama. Pengertian Syariat mencakup seluruh ajaran Islam, yang meliputi aspek akidah, ibadah, akhlaq dan muamalat, syariat disebut juga syara', millah dan diin, sedangkan pengertian Fikih hanya menyangkut hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci, fikih adalah ilmu yang menggunakan pikiran dan ijtihad. Dengan demikian yang menunjuk kepada hukum Islam adalah fikih islam, bukan syariah islam sebab hukum islam hanya merupakan sebagian dari ajaran islam atau dengan kata lain Fikih Islam hanya merupakan sebagian dari syariat islam. Adapun sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijtihad. Aspek Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspeknya.

Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian, hukum ketatanegaraan, hubungan antarnegara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.

Jika dalam ilmu hukum dikenal adanya pembagian hukum kepada hukum privat dan hukum publik, hukum islam pun dapat pula dibagi menjadi dua macam hukum tersebut, dengan tambahan hukum ibadat.

Dengan demikian, kita dapat menyebutkan adanya *Hukum Privat Islam*, *Hukum Publik Islam* dan *Hukum Ibadat*.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalat*.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut *hukum muamalat*.⁹

⁹ K.H Ahmad Azhar Basyir, M.A : Asas-asas Hukum Muamalat.

B. 2. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas dalam Hukum Islam.

Perseroan Terbatas adalah perseroan yang mengatur hubungan hukum antar manusia, lebih khusus mengatur hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih yang saling berjanji untuk menyelenggarakan kegiatan suatu usaha. Karena menyangkut hubungan antar manusia, maka perseroan terbatas didalam sistem Hukum Islam termasuk hukum muamalat.

Perseroan Terbatas termasuk hukum muamalat, tetapi perlu dipahami, sekalipun hukum muamalat berkaitan dengan kehidupan manusia yang bersifat duniawi, tidak bisa dipisahkan secara hitam putih dengan hukum Ibadah, sebab apa yang dilakukan manusia yang bersifat duniawi mempunyai akibat di akherat kelak. Nilai-nilai agama, nilai-nilai Ibadah, dalam bidang muamalat dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram dalam bidang muamalat yang pada dasarnya halal, masih mungkin terdapat hukum halal dan haram juga.

B. 3. Perseroan Terbatas dengan wawasan syarikat islam.

Sebagaimana disinggung diatas, bahwa perseroan terbatas termasuk hukum muamalat, memang secara formal belum ada bentuk hukum perseroan terbatas sebagai badan hukum di dalam hukum muamalat, tetapi ini bukan berarti didalam cakupan hukum muamalat, tidak ada sama sekali bentuk hukum yang mirip atau serupa dengan perseroan terbatas. Didalam Hukum Islam ada persekutuan yang dikenal dengan istilah *Syirkah* atau *Syarikah*.

Syirkah (perseroan) dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, sedemikian bergabungnya hingga tidak bisa dibedakan lagi

antara satu bagian dan bagian yang lain. Adapun menurut syara, Syarikah (perseroan) adalah transaksi atau akad antara dua orang atau lebih, yang duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Syarikah dapat berbentuk syarikah hak milik (*syarikatul amlak*) atau syarikah transaksi (*syarikatul uqud*). Syarikah hak milik adalah syarikah terhadap zat barang, seperti syarikah terhadap barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang dibeli oleh keduanya. Adapun *syarikatul uqud* mengembangkan hak milik seseorang.

Terdapat lima jenis syarikah yang tergolong *syarikah uqud*: (1) *syarikatul inan*, (2) *syarikatul abdan*, (3) *syarikatul mudharabah*, (4) *syarikatul wujuh*, (5) *syarikatul mufawadhah*.

1. Syarikah al-inan.

Syarikah al-inan adalah syarikah antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengikutkan modal ke dalam syarikah dan sekaligus menjadi pengelolanya. Syarikah model inan ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Masing-masing pihak yang menyerahkan modalnya kepada mitranya, sekaligus memberikan kepercayaan serta izin untuk mengelolanya. Dengan kata lain, masing-masing pesero (*syarik*) saling mewakilkan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan, yang nisbahnya bisa sama atau berbeda, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak berdasarkan proporsi modal. Keterangan masalah ini disampaikan oleh

Abdurrazzak di dalam kitab *al-jami'* dari Ali r.a. yang mengatakan, "Pungutan itu bergantung pada kekayaan, sedangkan laba bergantung pada apa yang mereka sepakati bersama."

2. Syarikah Abdan.

Syarikatul Abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahliannya, misalnya syarikah antara insinyur sipil dan arsitek tanpa modal dana dalam sebuah usaha konsultan bangunan. Keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan. Syarikah semacam ini hukumnya mubah, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Atsram dengan sanad dari Ubaidah dari bapaknya, Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan,

"Aku, Ammar bin Yasir, dan Sa'ad bin Abi Waqash melakukan syirkah (perseroan) terhadap apa yang kami dapatkan pada Perang Badar, kemudian Sa'ad membawa dua orang tawanan perang, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa."

Tindakan mereka dibiarkan Rosulullah saw..

3. Syarikah Mudharabah (Muqaradhah)

Mudharabah atau *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk dikelola atau diusahakan, sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan. Dalam teknis perbankan, mudharabah adalah akad kerja sama antara bank yang menyediakan modal dan mudharib (nasabah) yang memanfaatkannya

untuk tujuan-tujuan usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika terdapat kerugian, akan ditanggung oleh shahibul mal sesuai proporsi modal yang di-mudharabahkan. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah adalah: (1) *shahibul mal* (pemilik modal), (2) *mudharib* (pengelola), (3) keuntungan, (4) usaha yang dijalankan, (5) akad perjanjian.

4. Syarikah al-wujuh

Syarikah al-wujuh adalah syarikah antara dua orang dengan modal dari pihak luar kedua orang tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih tersebut, yang bertindak sebagai mudharib, sehingga kedua pengelola tersebut menjadi pesero (syarik) yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain. Kedua pihak tersebut kemudian boleh membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan.

Syarikah al-wujuh dapat terjadi karena adanya kedudukan, profesionalisme, atau kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit kemudian menjualnya secara kontan. *Syarikah al-wujuh* dibolehkan menurut syara' karena pada dasarnya termasuk syarikah *mudharabah* atau *syarikah abdan* yang juga diperbolehkan.

5. Syarikah Mufawadhah

Syarikah Mufawadhah adalah gabungan berbagai jenis syarikah, baik inan, abdan, mudharabah, maupun wujud. Misalnya, dua orang insinyur

melakukan syarikah dengan keahliannya (*syarikah abdan*), keduanya sama-sama memiliki modal yang di-syarikah-kan modalnya ke dalam syarikah kedua insinyur mendapat kepercayaan pedagang untuk membeli barang secara tunda (*syarikah wujuh*). Gabungan syarikah seperti ini disebut syarikah mufawadhah. Kebolehan syarikah model ini didasarkan bahwa menjalankan masing-masing syarikah diperbolehkan, maka menjalankan secara keseluruhannya pun diperbolehkan.

Apabila berbagai keterangan tersebut dirumuskan, maka perumusannya sebagai berikut :

Syarikah al-inan

Syarikah antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengikutkan modal ke dalam syarikah dan sekaligus menjadi pengelolanya, kemudian keuntungan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan.

Syarikah Abdan

Syarikah antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahliannya saja tanpa harta mereka untuk menerima pekerjaan. Keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan.

Syarikah Mudharabah

Syarikah mudharabah (*qiradh*) terjadi bila pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk dikelola atau diusahakan, sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama.

Syarikah al-wujuh

Syarikah antara dua orang (atau lebih) dengan modal dari pihak di luar keduanya.

Syarikah Mufawadhah

Syarikah gabungan dari berbagai bentuk syarikah model *inan*, *abdan*, *mudharabah*, dan *wujuh*.

Dasar hukum syirkah adalah sebagaimana Firman Allah

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٤٦﴾

“Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan amat sedikit mereka itu.

Shood (38) : 24

Yang dimaksud dengan kata *al khulata* dalam ayat ini adalah : mereka yang berserikat.

Dari beberapa macam syirkah/syarikah yang mendekati atau mirip dengan perseroan terbatas adalah syarikah al-inan yang dirumuskan sebagai berikut :

Sayid Sabiq :

Sirkah adalah akad (perjanjian) antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan¹⁰

Sedangkan Muhammad Ismail Yunanto merumuskan sebagai berikut :

Syirkah antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengikutkan modal ke dalam Syirkah dan sekaligus menjadi pengelolanya, kemudian keuntungan dibagi diantara mereka berdasarkan kesepakatan.¹¹

Adapun yang menjadi rukun serikat menurut ketentuan hukum islam adalah

1. Siqhat (lafaz akad).
2. Orang/pihak-pihak yang mengadakan sarikat.
3. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun syirkah ada tiga: (1) *siqhat/aqad (ijab dan qobul)*, (2) pihak yang berakad baik yang membawa modal (*syariku al-mal*) ataupun membawa keahlian dan tenaga (*syariku al-badn*), dan (3) usaha.

Dari perumusan Syirkah dan dari rukun dan syarat-syarat sahnya Syirkah, maka dapat dirinci unsur-unsur syirkah sebagai berikut :

- a. adanya siqhat perjanjian;
- b. adanya pokok pekerjaan : melakukan kegiatan usaha;
- c. adanya modal yang diikutsertakan.

¹⁰ Sayid sabiq : Fikih Sunnah 13 Hal 193-200.

¹¹ Muhammad Ismail Yunanto dan
Muhammad Karebet Widjajakusumo : Menggagas Bisnis Islam HI 126-129.

- d. adanya pembagian keuntungan.

Akad (perjanjian)

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Akad (perjanjian) adalah unsur yang sangat penting bagi pandangan hidup pengusaha muslim, sebagaimana disebut di dalam As Sunah, Rosulullah saw, bersabda : Allah swt berfirman :

Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka.

(Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah).

Sebab bagi pengusaha muslim setiap perjanjian tidak hanya disaksikan oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam hadist diatas, tetapi juga didampingi oleh Allah. Pada perjanjian tersebut dituntut pada masing-masing pihak sikap jujur, sikap saling mempercayai, sebab begitu ada yang tidak jujur, ada yang tidak dipercaya, pada waktu itu juga Allah meninggalkan mereka. Dan ini berarti usaha mereka sudah tidak lagi diridhoi oleh Allah.

Siqhat ijab dan Kabul dalam perjanjian pembentukan serikat didalam praktek di Indonesia diadakan dalam bentuk tertulis yaitu dicantumkan

dalam akta pendirian serikat. Adapun mengenai syarat-syarat orang (pihak) yang mengadakan syarikat haruslah :

1. Orang yang berakal;
2. Baligh; dan
3. dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tersebut amat bergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Syariah Islam

Mengenai pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan) mencakup bidang usaha yang sangat luas, baik dibidang produksi, distribusi dan pemasaran, maupun dibidang perdagangan dan jasa.

Melakukan Kegiatan Usaha adalah Ibadah

Kegiatan usaha dapat ditinjau dari segi obyeknya dan dapat ditinjau dari segi subyeknya. Dari segi obyeknya, kegiatan usaha dapat meliputi bidang yang sangat luas, mulai dari bidang produksi/eksploitasi, distribusi maupun jasa. Ditinjau dari segi subyeknya, mereka adalah pengusaha dan mereka yang bekerja kepada pengusaha. Sebagai seorang muslim, baik selaku pengusaha maupun selaku pekerja pada pengusaha, selalu terikat dengan prinsip Ilahiah dan pada tujuan Ilahi, karena itu segala tingkah laku dan perbuatannya, selalu berlandaskan pada akidah dan syariah dan segala amal perbuatannya selalu diniati untuk beribadah kepada Allah.

Ibadah :

Ibadah menurut bahasa berarti taat, tunduk, merendahkan diri dan menghambakan diri kepada Allah. Adapun kata ibadah menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala Nya di akhirat.¹²

Bagi seorang muslim beribadah adalah melaksanakan perintah Allah sebagaimana firmanNya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

Wahai para manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menjadikan kamu dan telah menjadikan orang-orang sebelum kamu, agar supaya bertaqwa.

Al Baqoroh (2) : 21.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ ﴿٥٦﴾

Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku.

Az-Zariat (51) : 56.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa jin dan manusia diciptakan Allah agar mereka beribadah kepadaNya. Ajaran ini harus difahami bahwa ibadah bukan hanya

¹² Aunur Rahim Faqih, Amir Mu'allim : Ibadah dan Akhlaq dalam Islam : hal 2-7.

berupa sholat, zakat, puasa dan haji, tetapi mempunyai pengertian yang lebih luas.

Ibadah dalam pengertian yang umum adalah menjalani kehidupan untuk memperoleh ridho Allah.

Ruang lingkup ibadah pada dasarnya digolongkan pada :

1. **Ibadah Umum** : ibadah yang menyangkut segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhoan Allah. Unsur terpenting dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini agar benar-benar bernilai ibadah NIAT yang ikhlas.

Untuk memenuhi tuntutan agama dengan mendekati jalan yang halal dan menjauhi yang haram.

2. **Ibadah Khusus** : ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ada tuntunannya dalam syara'. Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak, manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan peraturan dan tuntunan yang ada, tidak boleh mengubah, menambah dan mengurangi. Contoh : wudhu, sholat, puasa ramadhan.

Dengan demikian seorang muslim yang melangkah kakinya keluar pintu untuk mencari rejeki bagi anak dan istrinya adalah beribadah kepada Allah apabila pada waktu melangkah **diniati** untuk mendapatkan rejeki yang diridhoi Allah dan rejeki yang diridhoi Allah adalah rejeki yang halal.

Menghindari hal yang haram agar mendapat ridho Allah

Sebagaimana diuraikan didepan, bahwa kegiatan usaha meliputi bidang yang sangat luas, yaitu dari bidang eksploitasi, produksi, sampai dengan

distribusi termasuk bidang jasa. Yang tujuan akhir adalah barang siap saji yang siap untuk dikonsumsi atau dengan kata lain dari proses produksi sampai konsumsi. Yang menjalankan atau mengusahakan proses produksi adalah manusia dan yang mengkonsumsi juga manusia. Umat islam sebagai manusia baik dalam kedudukannya selaku pengusaha maupun sebagai konsumen, dalam segala tingkah laku dan perbuatannya selalu berlandaskan pada akidah dan syariah dalam usaha untuk mendapatkan ridho Allah.

DR. Yusuf Qardhawi merumuskan sebagai berikut :

- Halal** : ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Pembuat Syariat untuk dilakukan.
- Haram** : ialah sesuatu yang dilarang oleh Pembuat Syariat dengan larangan yang pasti, dimana orang yang melanggarnya akan dikenai hukuman (siksa) di akherat, dan adakalanya dikenai hukuman juga di dunia.
- Makruh** : ialah sesuatu yang dilarang oleh Pembuat Syariat tetapi larangan itu tidak begitu ditekankan. Maka sesuatu yang makruh lebih rendah tingkatannya dari pada haram. Dan pelakunya tidak dikenakan sanksi sebagaimana sanksi yang dikenakan terhadap yang haram. Hanya saja apabila yang bersangkutan terus-menerus melakukannya dan memperturutkan keinginannya saja, maka akan menjadikan yang bersangkutan berani melakukan yang haram.

Atas dasar perumusan halal dan haram, DR. Yusuf Qardhawi mengambil kesimpulan prinsip-prinsip islam tentang Halal dan Haram sebagai berikut :

1. Segala sesuatu pada asalnya mubah.
2. Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata-mata.
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
4. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya.
5. pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan yang haram.
6. apa saja yang membawa kepada yang haram adalah haram.
7. bersiasat atas yang haram adalah haram
8. Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram.
9. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh kedalam yang haram.
10. tidak ada pilih kasih dan pemilah-milahan terhadap segala sesuatu yang haram.

Landasan hukum halal dan haram :

Firman Allah :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالْعَلِيَّةَ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkanNya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik.”. Katakanlah : “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Al-A’Raaf (7) : 32.

Dari prinsip-prinsip tentang Halal dan Haram, yang terkait dengan kegiatan usaha adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah (diperkenankan) dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang sholih dan tegas dan pembuat syariat yang mengharamkannya.

Apabila tidak ada nash yang sholih seperti sebagian hadist dhaif atau tidak tegas petunjuknya, maka tetaplah sesuatu itu pada hukum asalnya yaitu halal. Halal dirumuskan sebagai berikut :

Halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan) yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh Pembuat Syariat untuk dilakukan.¹³

Yang diharamkan berupa makanan dalam Kitabullah terbatas pada sepuluh hal, yaitu seperti yang dikatakan dalam firmanNya :

¹³ Dr. Yusuf Qardhawi : *Haram dan Halal*.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَاللَّطِيئَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ .

(المائدة: ٢)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai 1), darah 2), daging babi 3), daging yang disembelih atas nama selain Allah 4), yang dicabik 5), yang dipukul 6), yang jatuh 7), yang ditanduk 8), yang dimakan binatang buas 9), kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan yang disembelih untuk berhala 10). Diharamkan pula bagimu mengundi nasib dengan anak panah, karena itu sebagai kefasikan.

Al Ma'idah (5) : 3.

2. Hanya Allah yang berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu.
3. Haram ialah segala yang dilarang oleh Pembuat Syariat dengan larangan yang pasti, dimana orang yang melanggarnya akan dikenai hukuman (siksa) di akherat dan adakalanya dikenai hukuman juga didunia.
4. Apa yang membawa kepada yang haram adalah haram, ini berarti bahwa jika telah mengharamkan sesuatu maka Islam juga mengharamkan segala sesuatu yang dapat menjadi perantara dan membawa yang haram itu. Sebagai contoh adalah kasus Ajinomoto yang sempat menggemparkan Indonesia pada waktu itu. Ajinomoto adalah bumbu masak yang bahannya mengandung lemak babi, sekalipun wujudnya sudah berubah seperti

tepung, tetapi karena asalnya mengandung barang yang diharamkan, maka Ajinomoto adalah barang haram.

5. Apa yang membawa kepada yang haram adalah haram. Sebagaimana sabda Nabi Saw :

مَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.

Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka tidak mendapat pahala, bahkan mendapat dosa.

(diriwayatkan oleh Ibnu khuzainah, Ibnu Hibban dan al-hakim dari Abu Hurairah).

لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْخَيْرِ. إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَمْحُو الْخَيْرَ.

Tidak seorangpun yang bekerja untuk mendapatkan harta dengan jalan haram kemudian ia sedekahkan bahwa sedekahnya itu akan diterima dan kalau ia infakkan tidak juga beroleh berkah; dan tidak pula ia tinggalkan di belakang punggungnya (sesudah meninggal), melainkan akan menjadi bekal ke neraka.

Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Kejelekan tidaklah dapat menghapus kejelekan.

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud).

6. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam yang haram.

Bagi pengusaha muslim yang setiap memulai pekerjaannya diniati dengan ibadah, maka adanya bahan baku yang halal adalah merupakan syarat mutlak demi kebaikan dan keselamatan didunia dan di akherat. Hal mana akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak.

Perlu kiranya dipahami bahwa masalah halal dan haram tidak hanya menyangkut soal makanan, tetapi juga hal lain, sebagaimana disampaikan oleh DR. Yusuf Qardhawi, bahwa :

“Asal segala sesuatu adalah mubah.” Tidak terbatas pada masalah benda, tetapi mencakup perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang tidak termasuk dalam urusan ibadah yaitu apa yang kita sebut adat kebiasaan (tradisi) atau muamalah.

Dari perumusan tersebut ada beberapa kategori barang diharamkan yaitu :

1. Benda atau barang berupa makanan yang berdasarkan nash al-Qur'an memang diharamkan misalnya babi.
2. Barang berupa makanan yang sebenarnya termasuk barang yang dihalalkan, tetapi didapat dengan cara yang haram, maka menjadi barang haram. Misalnya ayam goreng yang didapat dari hasil mencuri.

3. Barang yang bukan barang makanan, yang didapat atau diproses dengan cara yang haram, maka hasilnya adalah barang haram.
4. Perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang nyata-nyata menurut nash al-Qur'an memang diharamkan.

Modal yang diikutsertakan

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat berupa :

1. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya disebutkan dalam bentuk uang).
2. Modal yang disertakan oleh masing-masing pihak dijadikan satu yaitu menjadi modal serikat, dan tidak dipersolkan lagi darimana asal-usul modal itu.
3. Dengan demikian ada pemisahan antara harta pribadi dan harta yang berupa modal yang disertakan dalam syirkah.

Menyangkut besarnya modal yang disertakan dalam Syirkah oleh masing-masing peserta, tidak ditentukan dalam Syariat. Besarnya modal penyertaan dalam Syirkah, tidak ada keharusan masing-masing peserta menyetorkan modal yang sama besarnya, tetapi juga sangat dimungkinkan penyertaan modal tidak sama besarnya, yang penting mereka telah sepakat.

Adanya Pembagian Keuntungan

Sedangkan yang menyangkut pembagian keuntungan maupun kerugian, yang diperoleh serikat, sebagian ahli hukum islam berpendapat : pembagian keuntungan maupun kerugian didasarkan kepada penyertaan modal masing-masing, ada juga sebagian ahli hukum islam yang

berpendapat, pembagian keuntungan maupun kerugian tidak karena berdasarkan perbandingan penyertaan modal, masing-masing pihak bisa saja menerima keuntungan atau kerugian tidak atas dasar perbandingan penyertaan modal, asal saja pembagian tersebut terlebih dahulu diperjanjikan pada waktu pendirian serikat. Lazimnya dalam praktik bahwa pembagian keuntungan dan kerugian tersebut telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan yang dibuat oleh serikat.

B. 4. Persamaan dan Perbedaan antara Perseroan Terbatas dengan Syirkah

Bila dibandingkan unsur-unsur yang ada pada Syirkah dan ada pada perseroan terbatas, ada persamaan dan ada perbedaannya.

Persamaannya :

1. ada unsur perjanjian;
2. ada unsur usaha (kegiatan usaha)
3. ada unsur penyertaan modal
4. ada unsur tujuan yaitu untuk mendapat keuntungan

Dari isi unsur-unsur tersebut, pada hakekatnya sama, apa yang diatur didalam perseroan terbatas dengan apa yang diatur didalam syirkah.

Perbedaannya :

1. Syirkah tidak menyebut dengan tegas bahwa Syirkah adalah **badan hukum**, hal ini disebabkan karena hukum islam memang belum mengenal istilah badan hukum. Dan sampai sekarang belum ada yang mengakui bahwa syirkah adalah badan hukum. Perseroan terbatas sendiri baru pada tahun 1995, dengan diundangkannya UU No.1 Tahun 1995

tentang Perseroan terbatas, baru dinyatakan dengan tegas sebagai badan hukum, sebelum tahun 1995, perseroan terbatas diatur di dalam KUHD, dimana didalam peraturan tersebut tidak disebut bahwa perseroan adalah badan hukum, sekalipun demikian diakui bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

2. Dalam hal penyertaan modal, Syirkah tidak menyebutkan dengan tegas, bagaimana sistem penyertaan modalnya, hal ini berbeda dengan perseroan terbatas yang dengan tegas menyatakan bahwa modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
3. Didalam Syirkah, tidak ada pengaturan dengan jelas, bagaimana sistem organisasinya. Didalam Syirkah, sistem organisasinya dilaksanakan atas dasar kesepakatan. Hal ini berbeda dengan perseroan terbatas yang mengatur dengan jelas sistem organisasinya, dari organ perseroan, kewenangan, syarat pengangkatan dan sebagainya.

Dari uraian tersebut, maka pada hakekatnya SYIRKAH pada garis besarnya adalah sama dengan unsur-unsur yang ada pada perseroan terbatas.

Sekalipun didalam Syirkah tidak ada organ perseroan, ini bukan berarti pengelolaan Syirkah amburadul. Tujuan adanya organ perseroan dalam perseroan terbatas adalah untuk mengangkat seseorang untuk menjalankan perseroan dan karenanya bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya.

Umat islam dalam menjalani hidupnya selalu berpedoman pada Al Qur'an dan Sunnah Rosulullah, tidak terkecuali apabila menjalankan suatu usaha.

Prinsip dasar ajaran islam dalam hal ada sesuatu pekerjaan, kegiatan atau usaha yang dikerjakan secara bersama, dua orang atau lebih, selalu ada yang bertindak sebagai imam (pemimpin). Pada hakekatnya tidak ada sesuatu yang dapat dijalankan secara kolektif dalam islam tanpa adanya imam (pemimpin).

Rosulullah s.a.w menekankan perlunya seorang pemimpin lewat sabdanya yang artinya sebagai berikut (Abu Daud) :

Apabila tiga (atau lebih) orang memulai perjalanan (atau pekerjaan) mereka, pilihlah salah seorang dari kamu sebagai pimpinan (imam).

Rosulullah s.a.w juga bersabda :

Tangan Allah ialah diatas jemaah (organisasi), siapa terpisah darinya akan ke neraka (Tarmidzi)

Sabda yang artinya “Tangan Allah itu ke atas jemaah (organisasi)” mempunyai makna yang luas. Sabda tersebut jelas menunjukkan bahwa kemakmuran dan keberhasilan pekerjaan tergantung pada sejauh mana kemampuan dan kecakapan pengurusnya.¹⁴

Karena itulah Allah memerintahkan umat islam supaya berhati-hati ketika memilih pengurus, sebagaimana dalam FirmanNya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ
اللَّهَ نَظِيرًا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنْ كَانَتْ سَيِّئًا يَصِرَ إِلَهُكُمُ

¹⁴ Afzalur Rahman : Doktrin Ekonomi Islam I

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

(An Nisaa' :58)

Islam mengajarkan kepada kita, untuk memilih pengurus harus berdasarkan dua kemampuan, yaitu pengetahuan dan kemampuan pengurus. Pada hakekatnya kedua ciri tersebut sangat penting untuk menjadikan seorang pengurus yang cakap dan berhasil.

Hal ini berdasarkan Firman Allah :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ
عَلِيمٌ

Artinya : Yusuf berkata : Jadikanlah saya penjaga gudang perbendaharaan di bumi Mesir. Sesungguhnya aku seorang penjaga yang baik lagi mengetahui.

(Yusuf : 55)

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas bagi Pengusaha Muslim, untuk melakukan kegiatan usaha bersama dengan orang lain dalam arti bergabung dengan orang lain, sudah dikenal dalam Hukum Islam. Karena itulah Pengusaha Muslim yang mendirikan Perseroan Terbatas, didalam melakukan kegiatan usahanya selalu dilandasi niat untuk beribadah dan menghindari barang atau pekerjaan yang diharamkan agar mendapat ridho Allah.

C. Pengembangan Usaha Perseroan Terbatas Menurut Syariat Islam.

1. Alasan Pengusaha mengembangkan usaha.

Perseroan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba, dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang dimaksud, Direksi akan menumbuhkan dan mengembangkan perseroan.

Direksi perseroan sebelum mengembangkan usahanya akan mengevaluasi kekuatan dan kemampuan perseroan yang dipimpinnya. Yang dievaluasi adalah :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan pengendali kegiatan perseroan;
2. Modal yang meliputi keseluruhan alat dan perlengkapan, mesin serta bangunan, dana yang dipakai dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa; dan dana cadangan.
3. Tenaga terdidik dan terlatih yang mempunyai ketrampilan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa.
4. Organisasi (manajemen).

Seseorang yang berinisiatif untuk merencanakan, melaksanakan dan pengawasan dengan memandu dan menyusun seluruh operasional perusahaan adalah kerja organisasi (manajemen). Organisasi memainkan peranan yang sangat penting dan dianggap sebagai faktor produksi yang sangat penting. Kemajuan dan perkembangan perseroan, sangat tergantung kepada pengetahuan, kecakapan dan kemampuan Direksi dalam mengurus dan mengelola perseroan.

Setelah Direksi mengevaluasi kedalam pasar, dengan melihat kemampuan dan kekuatannya, kualitas dan produk yang menjadi andalannya, kemudian Direksi akan mengevaluasi peluang pasar antara lain ada berapa macam produk yang ada di pasaran, pemilik produk, kualitas produk yang ada di pasar dan sebagainya dan akhirnya mengambil kesimpulan : produk yang menjadi andalannya masih mempunyai peluang pasar atau tidak. Hasil evaluasi dikonsultasikan kepada Komisaris selaku pengawas dan Pembina perseroan.

C. 2. Arah Pengembangan Usaha.

C.2.a. Peningkatan produksi dan distribusi.

Dari hasil evaluasi Direksi berkesimpulan bahwa peluang pasar masih terbuka, produk dari pesaing baik dalam hal harga dan kualitas masih bisa ditandingi, penyebaran pemasaran masih belum merata, karena itulah Direksi menyampaikan usulan kepada Komisaris dan setelah mendapat persetujuan Komisaris diputuskan untuk meningkatkan produksi.

Pengertian Produksi.

Produksi dapat diartikan sebagai penciptaan kekayaan melalui eksploitasi oleh manusia terhadap sumber-sumber alam. Produksi dapat diartikan dengan perubahan bentuk suatu barang, produksi juga diartikan dengan memindahkan tempat penggunaan suatu barang sehingga dalam teori ekonomi pengertian produksi dapat diartikan dengan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu barang yang meliputi aktivitas produksi, distribusi, perdagangan dan penyimpanan karena semua aktivitas tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu barang. Dalam hal ini

produksi yang dimaksud adalah perubahan bentuk suatu barang dengan meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan.

Haram memproduksi barang yang diharamkan.

Untuk mencapai target hasil, memproduksi barang apa saja, dan sebanyak mungkin tetapi didalam kendali batas-batas yang halal. Dalam hal ini ada prinsip-prinsip yang harus di pegang antara lain *Seorang muslim tidak boleh memudharatkan dirinya dan orang lain, tidak boleh memudharatkan dan saling memudharatkan dalam Islam.* Diharamkan menanam anggur jika dimaksudkan untuk dijadikan minuman keras. Menjual anggur bagi orang yang mengetahui akan dibuat untuk minuman keras hukumnya haram, karena membantu penyebaran dosa dan kerendahan akhlak.

Dalam sebuah hadits *shahih* dikemukakan,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا، وَوَزُرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

“Barangsiapa di dalam Islam memprakarsai suatu perbuatan yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”

Haram memproduksi segala sesuatu yang merusak aqidah yang *shahih* dan akhlak.

Ajaran Islam tentang Produksi

Islam menekankan pentingnya sikap produktif yaitu berusaha memanfaatkan seoptimal mungkin semua potensi yang dimiliki.¹⁵ Produksi mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu cara dan alat serta metode dalam memproduksi, dan produksi dalam arti tujuan, nilai dan aturan memproduksi. Islam tidak pernah mencampuradukkan kedua pengertian tersebut, produksi dalam pengertian cara dan alat serta metode memproduksi semuanya diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Sesuai pula dengan keadaan zaman dan lingkungannya, karena hal ini terdapat hadits Nabi saw yang berbunyi, *"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."* Hal ini karena agama Islam lebih banyak memperhatikan tujuan daripada sarana. Karena itu dalam rangka eksploitasi alam semesta, islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang berdasarkan pada penelitian, eksperimen dan perhitungan, bahkan juga memperkuatnya. Hal yang menjadi kepedulian Islam adalah merealisasikan kemashlahatan bagi manusia, dan menghilangkan mudharat, serta memudahkan sarana hidup baginya. Islam mendorong penggunaan sarana dan alat yang bisa memberikan kemanfaatan lebih banyak bagi manusia. Memang kadangkala penggunaan metode modern, peralatan teknik modern, perubahan ini mengakibatkan mudharat bagi manusia, tetapi akan lebih besar mudharatnya yang menimpa umat secara keseluruhan jika peralatan yang sudah kadaluarsa itu dipertahankan. Para ahli fiqh menyatakan: *"Dipikul mudharat yang lebih kecil untuk menghindari mudharat yang lebih"*

¹⁵ Imamudin Yulianto, SE, M.Si :Perekonomian Islam

besar, dan dipikul pula mudharat yang khusus untuk menghilangkan mudharat yang umum.”¹⁶

Arti penting produksi adalah usaha manusia untuk memperoleh sumber penghidupan mendorong manusia untuk melakukan berbagai aktivitas produksi. Dengan daya ciptanya yang tinggi akan terus menghasilkan hal-hal baru dan metode serta teknik yang semakin sempurna dalam berproduksi, sehingga mampu menjaga taraf kehidupan manusia sejalan dengan permintaan jaman. Peranan penting produksi nyata-nyata menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf hidup manusia, Al-Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap sistem produksi barang.

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bagi manusia dengan ilmu pengetahuan dan amal.

Bagi manusia yang mau bekerja keras, Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di hutan dan gunung dan apa yang ada di lautan, Allah telah memberi berupa alam yang bisa digarap dan diproses menjadi kekayaan, sebagaimana Firman Allah :

UPT-PUSTAK-INDIP

¹⁶ DR. Yusuf Qardhawi : Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
 رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ
 فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٢٢٢﴾
 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ
 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٢٢٣﴾
 وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ
 كَفَّارٌ ﴿٢٢٤﴾

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendakNya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.

Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung ni'mat

Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (ni'mat Allah).

Ibrahim (14) : 32-34

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَيَا طَائِفَةً مِّنَ النَّاسِ
مَنْ يَجِدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿١٠﴾

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'matNya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.

Luqman (31) : 20.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
إِنِّي ذَٰلِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾

Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripadaNya. Sesungguhnya pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Al-Jaatsiyah (45) : 13.

Al-Qur'an telah membimbing manusia bahwa seseorang dapat memperoleh semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dengan bekerja keras dan untuk pemanfaatan kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi, dan di langit dan yang tersebar di persada bumi tergantung pada **Ilmu Pengetahuan dan Amal**.

Produksi tidak hanya untuk keuntungan perusahaan, tetapi juga memberi manfaat kepada umat.¹⁷

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa produksi adalah peningkatan nilai tambah dari suatu barang antara lain dengan perubahan bentuk misalnya dari bahan dasar (bahan mentah) diolah menjadi bahan setengah jadi atau dari bahan setengah jadi diolah menjadi bahan siap saji yang siap untuk di konsumsi. Pengusaha sebagai pemimpin perusahaan akan merencanakan suatu produksi yang bisa mendatangkan keuntungan dan hasil produksi dapat diterima pasar. Hal lain yang direncanakan pengusaha adalah :

(1) target hasil: keuntungan materi dan non materi, (2) pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin dan (4) keberkahan atau keridhaan Allah.

Target hasil : keuntungan materi dan non materi. Tujuan perusahaan tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah*) atau nilai materi setinggi-

¹⁷ Muhamad Ismail Yunanto : *Menggagas Ekonomi Islam*

tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan keuntungan atau manfaat nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. *Manfaat* yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah* (keuntungan materi). Masih ada 3 (tiga) orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. Dengan orientasi *qimah insaniyah*, berarti pengelola perusahaan juga dapat memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah khuluqiyah* mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlaqul karimah (akhlak mulia) menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas pengelolaan perusahaan, sehingga dalam perusahaan tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu, *qimah ruhiyah* berarti perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap amalnya, seorang muslim selain harus berusaha meraih qimah yang dituju, upaya yang dilakukan itu juga haruslah sesuai dengan aturan Islam. Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktivitas harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Jadi, amal perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesadaran akan hubungannya dengan Allah SWT ketika melakukan setiap perbuatan dinamakan dengan ruh. Inilah yang

dimaksud dengan menyatukan antara materi dan ruh. **Inilah juga yang dimaksud bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah.**

Pertumbuhan. Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih sesuai target, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus-menerus dari setiap profit dan benefitnya itu. Hasil perusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya. Upaya penumbuhan ini tentu dijalankan dalam koridor syariat. Misalnya, dalam meningkatkan jumlah produksi seiring dengan perluasan pasar, peningkatan inovasi sehingga bisa menghasilkan produk baru dan sebagainya.

Keberlangsungan. Belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Karena itu, perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebagaimana upaya pertumbuhan, setiap aktivitas untuk menjaga keberlangsungan tersebut juga dijalankan dalam koridor syariat.¹⁸

Distribusi dan Pemasaran.

Memproduksi barang tujuannya adalah untuk didistribusikan atau dengan kata lain untuk dijual. Dalam rangka untuk distribusi atau menjual ini ada rambu-rambu yang harus dipatuhi agar usahanya mendapat ridho Allah, antara lain prinsip-prinsip yang harus diperhatikan :

1. **Menjual sesuatu yang haram adalah haram.** Contoh : babi adalah haram dan memperdagangkan babi adalah haram.

¹⁸ Muhammad Ismail Yusanto : *Menggagas Bisnis Islam*.

Karena itu Rosulullah saw bersabda :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

“Sesungguhnya Allah dan Rosul-Nya telah mengharamkan memperdagangkan khamr, bangkai, babi, dan patung.”

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya.”

2. Mempermainkan harga.

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum *Tabi'l* untuk melakukan mekanisme sesuai dengan penawaran dan permintaan. Oleh Karena itu, ketika harga-harga melambung tinggi dan orang-orang mengatakan kepada Nabi saw, “Wahai Rosulullah, tentukan harga buat kami”, beliau menjawab :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَائِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menekan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Saya ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun dari kamu yang menuntut saya karena suatu kezaliman baik mengenai masalah darah maupun masalah harta.

3. Penimbun itu Laknat.

Oleh karena itu Nabi saw melarang menimbun dengan menggunakan ungkapan yang sangat keras, sabdanya :

عَنِ احْتِكَرِ الطَّعَامِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ اللهُ مِنْهُ

“Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sesungguhnya Allah berlepas diri darinya.”

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

“Tidak menimbun kecuali orang yang berdosa.”

Perkataan “khati’un (orang yang berdosa) ini bukanlah perkataan yang ringan.

Perkataan ini dikemukakan Al-Qur’an untuk menggambarkan orang-orang yang sombong dan angkuh, seperti Fir’aun, Haman, dan tentara mereka.

Firman-Nya :

فِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا

كَانُوا خَاطِئِينَ

“Sesungguhnya Fir’aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang berdosa.”

al-Qashash : 8

Nabi saw menjelaskan kepribadian dan egoisme orang yang suka menimbun itu dengan sabdanya :

بِسِّ الْعَبْدِ الْمُتَكَبِّرِ، إِنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَ لَهُ، وَإِنْ سَمِعَ
بِغَلَاءٍ فَرِحَ.

“Sejelek-jelek orang ialah penimbun. Jika mendengar harga murah, dia bersedih; dan jika mendengar harga naik dia bergembira.”

4. Barangsiapa menipu kami, bukanlah dari golongan kami

Islam mengharamkan penipuan dalam segala macam bentuknya, baik dalam jual beli maupun dalam semua macam muamalah manusia. Seorang muslim dituntut berlaku jujur dalam semua urusannya. Sebab keikhlasan dalam beragama lebih tinggi nilainya daripada semua usaha duniawi.

Nabi saw bersabda :

الْيَمَانُ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ
كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.

“Penjual dan pembeli berhak melakukan tawar-menawar selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacatnya), maka barakah dagangannya akan dihapus.”

لَا يَحِلُّ لَأَحَدٍ يَبِيعُ بَيْعًا إِلَّا يَبَيِّنَ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ
لِبَيْنٍ يَقْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَّهُ.

“Tidak halal bagi seseorang menjual suatu barang melainkan dia harus menjelaskan cacat barangnya; dan tidak halal bagi orang yang mengetahui hal itu melainkan dia harus menjelaskannya.”

Pada suatu hari Rosulullah saw melewati seseorang yang sedang menjual bahan makanan (biji-bijian), lalu beliau tertarik, kemudian beliau memasukkan tangan ke dalamnya, sehingga menemukan bagian bawahnya basah. Lalu beliau bertanya, “Mengapa ini, wahai pemilik makanan?” orang itu menjawab, “Terkena hujan.” Lalu beliau bersabda :

نَبَأُ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَادُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

“Mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami.”

Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Rosulullah saw melewati suatu (tumpukan) makanan yang dipuji-puji oleh pemiliknya, lalu beliau memasukkan tangan ke dalam bahan makanan itu, ternyata makanan itu jelek, lalu beliau bersabda :

بِعْ هَذَا عَلَى حَدِّهِ وَهَذَا عَلَى حَدِّهِ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

“Juallah ini secara tersendiri, dan ini secara tersendiri pula. Barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami.”

Begitulah yang dilakukan umat Islam zaman dahulu, yaitu mereka menjelaskan cacat barang dagangannya dan tidak menyembunyikannya,

mereka berlaku jujur dan tidak berdusta, dan mereka tulus serta tidak mau menipu. Ibnu Sirin pernah menjual seekor kambing, lalu dia berkata kepada calon pembelinya, *"Saya akan menjelaskan cacat pada kambing saya ini, yaitu kakinya cacat."*

Al-Hasan bin Shalih pernah menjual budak, lalu dia berkata kepada calon pembelinya, "Dia pernah mengeluarkan darah dari hidungnya satu kali."

Walaupun hanya sekali, jiwa seorang Mu'min merasa tidak enak kalau tidak menyebutkan cacat barangnya, meskipun akan mengurangi harganya.

5. Banyak Bersumpah.

Lebih diharamkan lagi apabila penipuan itu dikuatkan dengan sumpah palsu.

Oleh karena itu Rosulullah saw melarang para pedagang banyak bersumpah,

lebih-lebih sumpah palsu. Beliau bersabda :

الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسُّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبُرْكَاتِ.

"Sumpah 'menguntungkan perdagangan, tetapi dapat menghapuskan barakah."

Beliau tidak menyukai banyak bersumpah dalam jual-beli karena :

Pertama : memungkinkan terjadinya penipuan.

Kedua : menyebabkan hilangnya rasa mengagungkan nama Allah dari dalam hati.

6. Curang terhadap takaran dan timbangan

Diantara jenis penipuan ialah curang di dalam menakar dan menimbang. Al-Qur'an menaruh perhatian serius dalam masalah ini, dan memasukkan dalam *sepuluh wasiat* pada akhir surat al-An'aam :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ، لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.”

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

al-Isra' : 35

رَبِّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.

Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, maka sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Al-Muthaffifiin : 1-6

Orang muslim harus berlaku adil (jujur) semaksimal mungkin, karena keadilan yang sejati jarang dapat diwujudkan. Oleh karena itulah sesudah memerintahkan menyempurnakan takaran dan timbangan, Al-qur'an mengatakan : *"Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya."* Al-qur'an menceritakan kepada kita tentang kaum yang curang dalam muamalah, menyimpang dari kejujuran dalam menakar dan menimbang, dan selalu mengurangi hak-hak orang lain. Kemudian Allah mengutus seorang Rosul untuk mengembalikan mereka ke jalan keadilan dan kebaikan sebagaimana mengembalikan mereka kepada tauhid. Mereka adalah kaum Nabi Syu'aib yang diseru dan diingatkan oleh Nabi Syu'aib dengan seruannya :

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾

﴿وَرَبُّوْا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Asy-Syu'ara : 181-183

Muamalah seperti inilah yang ideal yang harus dilakukan oleh setiap Muslim di dalam kehidupan, hubungan, dan seluruh pergaulannya. Ia tidak boleh menakar dengan 2 (dua) macam takaran dan menimbang dengan 2 (dua) macam timbangan, satu timbangan pribadi dan satu lagi timbangan untuk umum. Satu timbangan untuk dirinya dan orang yang disukainya, dan satu timbangan lagi untuk masyarakat secara umum. Untuk diri sendiri dan pengikutnya dia memenuhi timbangan, tetapi untuk orang lain dia menguranginya.

7. Membeli Barang Rampokan dan curian sama dengan merampok dan mencuri

Di antara bentuk tindakan dosa yang diberantas oleh Islam dan pelakunya dikurung dalam wilayah yang sesempit-sempitnya ialah tindakan membeli sesuatu yang diketahuinya sebagai hasil jarahan, curian, atau yang diperoleh dengan apa saja yang tidak benar. Karena apabila dia membelinya, berarti dia membantu penjahar, pencuri, atau pelanggar hak tersebut dalam melakukan penjarahan, pencurian, dan pelanggaran.

Rosulullah saw bersabda :

مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً (أَيُّ مَسْرُوقًا) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ
اشْتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا .

“Barangsiapa membeli barang curian sedangkan dia tahu bahwa itu hasil curian, maka sesungguhnya dia telah bersekutu di dalam dosa dan lainnya.”

Dosa ini tidak dapat terhapus karena lamanya rentang waktu barang curian dan jarahan tersebut, Karena lamanya suatu masa dalam syariat Islam tidak menjadikan yang haram sebagai sesuatu yang halal, dan tidak menggugurkan hak pemilik yang asli karena berlalunya waktu, sebagaimana ditetapkan oleh sebagian hukum sipil.¹⁹

C.2.b.Membuka jenis produk atau usaha baru

Apabila Direksi dari hasil evaluasi berpendapat bahwa kapasitas produksi dari peralatan yang dimiliki (mesin-mesin) sudah mentok, sehingga untuk peningkatan produksi dibutuhkan lahan baru, mesin-mesin dan sebagainya yang biaya investasinya cukup tinggi, dilain pihak peluang pasar sudah sempit, kompetitor yang bermain adalah pengusaha-pengusaha besar, yang menguasai jaringan yang sangat luas, dari hulu sampai kehilir, maka Direksi untuk mengembangkan perusahaan akan menempuh jalur membuka usaha baru atau memproduksi barang jenis baru dengan tetap menggunakan peralatan yang ada.

¹⁹ DR. Yusuf Qardhawi : Halal dan Haram.

Baik untuk membuka jalur usaha baru atau memproduksi barang jenis baru, kedua-duanya membutuhkan investasi yang cukup besar. Untuk membuka jalur usaha baru Direksi akan mengevaluasi :

- a. produk apa yang belum banyak beredar di pasaran tetapi dibutuhkan masyarakat;
- b. bagaimana kualitas dan harga produk calon pesaing;
- c. bagaimana peredarannya, apakah sudah cukup luas dan tertata rapi atau belum;
- d. produk calon pesaing di produksi oleh siapa (milik konglomerat atau bukan);
- e. bagaimana sikap pemerintah terhadap produk calon pesaing;
- f. dan sebagainya.

Kalau dari hasil evaluasi Direksi berpendapat bahwa membuka jalur usaha baru lebih menjanjikan daripada meningkatkan produksi yang sudah ada, maka pilihan pada membuka jalur usaha baru, kemudian Direksi juga akan mempertimbangkan untuk mengembangkan perusahaan dengan membuat produk jenis baru, yang tidak sama dengan produk yang sudah ada tetapi masih dapat memanfaatkan prasarana dan sarana yang ada, sedang ditinjau dari biaya investasi lebih kecil, tetapi peluang pasar cukup besar.

Dari hasil evaluasi dan analisa dari berbagai kemungkinan, maka hasilnya akan dirundingkan dengan Komisaris. Setelah mendapat persetujuan Komisaris, Direksi memutuskan untuk mengembangkan perusahaan dengan membuat produk jenis baru.

Dengan memutuskan membuat produk jenis baru, ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan antara lain kendala memasuki pasar :

1. skala ekonomi yang akan memaksa usaha baru untuk menyesuaikan skala produksinya dengan perusahaan yang sudah ada;
2. diferensiasi produk memaksa mengeluarkan biaya dan usaha yang besar untuk merebut pasar;
3. kecukupan modal;
4. dalam hal distribusi membutuhkan biaya tersendiri untuk membangun saluran distribusi;
5. kualitas dan harga serta biaya produksi;
6. teknologi.

Kalau dari semua segi sudah diperhitungkan, maka siap untuk memulai produksi baru dan memasuki pasar.

C.2.c.Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan diatur didalam Bab VII tentang Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan UU Perseroan Terbatas dari pasal 102 sampai dengan pasal 109. pada pasal-pasal tersebut hanya diatur tentang garis besarnya saja, sedangkan kejelasan dari pasal-pasal tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 merumuskan sebagai berikut :

1. **Penggabungan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi besar.
2. **Peleburan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.
3. **Pengambilalihan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas.

Penggabungan dan peleburan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 itu dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu, akibatnya pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan demikian juga aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Tujuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.²⁰

Pada dasarnya tujuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah untuk mengembangkan perusahaan/perseroan dengan

²⁰ Drs. M. Djumhana : *Hukum Perbankan di Indonesia*

cara ekspansi perusahaan keluar (*eksternal*). Adapun sebab-sebab penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan adalah :

1. untuk meningkatkan pasar.

Perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang digabungi, mempunyai produk yang sama atau sejenis dan masing-masing mempunyai pasar sendiri-sendiri, dengan adanya dua perubahan atau lebih yang bergabung, maka pasar dari produk tersebut penyebaran dan konsumen makin luas.

2. untuk melindungi pasar.

Perusahaan A memproduksi barang yang di pasar merupakan saingan dari produk perusahaan B. dengan perusahaan A menggabungkan diri kepada perusahaan B, maka pasar dari produk perusahaan B terlindungi. Perusahaan A telah bubar tetapi merek produk dari A yang pada hakekatnya sekarang sudah menjadi milik B, tetap dibiarkan beredar di pasar tetapi yang memproduksi adalah perusahaan B.

3. untuk menguasai pasar.

Untuk mengembangkan usahanya, perusahaan selain memproduksi barang yang sudah ada, tetapi ada produk lain yang dipegang oleh perusahaan lain. Dengan digabungnya perusahaan lain tadi maka merek produk dari perusahaan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut.

Macam-macam Penggabungan dan Pengambilalihan.

a. Secara Horizontal :

Dua perusahaan atau lebih yang memproduksi hasil yang sama atau serupa dan menjualnya di wilayah yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kegiatan usaha yang tingkat dan jenis produksinya sama.

b. Secara Vertikal :

Penggabungan atau pengambilalihan dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan pembeli dan penjual yaitu perusahaan yang satu menghasilkan produk dan hasil produk tersebut di jual kepada perusahaan yang lain. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dibidang usaha yang sejenis tetapi berbeda tingkatannya.

c. Penggabungan, pengambilalihan Konglomerat

Yaitu Penggabungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar yang terpisah atau berbeda.

Landasan Hukum Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Landasan hukumnya adalah :

1. Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Dari UUPT secara umum diatur didalam Bab VII dari pasal 102 sampai dengan pasal 109. Untuk penggabungan dan peleburan :

UUPT:

Pasal 102

Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru.

Pasal 107

Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1995

Pasal 2

Penggabungan dan peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.

Pasal 3

Penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mengakibatkan :

- a. pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan
- b. aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Syarat-syarat penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

UUPT

Pasal 104

- (1) perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :
 - a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan
 - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Pasal 105

- (1) keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat (1) dan pasal 76.
- (2) Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1995**Pasal 4**

- (1) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan.
 - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (3) pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Pasal 5

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur.

Pasal 6

- (1) penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Rencana penggabungan atau peleburan dituangkan dalam Rancangan Penggabungan atau Peleburan yang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan;
- c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan;
- d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan baru hasil peleburan.

- e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan; dan
- f. Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan.

Usulan sebagaimana dimaksud diatas, wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan.
- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;
- d. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan;
- e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
- f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain :
 - 1) neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yang independent;

- 2) cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
- 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;
- 4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
- 5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan;
- 6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- 7) laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- 8) kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan.
- 9) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
- 10) Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- 11) Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan atau Peleburan disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).

Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS baik yang telah disertai perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3).

Rancangan Peleburan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Rancangan Pengambilalihan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pasal 22 berlaku pula bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan.

Sebagaimana telah disyaratkan dalam UUPT maupun dalam peraturan pelaksanaannya bahwa untuk perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, karyawan perseroan, maupun kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Ini berarti bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan pihak-pihak tertentu dan harus dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni berbagai bentuk yang

merugikan masyarakat, hal ini ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 27

Pelaku Usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Ajaran Islam mengharamkan Monopoli

Islam mewajibkan sikap hidup kasih sayang kepada makhluk, karena itu pengusaha/pedagang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan

tujuan usahanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun diatas jerih payah orang lain, khususnya orang-orang yang lemah diantara mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pihak yang kuat dan mampu, sebagaimana Firman Allah :

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”

Al-aniyaa : (107)

Sabda Rosulullah SAW

“Sesungguhnya saya ini adalah rahmat (kasih sayang) yang dianugerahkan”.

Nabi SAW menjadikan rasa kasih sayang sebagai syarat untuk mendapatkan rahmat Allah.

Sabdanya :

“Orang-orang belas kasih akan dirahmati (dikasihi) oleh Ar-Rahman (tuhan yang Maha Pengasih), kasihilah orang dimuka bumi niscaya yang berada dilangit akan mengasihimu”.

(H.R Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Atas dasar kasih sayang, Islam mengharamkan monopoli. Yang dimaksud monopoli adalah memaksa barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Semakin besar dosa orang yang melakukannya jika praktek monopoli tersebut dilakukan secara kolektif dimana para pedagang (pengusaha) barang-barang jenis tertentu bersekongkol untuk memonopolinya.

Demikian pula seorang pedagang yang memonopoli satu jenis tertentu dari barang dagangan untuk keuntungan dirinya sendiri dan menguasai pasar.

Sabda Rosulullah SAW.

“Barangsiapa memonopoli maka ia berdosa.”

(H.R. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi)

Barang yang haram dimonopoli

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang dua hal, jenis barang yang haram dimonopoli dan waktu diharamkannya monopoli. Diantara ahli fiqih ada yang membatasi pengharaman monopoli pada bahan makanan pokok saja.

Rosulullah saw, bersabda :

“Barang siapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas darinya.” (HR. Ahmad dalam Musnad Ibnu Umar, dishahihkan Ahmad Syakir (no.488), dan al-‘Iraqi dalam Takhrij Ahadist al-Ihya’ (II/72)).

Berkata Ali ra. : *“Barang siapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari niscaya hatinya menjadi keras.”*

Sebabnya adalah karena ia hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri dan tidak menghiraukan bahaya yang menimpa masyarakat. Setiap kali terjadi penurunan harga, dia merasa sakit dan menderita. Tetapi setiap kali mendengar berita kenaikan harga, dia merasa senang dan gembira. Karena itu, tidak ayal lagi rasa kasih sayang pasti akan lenyap dari hatinya dan terjangkiti oleh egoisme dan kesesatan hati.

Kesesatan hati merupakan bencana yang mencampakkan manusia dari ketinggian martabat kemanusiaan kepada lembah kebinatangan dan kebuasan.

Berkata Imam al-Ghazali, “Adapun yang selain bahan makanan pokok dan yang tidak termasuk penopang bahan makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian dan sebagainya maka tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Adapun yang menopang bahan makanan pokok seperti daging, buah-buahan dan apa saja yang kadang-kadang dapat menggantikan fungsi bahan makanan pokok meskipun tidak dapat disejajarkan dengannya maka hal ini perlu dikaji. Diantara para ulama ada yang menolak pengharaman monopoli pada mentega, madu, keju, minyak, biji-bijian dan sebagainya yang dianggap diluar lingkup bahan makanan pokok.

DR. Yusuf Qardhawi :

Dari perkataan al-Ghazali ini dapat difahami bahwa mereka menganggap bahan makanan pokok terbatas pada bahan makanan yang kering, seperti roti, beras tanpa lemak, dan lauk, bahkan mentega, minyak, biji-bijian dan sebagainya dianggap di luar kategori bahan makanan pokok. Makanan yang mereka sebutkan ini tidak cukup menurut kedokteran modern sebagai makanan bergizi yang sehat bagi manusia, karena harus terpenuhi gizinya dengan sejumlah komposisi makanan yang penting, diantaranya adalah protein, karbohidrat dan vitamin. Jika tidak, manusia menjadi rentan terhadap penyakit-penyakit kekurangan gizi.

Demikian pula obat-obatan di zaman kita telah menjadi suatu kebutuhan primer yang tidak terjadi pada zaman sebelumnya. Yang termasuk disini pula pakaian dan sebagainya karena manusia sebagaimana membutuhkan makanan ia juga membutuhkan pakaian. Kebutuhan manusia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat dan pola kehidupan mereka. Berapa banyak kebutuhan tersier dan sekunder yang menjadi kebutuhan primer. Berapa banyak dari kebutuhan primer yang menjadi keperluan darurat.

Pendapat yang paling kuat—menurut saya—adalah pengharaman monopoli untuk setiap barang yang dibutuhkan manusia, baik bahan makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah, perabotan rumah tangga atau pertukangan, dan lainnya.

Dalil yang menunjukkan hal itu adalah keumuman hadist yang mengatakan :

"Tidak melakukan monopoli kecuali pendosa."

"Barangsiapa memonopoli maka ia berdosa."

Sedangkan dalil yang melarang dan mengancam monopoli khusus bahan makanan pokok tidak dapat meniadakan keumuman hadist-hadits tersebut.

Konsideran pelarangan tersebut juga menguatkan hal itu, yakni membahayakan orang umum akibat penumpukan dan penahanan barang dagangan karena kebutuhan manusia tidak hanya kepada makanan saja, khususnya di zaman kita. Manusia juga membutuhkan makan dan minum,

berpakaian dan bertempat tinggal, belajar, berobat, bergerak dan berkomunikasi dengan yang lainnya melalui berbagai sarana transportasi dan komunikasi.

Di sini saya mendukung pendapat Imam Abu Yusuf yaitu, *"Setiap barang yang penahanannya membahayakan orang adalah monopoli."*

Semakin meningkat kebutuhan orang terhadap barang tersebut semakin besar pula dosa orang yang memonopolinya, terutama adalah bahan makanan. Terutama lagi bahan makanan pokok yang mendesak.

Waktu diharamkan Monopoli

Demikian pula silang pendapat tentang waktu yang diharamkan padanya Monopoli. Diantara para ulama ada yang menolak pelarangan di semua waktu tanpa membedakan kesempitan dan kelonggaran waktu, berdasarkan keumuman larangan dan praktek orang-orang wara'dari kaum salaf yang melaksanakan pelarangan umum untuk memonopoli.

Berkata al-Ghazali : "Dan boleh jadi pelarangan monopoli tersebut dikhususkan pada waktu persediaan bahan makanan sangat sedikit sementara orang-orang sangat membutuhkannya, sehingga tindakan menanggihkan penjualannya akan menimbulkan bahaya. Namun jika bahan makanan berlimpah ruah dan orang tidak begitu membutuhkan dan menginginkannya kecuali dengan harga yang rendah, kemudian pemilik bahan makanan menunggu perubahan kondisi itu dan tidak menunggu sampai paceklik, maka tindakan ini tidak termasuk tindakan yang membahayakan tersebut.

Jika masanya adalah masa paceklik dan dalam penimbunan madu, lemak dan sebagainya terdapat unsur yang membahayakan, maka sepatutnya diputuskan untuk dilarang (diharamkan). Penentuan haram tidaknya tindakan menanggukkan penjualan bahan makanan pokok dikembalikan kepada ada tidaknya unsur membahayakan ini, karena ia merupakan hal yang difahami dari pengkhususan pelarangan monopoli bahan makanan. Jika tidak ada unsur yang membahayakan, maka memonopoli bahan makanan pokok ini tidak luput dari hukum makruh karena ia menantikan prinsip-prinsip bahaya, yaitu kenaikan harga. Menantikan datangnya bahaya itu sendiri di bawah tingkatan tindakan membahayakan secara langsung. Tingkat bahaya ini akan menentukan tingkat keharaman dan kemakruhan tindakan monopoli yang dilakukan.”²¹

Dari uraian tersebut diatas, diharamkannya monopoli suatu barang, lebih banyak ditujukan kepada barang yang sudah jadi, barang yang siap dipergunakan.

Haramnya suatu barang menurut UU No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Kalau didalam ajaran Islam larangan monopoli ditujukan kepada barang yang sudah jadi, barang yang dibutuhkan manusia, maka cakupan UU No. 5 Tahun 1999 lebih luas lagi, yaitu meliputi perjanjian, kegiatan dan posisi

²¹ DR. Yusuf Qardhawi : Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.
DR. Yusuf Qardhawi : Norma dan Etika Ekonomi Islam.

dominan dari pelaku usaha yang mengakibatkan merugikan masyarakat dan sesama pelaku usaha yang kedudukannya lebih lemah.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian :

- a. oligopoli : menetapkan harga yang harus dibayar konsumen
- b. penguasaan produksi atau pemasaran.
- c. Menetapkan harga dibawah harga pasar.
- d. Membuat pembagian wilayah.
- e. Pemboikotan
- f. Kartel : mempengaruhi harga.
- g. Oligopsoni : bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau pasokan barang.

Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan usaha :

1. monopoli : penguasaan produksi dan atau pemasaran suatu barang.
2. monopsoni : menguasai pasokan atau pembeli tunggal.
3. persekongkolan.

C.3. Membutuhkan Modal Melalui Bank Syariah.

Dari hasil evaluasi perusahaan mempunyai kemampuan untuk lebih berkembang, tetapi untuk pengembangan dibutuhkan **modal segar**. Hasil evaluasi dikonsultasikan dengan Komisaris selaku pengawas dan pembina perseroan dan Komisaris menyetujui untuk mengembangkan usaha perseroan. Untuk memperoleh modal tambahan untuk mengembangkan usaha, pengusaha berhubungan dengan Bank Syariah.

a. Landasan hukum keberadaan Bank Syariah

adalah UU nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan, yang telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998, tentang Perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan adanya UU nomor 7 tahun 1992, telah membuka pintu kelahiran Bank Syariah, sekalipun masih menggunakan istilah **bagi hasil**.

Hal ini dinyatakan dalam pasal 6 huruf (M) Usaha Bank Umum meliputi:

M : menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13 huruf (C)

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

C : menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 1992, tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 1 ayat (1)

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 6

(1) : Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.

(2) : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dengan demikian menurut UU nomor 7 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya PP. nomor 72 tahun 1992, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini berbeda setelah berlakunya UU nomor 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan, pada undang-undang ini sudah secara tegas menggunakan istilah : prinsip syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dengan diubahnya pasal 6 huruf (M) sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Pasal 13 :

C : menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (pasal 1.13) karena operasinya berpedoman ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka Bank Islam disebut pula dengan “Bank Syariah”.

b. Kedudukan Bank Syariah.

Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dirumuskan pada pasal 1.2 UUPT atau UU Perbankan.

“Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” atau dapat juga berkedudukan sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dirumuskan pada pasal 1.4

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Bank Syariah baik sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, harus melaksanakan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah sebagaimana dirumuskan pada pasal 1.13 UUPT atau UU Perbankan.

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan

sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”

Perbedaan yang mendasar antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah: Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran karena itulah Bank Perkreditan Rakyat tidak bisa digunakan oleh para pengusaha dalam melaksanakan kegiatannya, dan karena itu pula untuk selanjutnya yang dibahas dalam tulisan ini adalah Bank Syariah sebagai Bank Umum.

c. Kegiatan Usaha Bank Syariah

kalau kita mencermati isi Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Perbankan yang diubah, maka telah merinci dan membatasi kegiatan usaha bank, yakni: *pertama*, mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank; *kedua*, kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat; dan *Ketiga*, Bank Umum dapat mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Umum lebih luas daripada kegiatan usaha yang dijalankan Bank

Perkreditan Rakyat. Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk dari bank berdasarkan syariah itu tidak sama dengan produk-produk bank secara konvensional. Beberapa prinsip dari produk bank berdasarkan syariah adalah sebagai berikut :

Salah satu yang menjadi prinsip dasar dari bank berdasarkan syariah adalah baik bank maupun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi jika ada hasil, maka hasil tersebutlah yang dibagi diantara bank dengan pihak nasabah.

Karena latar belakang dari timbulnya bank berdasarkan syariah adalah untuk menghindari larangan riba yang berlaku dalam hukum Islam, maka akhirnya dalam perkembangannya produk-produk dari bank berdasarkan syariah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Bahkan kebanyakan dari produk bank tersebut masih menggunakan nama dalam Bahasa Arab. Beberapa produk bank berdasarkan Syariah memang ada *counterpartnya* dalam produk bank umum, sementara yang lainnya terasa asing sama sekali. Bahkan beberapa prinsip dalam perbankan secara konvensional terpaksa dilanggar, dan ini memang merupakan konsekwensi dari pengakuan terhadap eksistensi dari bank berdasarkan syariah itu sendiri. Karena itu pula Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 membuka

kemungkinan khusus bagi bank berdasarkan syariah ini. Diantara prinsip hukum perbankan yang dilanggar oleh bank berdasarkan syariah ini adalah :

Bahwa pada umumnya suatu bank tidak boleh memegang saham dalam suatu perusahaan lain, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus. Sementara dalam prinsip bank berdasarkan syariah, sebagai konsekwensi dari pembagian hasil tersebut, terdapat produknya yang mengharuskan bank memegang saham dari perusahaan yang dibiayainya. Selain daripada itu membeli barang modal atau barang perdagangan untuk perusahaan lain pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh bank-bank konvensional. Hal ini berbeda kiranya dengan *perusahaan leasing*, dimana dalam *konstruksi leasing* tersebut sudah terdapat unsur pembelian *barang leasing* oleh pihak *perusahaan leasing*. Akan tetapi dalam beberapa bentuk pembiayaan dari bank berdasarkan syariah, pembelian barang yang dibiayai tersebut juga merupakan salah satu unsur utamanya.²²

Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H :²³

Setelah mempelajari dan memahami berbagai jenis fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh sebuah Bank Islam, penulis berpendapat bahwa suatu bank Islam atau bank syariah pada hakikatnya adalah suatu lembaga yang sangat unik, yaitu lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan suatu *commercial bank* (bank umum) dan *multi-finance company* (lembaga pembiayaan). Teknik-teknik finansial yang

²² Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M : Hukum Perbankan Modern.

²³ Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, SH.

dikembangkan dalam perbankan Islam – baik dalam rangka pengerahan dana dari bank itu maupun dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank itu bagi nasabahnya – adalah teknik-teknik finansial yang tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi didasarkan pada *profit and loss sharing principle* (PLS).

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 huruf (M) dan pasal 13.c UUP, bahwa Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketetapan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor : 32/34/Kep/Dir, tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1999. Berdasarkan pasal 1.13 UUP dan S.K Direksi Bank Indonesia, khususnya pasal 28 dan pasal 29, Bank Umum Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 - a. giro berdasarkan prinsip *wadiah*;
 - b. tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*;
 - c. deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*; atau
 - d. bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*;
2. melakukan penyaluran dana meliputi :
 - a. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 1. murabahah;
 2. istishna;
 3. ijarah;

4. salam;
 5. jual beli lainnya.
- b. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
1. mudharabah;
 2. musyarakah;
 3. bagi hasil lainnya.
- c. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
1. hiwalah;
 2. rahn;
 3. qardh.
3. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah;
 4. Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah;
 5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*;
 6. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*;
 7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*;

8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*;
10. Melakukan fasilitas *letter of credit* berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wadiah* serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*;
11. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*;
12. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Umum Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, Bank Umum Syariah dapat pula :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* pada Bank Umum Syariah atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah*;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Bank Umum Syariah juga dapat bertindak sebagai lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

d. Mudharabah dan Musyarakah.

Dari berbagai kegiatan usaha Bank Syariah, yang menarik bagi pengusaha yang membutuhkan modal segar adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)

Pengertian Mudharabah :

Muhammad Syafe'I Antonio :

“*al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian di pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.”

Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H :

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.

Pengertian Mudharabah menurut ahli fiqh :

Mudharabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Pengertian Mudharabah menurut *Kazarian* :

Mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib Al-mal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib Al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu :

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *shahib Al-mal* (atau *shahibul mal*) atau *rabb Al-mal*.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahib Al-mal* (atau *shahibul mal*); pihak tersebut disebut *mudharib*.

Mudharabah juga disebut dengan istilah lain, yaitu *qirad*. Dalam hal yang demikian itu investor atau pemilik modal disebut *muqarid*. Istilah *mudharabah* dipakai oleh Mahzab Hanafi, Hambali, dan Zaydi.

Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh Mahzab Maliki dan Syafi'i.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis : *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama **Salafussaleh** seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar, sedangkan yang dimaksud dengan *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahib Al-mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahib Al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang *notabene* dibiayai dengan dana *shahib Al-mal* tersebut. Adalah *mudharib* sendiri, tanpa campur tangan dari *shahib Al-mal*, yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut. paling jauh *shahib Al-mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut.

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh *shahib Al-mal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shahib Al-mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *Mudharib*. *Mudharib* hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudharabah* itu diperjanjikan – bahwa antara *shahib Al-mal* dan *mudharib* akan berbagi keuntungan (apabila usaha bersama mereka itu memperoleh keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau *profit and loss sharing*

principle (PLS) diantara mereka. Dengan kata lain, sekalipun sesuai dengan prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi-transaksi berdasarkan prinsip syariah – yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung resiko – namun dalam hal transaksi *mudharabah* resiko finansial sepenuhnya dipikul oleh *shahib Al-mal*. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak memikul resiko finansial, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansial. Itulah sebabnya mengapa *mudharabah* kadang-kadang disebut pula sebagai “*partnership in profit*.”

Dari keterangan tersebut diatas dapatlah dimengerti bahwa tanpa adanya unsur kepercayaan dari *shahib Al-mal* kepada *mudharib*, maka perjanjian transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Karena unsur kepercayaan merupakan unsur penentu, maka dalam perjanjian *mudharabah*, *shahib Al-mal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila *shahib Al-mal* tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap *mudharib*.²⁴

Musyarakah

Instrumen penting lain yang digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan selain *mudharabah* adalah *musyarakah* atau penyertaan modal. *Musyarakah* adalah kemitraan antara bank dan nasabah untuk bersama-sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayai suatu investasi.

²⁴ Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H : Perbankan Islam.

Muhammad Syafe'I Antonio :

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berbeda dengan ketentuan dalam *mudharabah* yang tidak memungkinkan bank dalam kedudukan sebagai *shahib Al-mal* turut campur dalam pengelolaan perusahaan, pada *musyarakah* bank mempunyai hak untuk diwakili dalam direksi perusahaan yang bersangkutan dan mempunyai hak suara. Dalam *musyarakah*, bank adalah mitra usaha. Maka, dalam kedudukannya sebagai mitra usaha, bank mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha dalam perjanjian *musyarakah*, antara lain turut mengelola usaha yang dibiayai. *Al-musyarakah* ada dua jenis : *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Pada bank konvensional, penyertaan modal dalam perusahaan (*musyarakah*) dilarang oleh undang-undang. Untuk penyertaan modal yaitu

perusahaan pembiayaan ada lembaga tersendiri yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang diatur didalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 61 Tahun 1998. Diantara jenis LKBB yang sama dengan *musyarakah* adalah modal *ventura*, yang dirumuskan oleh **Suhrawardi K. Lubis**, sebagai berikut :

Modal Ventura adalah suatu kegiatan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu.

Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Pengusaha yang berhubungan dengan Bank Syariah, dihadapkan pada beberapa pemberian fasilitas dan diantaranya *Mudharabah* (bagi hasil) dan *Musyarakah* (penyertaan modal) dalam hal ini pengusaha memilih *mudharabah* dengan pertimbangan :

1. mendapat dana segar
2. tanpa agunan.
3. bebas melakukan gerak usaha, tanpa intervensi pihak bank
4. tanpa resiko.

Hubungan hukum antara Bank Syariah dan Nasabah.

Setiap pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank kepada nasabah, selalu dituangkan dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis. didalam praktek ada dua macam perjanjian yaitu perjanjian yang formatnya sudah ditentukan

oleh bank yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah. Untuk pemberian fasilitas pembiayaan tertentu juga dipersyaratkan perjanjian yang dibuat oleh Notaris. Perjanjian baik yang formatnya telah ditentukan (perjanjian baku) maupun perjanjian yang dibuat oleh Notaris diatur didalam Hukum Perjanjian. Ketentuan umumnya dimuat dalam Buku III K.U.H.Pdt. Hukum Perjanjian didalam hukum perdata menganut sistem terbuka artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, hal ini berarti pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian (R. Subekti : 1976, 13) prinsip ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 (1) KUHPdt, mengemukakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Permasalahannya adalah Bank Syariah didalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha (pasal 1.13 UUP). Dalam pasal ini digunakan istilah **aturan perjanjian** berdasarkan hukum Islam dan ini harus ditafsirkan isi atau prinsip-

prinsip perjanjian dalam hukum Islam bukan hukum Islamnya. Hal ini harus dipahami bahwa Hukum Islam bukan hukum positif. Isi atau prinsip-prinsip perjanjian memuat hukum Islam dapat dimasukkan ke dalam perjanjian baku yang formatnya telah disediakan oleh Bank atau dimasukkan di dalam *clause* perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris.

e. Penyelesaian Sengketa

Akibat hukum dari perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak, bila terjadi sengketa maka penyelesaiannya akan diselesaikan berdasarkan Hukum Perdata dan Lembaga yang menyelesaikannya adalah Pengadilan Negeri. Memang mungkin untuk diselesaikan di luar Pengadilan misalnya di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, asal hal ini sudah dimasukkan dalam *clause* perjanjian yang ditanda-tangani oleh para pihak.

Di Indonesia ada 2 (dua) Lembaga Arbitrase yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993 dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977.

Menurut UU nomor 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dirumuskan sebagai berikut : (pasal 1.1) :

Arbitrase adalah cara menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian di dalam perjanjian antara Bank Syariah dan Nasabah, harus ada *clause* perjanjian yang menyebutkan dengan tegas, bila terjadi sengketa di antara mereka akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase, misalnya diselesaikan oleh BAMUI. Perjanjian yang sudah dengan tegas menyebutkan bila ada sengketa akan diselesaikan oleh BAMUI, maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili, hal ini ditegaskan dalam pasal 3 UU nomor 30 tahun 1999 :

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Hal ini dapat dilihat sikap Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung, *clause* Arbitrase termasuk kewenangan absolut dan jika para pihak tidak menyinggunginya, maka Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Putusan Mahkamah Agung nomor 1715 K/Pdt/2001 yang memeriksa perkara perdata antara :

PT. Jaya Sumpiles Indonesia

Melawan

PT. Bukit Sumur dan Odeco Mining and Engeneering Limited.

Putusan tersebut telah diberi catatan oleh **Ali Budiarto** sebagai berikut :

Catatan :

- a. Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :

- b. Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak terdapat “klausula” yang menentukan bahwa “perselisihan yang timbul antara pihak diserahkan kepada Badan Arbitrase”, kecuali dimodifikasi oleh para pihak secara tertulis.”

sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, telah digariskan bahwa “Klausula Arbitrase” yang ada didalam suatu perjanjian itu, termasuk kewenangan absolut dan jika para pihak menyinggungnya, maka Hakim Pengadilan Negeri karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut.
- c. “Klausula Arbitrase” merupakan suatu kesepakatan para pihak tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui “Lembaga Arbitrase” yang mereka inginkan bersama.
- d. Yurisprudensi tetap mengakui bahwa arbitrase sebagai “Extra yudical” yang lahir dari “Klausula Arbitrase” dalam suatu perjanjian mempunyai legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasar atas berlakunya asas hukum “*pacta sunt servanda*”.
- e. Dengan demikian, Badan Arbitrase sebagai “Badan Extra Judicial” telah menggeser kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Badan Peradilan Negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut.
- f. Vide Yurisprudensi MA-RI No. 013 PK/N/1999 dan No. 019 K/N/1999.

g. Demikian catatan dari putusan diatas.

Ali boediarto²⁵

Permasalahannya yaitu kalau badan Arbitrase telah mengambil keputusan, apakah sudah dapat dilaksanakan (mempunyai kekuatan eksekusi) ?

Berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menyatakan :

“Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan”.

²⁵ Varia Peradilan No. 204 – September 2002.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian di Kabupaten Klaten, maka hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut :

A.1. Gambaran umum pengusaha di Kabupaten Klaten.

Pada umumnya pengusaha di Kabupaten Klaten adalah pengusaha yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan memanfaatkan sumber daya alam, ketrampilan dan kreatifitas. Didesa Janti, Kecamatan Polanharjo, ada sumber air yang melimpah yang dimanfaatkan selain untuk pertanian, juga digunakan untuk budi-daya ikan air tawar dan dengan kreatifitasnya berkembang menjadi daerah wisata bagi orang Klaten, Solo maupun Boyolali.

Dari budi-daya ikan air tawar berkembang menjadi kolam pemancingan yang sekaligus menyediakan makanan dengan lauk-pauk ikan segar yang dibakar, digoreng dan berbagai variasi menu makanan. Pada saat ini, didesa Janti ada 100 (seratus) lokasi yang berada di satu komplek, maka pada hari besar, ratusan juta rupiah mengalir ke Desa Janti.

Di sekitar daerah Kabupaten Klaten, diwilayah Kabupaten Sukoharjo, banyak berdiri pabrik tekstil atau pabrik pemintalan benang dan konveksi. Dari pabrik-pabrik selain menghasilkan barang juga menghasilkan limbah. Bagi orang awam limbah tersebut yang berupa potongan-potongan benang kusut, kain kecil atau gumpalan kapas, adalah sampah yang dibuang di

keranjang sampah, tetapi ditangan orang Klaten, dengan kreatifitasnya, barang limbah diproses menjadi barang yang berguna dan ada harganya.

Dari limbah benang, maka jadilah tali, rahut net Bulu Tangkis, net Volly, net Tennis dan sebagainya. Dari limbah potongan kain kecil-kecil jadilah celana pendek polos atau warna-warni, kaos-kaos kecil dan sebagainya. Sedang dari limbah kapas, melalui proses yang panjang, jadilah kapas kecantikan dengan kemasan yang warna-warni.

Dengan memadukan kreatifitas dan ketrampilan maka munculah central-central industri diwilayah kecamatan-kecamatan dan dari kecamatan tertentu mempunyai produksi unggulan yang seringkali menjadi ciri khas daerah tersebut.

- a. Daerah Batur, Kecamatan Ceper – dikenal dengan pengecoran logam.
- b. Kecamatan Wedi – dikenal daerah Konveksi.
- c. Kecamatan Ngawen – dikenal dengan produksi suun.
- d. Kecamatan Trucuk – dikenal dengan produksi meubel.

Dengan demikian boleh dikatakan tiap kecamatan mempunyai produk tertentu, yang tidak diproduksi oleh kecamatan lain.

Tingkat kemampuan ekonomi pengusaha di Klaten dapat dilihat jumlah investasi berupa hak atas tanah. Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, setiap tahun memproses pensertifikatan hak atas tanah baik karena peralihan hak (jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan) maupun konversi hak atas tanah rata-rata pertahun 3.500 (tiga ribu lima ratus) kasus atau rata-rata 3000 (tiga

ribu) perbulan yang menjadikan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Klaten adalah pegawai yang paling sibuk dibandingkan dengan Badan Pertanahan Nasional - Badan Pertanahan Nasional di Jawa Tengah maupun D.I. Yogyakarta.

Indikasi yang lain dapat dilihat dari jumlah Bank yang ada di Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten adalah kota kecil dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) jiwa yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kecamatan, mempunyai Bank milik Pemerintah sebanyak 6 (enam) buah, Bank Swasta sebanyak 6 (enam) buah, BRI unit dan BKK ada di setiap Kecamatan dan lebih dari 10 (sepuluh) BPR.

Tingkat kesadaran beragama penduduk Klaten cukup tinggi, hal ini dapat dilihat : bagi umat Katholik adanya gereja Assumta di desa Sidowayah, Kota Klaten, yang merupakan pusat sending dan misi dan sudah berdiri lebih dari satu abad, bagi umat Budha ada pusat pendidikan bagi calon-calon Biksu di desa Sekarsuli, Kota Klaten, yang bangunanya mengingatkan pada Biara *Siau Lien Sie*. Bagi umat islam dapat dilihat adanya pondok pesantren yang dikenal luas antara pondok pesantren Al-Mansyur didesa Popongan, Tegalgondo dibawah asuhan K.H. Salman, pondok pesantren Al-Muttaqin, di desa Candirejo asuhan K.H. Rifai Imampuro yang lebih dikenal dengan nama panggilan Mbah Lem, pondok pesantren Tegalrejo dibawah asuhan K.H. Drs. Muchlis Hudaf.

Selain daripada itu dapat dilihat dari banyaknya Jamaah Haji yang tiap tahun mengalami peningkatan. Sebelum tahun 1990, jamaah Haji Kabupaten Klaten tidak pernah lebih dari 100 (seratus) orang, antara tahun 1990-1995, jumlah jamaah Haji dibawah 400 (empat ratus) jamaah, antara tahun 1995-2000, jumlah jamaah sekitar 500 (lima ratus) jamaah dan tahun 2000-2003 jumlah jamaah lebih dari 650 (enam ratus lima puluh) jamaah.²⁶

Selain daripada itu banyak anak-anak pengusaha muslim yang dikirim ke Al-Azhar, Mesir ke Madinah, Saudi Arabia dan ratusan yang dikirim ke Pondok Gontor, Ponorogo, sedangkan yang masih anak-anak dikirim pondok pesantren Assalam, Pabelan, Kartosuro.

Para pengusaha cenderung untuk melakukan usaha sendiri, sedangkan bentuk badan hukum yang diminati adalah Perseroan Komanditer.

Bentuk badan hukum Perseroan Terbatas akan banyak diminati oleh pengusaha apabila :

1. merasa modalnya cukup besar, biasanya mereka membuat ukuran, mempunyai modal paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. mempunyai kemampuan untuk eksport; dan
3. menunjukkan bonafitasnya terhadap bank maupun terhadap rekanan bisnis.

²⁶ Data dari Yayasan Jamaah Haji Klaten.

2. Penelitian Lapangan.

a. Dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten.

Pengusaha dan perusahaan yang memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten.

a. Perseroan Terbatas	: 199
b. Koperasi	: 173
c. Perseroan Komanditer	: 617
d. Perseorangan	: 8.261

Jumlah	9.250
--------	-------

Perseroan Terbatas yang Direktornya sudah melaksanakan ibadah Haji diantaranya adalah :

1. PT. Aneka Adhilogam Karya, berkedudukan di Batur, Ceper, Klaten.
2. PT. Baja Kurnia, berkedudukan di Tegalrejo, Ceper, Klaten.
3. PT. Banten Tirta Mulia, berkedudukan di Gergunung, Klaten Utara, Klaten.
4. PT. Berkah Jaya Cemerlang, berkedudukan di Gumulan, Klaten Selatan, Klaten.
5. PT. Aghniah Mandiri, berkedudukan di Gergunung, Klaten Utara, Klaten.

Sedangkan Koperasi yang potensial adalah Koperasi Industri Batur Jaya.

b. Laboratorium Logam Ceper

Kepala Laboratorium logam Ceper saat ini dipimpin oleh **Je Sihono**, didirikan sebagai hadiah Presiden atas prestasi industri pengecoran logam Batur dalam percaturan kemajuan ekonomi nasional karena pengecoran logam Batur menyumbangkan 65 % (enam puluh lima persen) produksi pengecoran logam Nasional, hal ini ditandai dengan PT. Aneka Adhilogam Karya dan Koperasi Industri Batur Jaya mendapat penghargaan Upakarti dan Prestasi Kencana. Tujuan utama didirikan Laboratorium Logam Ceper adalah untuk pengujian hasil produksi. Dengan adanya laboratorium ini setiap produsen pengecoran logam di Ceper dapat menguji hasil produksinya, apakah yang dihasilkan sudah memenuhi standar mutu atau belum. Dengan adanya pengujian ini langsung atau tidak langsung memacu para produsen pengecoran logam untuk meningkatkan mutu produksi.

Tugas yang lain dari Laboratorium Logam Ceper adalah penelitian dan pengembangan teknologi, pelatihan dan pendampingan bagi karyawan dari perusahaan karena adanya penggunaan teknologi baru atau peralatan baru. Pada saat ini ada 2 (dua) orang tenaga ahli dari Jepang yang mendampingi tenaga-tenaga ahli dari Indonesia yang ada di Ceper. Secara ideal setiap perusahaan pengecoran logam mempunyai laboratorium sendiri-sendiri, tetapi hal ini sulit untuk dilaksanakan karena biaya untuk investasi pendirian/pembuatan laboratorium yang sangat tinggi, mencapai nilai milyaran rupiah.

c. PT. Aneka Adhilogam Karya

Berkedudukan di Batur, Ceper, Klaten.

Direktur Utama : H. Mochamad Husnun HS.

Pimpinan Perusahaan : H. Badrul Munir, B.Sc.

Kegiatan Utama : Pengecoran Logam

Produksi Unggulan : - velg racing.
- sambungan pipa air minum.

Bahan baku : - untuk velg racing bahan bakunya dari alumunium.
- untuk sambungan pipa air minum, bahan baku logam besi baja bekas pakai dari berbagai macam barang.

Pemasok Bahan Baku : rekanan dari pedagang lokal.
- untuk bahan velg racing sudah berbentuk alumunium setengah jadi berupa kotak-kotak seperti batu bata.

Ada petugas khusus yang menerima pasokan barang dengan tugas utama untuk menyeleksi mutu barang pasokan, harga dan apakah ada barang terlarang yang terbawa, sebab barang tersebut tidak diperdagangkan,

misalnya potongan-potongan rel kereta api, potongan-potongan kabel listrik yang mengandung aluminium.

Produksi dengan menggunakan **Dapur Induksi** dengan kapasitas 1 (satu) ton per/jam. Produksi rata-rata 200 ton per bulan, dan Velg Racing 15.000 keping per bulan atau 3.000 pasang.

Produksi dan Distribusi : berdasarkan pesanan, sekalipun produksi velg dapat di pasarkan langsung ke pasar, tetapi sejauh ini pemasaran diserahkan pada agen dan agenlah yang menentukan jumlah produksi.

Saat ini, dengan sarana dan tenaga kerja yang dimiliki akan mampu meningkatkan produksi, misalnya velg racing saat ini baru di produksi 15.000 keping per bulan, kalau pasar terbuka masih mungkin ditingkatkan produksinya. Velg racing mulai berproduksi baru 4 (empat) tahun, sebab pada waktu itu produksi pengecoran menurun akibat krisis ekonomi.

Hasil produksi sudah mendapat pengakuan standart internasional (ISO 902) dan dari pemerintah Indonesia telah mendapat sertifikat penggunaan Tanda SNI untuk **penyambung pipa air minum bertekanan dari besi tuang kelabu dan penyambung pipa air minum bertekanan dari besi cor bergalit bulat**. Atas prestasi PT. Aneka Adhilogam Karya, pemerintah R.I pernah memberi penghargaan berupa **Upakarti dan prestasi kencana**.

Jumlah karyawan 300 (tiga ratus) orang yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk mengoperasikan Dapur Induksi diperlukan tenaga kerja yang cakap dan terlatih karena Dapur Induksi

bahan bakarnya adalah listrik. Sekalipun mempunyai Tungku Cupola yang bahan bakarnya Cock (batubara yang diuapkan) sekarang sudah tidak digunakan. Karena ditinjau dari segi teknis Dapur Induksi lebih baik hasilnya daripada Tungku Cupola, penggunaan Dapur Induksi adalah penggunaan teknik yang lebih maju untuk peningkatan tenaga kerja. Pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan, diadakan pelatihan dan penataran dengan bekerjasama teknisi-teknisi dari Laboratorium Logam ceper.

Karyawan yang berprestasi dan masih muda dibiayai untuk menyelesaikan pendidikan jenjang D.3 dan untuk tingkat pimpinan dikirim ke Jepang untuk memperdalam manajemen produksi dan khusus untuk pengembangan velg racing dikirim ke Eropa (Jerman, Belanda dan Perancis) dan ke Cina.

Perkembangan Usaha Perusahaan.

Usaha ini dirintis sejak tahun 1968 sebagai perusahaan perorangan dengan memproduksi alat-alat pertanian dan alat-alat rumah tangga seperti cangkul, pompa air dan lain-lain. Sesuai dengan perkembangan usaha maka usaha perorangan ditingkatkan menjadi CV. Aneka Karya (1970). Dengan peningkatan kualitas hasil produksi mendapat kepercayaan dari PDAM untuk membuat sambungan pipa air minum dan dari PJKA mendapat pesanan pembuatan blok rem kereta api untuk menjaga kelangsungan pesanan, dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produksi dan waktu penyelesaian, pembuatan alat-

alat pertanian dan alat-alat rumah tangga dihentikan. Pada tahun 1994 bentuk usaha ditingkatkan dari CV menjadi PT. Terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, pembuatan sambungan pipa air minum jadi tersendat-sendat dan mulai tahun 1999 membuka divisi baru yaitu pembuatan velg racing. Pada saat ini kedua divisi berjalan lancar dan divisi velg racing ke depan sangat menjanjikan, sebab makin tahun, makin banyak merek mobil yang masuk Indonesia.

Hak karyawan adalah untuk mendapat upah (gaji) yang dibayarkan pada waktu selesai pekerjaan (borongan), atau mingguan dan ada bulanan, tergantung dari jenis pekerjaannya. Selain gaji, karyawan juga mendapat jaminan kesehatan dari Jamsostek, jasa produksi dan hadiah lebaran. Untuk membina hubungan yang harmonis antara pimpinan dan karyawan dan antar karyawan, pada tiap bulan (satu kali pada tiap bulan) diselenggarakan pengajian yang wajib diikuti oleh seluruh pimpinan dan karyawan. Dan bagi yang aktif pengajian dan bekerja dengan baik, mungkin bisa mendapat hadiah bantuan diberangkatkan naik Haji.

PT. Aneka Adhilogam Karya juga memberi hubungan dengan pengusaha-pengusaha kecil pengecoran logam (ada 16 pengusaha) yang diberi bantuan modal bimbingan teknis dan pekerjaan dan order, dan diantara 16 pengusaha kecil tadi, sekarang sudah ada menjadi besar dan mandiri. Perseroan selain membayar apa yang menjadi kewajibannya kepada karyawan, perseroan juga mengeluarkan infaq dan sodaqoh yang

diwujudkan berupa bea-siswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ada disekitarnya. Sedangkan zakat dibayarkan melalui BAZIS.

Saat ini PT. Aneka Adhilogam Karya adalah sebagai nasabah Bank mandiri dan Bank Danamon. Untuk rekening Giro, Transfer, Kredit dan Tabungan. Sekalipun di Klaten tidak ada Bank Syariah, tetapi pandangannya terhadap Bank Syariah :

1. Bunga di Bank Umum sebesar 19 % pertahun sedangkan di Bank Syariah atas dasar bagi hasil berarti 50%.
2. Kami memulai usaha katakanlah babat alas dengan susah payah, sekarang setelah berhasil dan membutuhkan tambahan modal, Bank Syariah masuk dan hasilnya dibagi sama, hal ini kami berpendapat **tidak adil**.
3. Bank Syariah dengan prinsip bagi hasil baru dikatakan adil, kalau orang mulai usaha baru atau dengan kata lain betul-betul dimulai dari nol.
4. Bank Syariah katanya tanpa jaminan/agunan, di dalam praktek, tidak ada kredit atau apapun namanya, yang diberikan tanpa jaminan (agunan).

Kredit di Bank Umum harus bayar bunga, bunga Bank itu haram ?

Bunga yang diharamkan sudah jelas hukumnya di dalam Al-Qur'an dan bunga yang bagaimana yang diharamkan, juga jelas hukumnya di Al-Qur'an jadi hanya ada 2 (dua) pendapat bunga bank haram atau bunga bank halal dan kami berpendapat bunga bank halal. Bunga yang

diharamkan adalah bunga yang dilakukan oleh para rentenir yang di Batur sini dikenal dengan istilah “LISIT”, yang bunganya cukup tinggi bisa sampai 10 persen perbulan dan sekali orang kejebur akan sangat susah untuk mentas. Kalau terlambat membayar bunga maka akan terjadi bunga berbunga. Bandingkan dengan bunga bank yang masih terkontrol.

d. PT. Baja Kurnia

Berkedudukan di Jeblokan, Ceper, Klaten.

Direktur Utama : Prof. DR. Drs. H. Musa Asy'arie

Kegiatan Utama : Pengecoran Logam.

Produksi Unggulan : a. Balance Weight Forklift.
b. Counter Weight Pumping Oil.
c. Crank Pumping Oil.
d. Hand Tractor
e. Hydrant Pillar Two Way.
f. Brake Drum dll.

Bahan Baku : Logam besi baja bekas pakai dari
bermacam-macam barang, misalnya bekas kapal, mesin-mesin besar, jembatan dll.

Pemasok : rekanan dari pedagang lokal.

Ada petugas khusus untuk menyeleksi dengan tugas utama :

- a. mutu barang pasokan.
- b. Harga.

c. Apakah ada barang yang terlarang untuk diperdagangkan misalnya

Rel Kereta Api.

Dapur Pengecoran Logam

Tungku Tungki : Teknologi lama, sekarang sudah tidak digunakan karena kapasitas produksi rendah dan hasilnya rendah, hasil penuangan antara yang pertama dengan yang seterusnya komposisi barang tidak sama.

Tungku Cupola : Teknologi lebih baik, kapasitas produksi besar, per jam 2 (dua) ton, per hari minimal 15 ton.
Hasil produksi antara penuangan yang pertama dan penuangan yang terakhir relative komposisi sama.

Bahan bakar batu bara (Cock).

Dapur Induksi : bahan bakar menggunakan tenaga listrik, kapasitas produksi saat ini baru 300 kg/jam.
Digunakan untuk memproduksi alat-alat yang lebih canggih, yang mutu produksi terkontrol, sesuai dengan

komposisi yang dikehendaki. Misalnya

komponen-komponen automotif dsb.

Masa depan digunakan dapur induksi

dengan kapasitas produksi yang besar.

Hasil produksi : sudah mendapat standart mutu internasional

Junlah karyawan : 180 orang yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, tergantung dari jenis pekerjaan.

Sistem penggajian : - harian (bekerja tanpa target)
- borongan
- bulanan

Jaminan kesehatan dari Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja).

Jaminan Lain : - hadiah lebaran.
- bonus (jasa produksi)

Produksi dan Distribusi : berdasarkan pesanan dari rekanan.
Misalnya PT. Bukaka Teknik Utama, PT.
United Tractor Pandu Engineering, PT.
Sanyo Industries Indonesia dll.

Bank : Bank BCA
(di Klaten tidak ada Bank Syariah).

PT. Baja Kurnia, tidak memproduksi barang yang langsung dijual ke pasar, yang diproduksi adalah komponen dari alat-alat berat, misalnya Balance

Weight Forklift pesanan dari PT. United Tractor Pandu Engineering, satu biji saja beratnya sudah 1 ½ (satu setengah) ton, yang lain misalnya Counter Weight Pumping Oil, pesanan dari PT. Bukaka Teknik Utama, suatu perusahaan pengeboran minyak, satu biji beratnya 1 (satu) ton.

Untuk mengembangkan usaha dengan meningkatkan produksi, dengan menjaga standart mutu. Untuk saat ini, dengan Tungku Cupola kapasitas produksi masih mampu untuk dikembangkan. Untuk meningkatkan mutu produksi, dibutuhkan memperbesar kapasitas peleburan **dapur Induksi**, tetapi biaya investasinya cukup tinggi.

Saat ini, PT. Baja Kurnia adalah nasabah dari Bank BCA dan Bank BNI. untuk keperluan : Giro, Transfer, tabungan dan lain-lain.

Sebagai muslim cenderung untuk menggunakan Bank Syariah, tetapi karena di Klaten tidak ada Bank Syariah, terpaksa berhubungan dengan Bank yang ada.

e. Koperasi Industri Batur Jaya (KIBJ) .

Pada saat ini Koperasi Industri Batur Jaya dipimpin oleh DRS. H. ANAS YUSUF dan berlokasi di Dukuh Batur, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Koperasi Industri Batur Jaya didirikan pada tanggal 23 Juli 1976 dan bergerak dibidang pengecoran logam dan pada saat ini mempunyai anggota sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pengusaha pengecoran logam dengan kemampuan produksi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari produksi nasional logam cor (besi tuang) sebelum ada Koperasi Industri Batur Jaya, sebetulnya sudah ada Koperasi Cor Logam

“Prasojo” yang didirikan pada tahun 1962 dan Koperasi G.PB.T, tetapi kedua organisasi ini, pada saat pemerintah merintis lembaga sebagai wadah yang fungsinya untuk mengkoordinasi para pengusaha cor logam, sudah lama tidak menampakkan kegiatannya pada tahun 1973 Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah menetapkan Batur sebagai sentra industri pengecoran logam untuk menumbuhkembangkan industri pengecoran logam, pemerintah bermaksud memberi bantuan berupa mesin-mesin dan bahan baku yang dibutuhkan dan untuk itu diperlukan suatu wadah, suatu organisasi yang tepat untuk itu, maka atas dasar tersebut dibentuklah Koperasi Industri Batur Jaya. Sebagai tindak lanjut pemerintah memberi bantuan yang diwujudkan berupa mesin-mesin antara lain :

Mesin Bubut.	-	Mesin Frais.
Mesin Bor.	-	Generator Set.
Mesin Asah.	-	Mesin Gerinda.
Mesin Las Listrik	-	Mesin Las Karbit.
Mesin Semprot Pasir	-	Mesin Bor Cortel

Selain daripada itu dibawah Sub.Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BIPIK) di lingkungan Dir. Jend.Industri Logam dan Mesin atau disingkat dengan Sub.Pro. BIPIK/ILN Departemen Perindustrian R.I, selain daripada itu secara berkala dikirim ekspor dari Pusat Pengembangan Industri Pengerjaan Logam yang saat ini menjadi Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin (MIDC) Bandung.

Dengan adanya bantuan berupa mesin-mesin dan bahan bakar yang dibutuhkan pada Unit Permesinan, maka pengusaha pengecoran logam yang saat itu masih memproduksi bahan setengah jadi yang untuk memproses jadi barang jadi yang siap dipasarkan masih membutuhkan pemrosesan diluar daerah Batur, sekarang dapat dilakukan di Batur. Agar bantuan pemerintah dapat dinikmati secara merata oleh para pengusaha industri cor logam, maka mesin-mesin tersebut dibawah pengelolaan Koperasi Industri Batur Jaya. Pada tahapan selanjutnya adalah mengusahakan bahan baku bagi anggota sehingga harga dan kualitas barang bahan baku tidak dipermainkan oleh pedagang jenis bahan baku adalah besi rongsokan, besi cor (*scrap iron*), besi murni (*pig iron*) dan *Cokes*. Ex. Import bekerja sama dengan importer dan PT. Krakatau Steel. Produk yang dihasilkan adalah barang teknologi, barang berupa alat rumah tangga dan barang seni. Untuk pemasaran ada 2 (dua) jalur yang ditempuh yaitu pasar pemerintah dan pasar swasta.

Pemasaran pada sektor pemerintah meliputi :

1. Pengadaan sambungan pipa air untuk Proyek Air Bersih Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
2. Pengadaan Sumur Pompa Tangan Dangkal dan Sumur Pompa Tangan Dalam untuk Proyek Inpres Kesehatan – Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

3. Pengadaan Pompa Pasir G.8 dan G.12 untuk PT. Tambang Timah (persero).
4. Pengadaan Tiang Lampu penerangan jalan antik untuk Proyek kawasan Malioboro Yogyakarta.

Pemasaran pada sektor swasta meliputi :

1. Langsung kepada pedagang besar untuk diteruskan ke pengecer.
2. dapat juga langsung ke toko-toko pengecer atas dasar pesanan.
3. dilakukan melalui pengusaha yang memiliki badan hukum (perseroan terbatas), juga kepada kontraktor-kontraktor atau toko-toko yang mendapat order dari pemerintah sebagai Sub-kontraktor.

Agar produk-produk yang dihasilkan tidak mengalami over produksi, maka harus diciptakan pasar yang seluas-luasnya. Berbicara masalah pemasaran, kita akan mengklasifikasikan saluran distribusi dan daerah pemasaran.

Jalur-jalur order yang telah dilaksanakan :

1. melalui Koperasi Industri Batur Jaya.
2. Langsung kepada pengusaha/anggota.
 - 1.1 Apabila order langsung kepada Koperasi, maka terlebih dahulu anggota diundang ke Kantor Koperasi untuk dimusyawarahkan, baik pengecorannya, pelaksanaannya, standardisasi serta waktu pengiriman (*delivery time*). Dalam hal ini, Koperasi membeli barang setengah jadi (*as cast*) dari anggota selanjutnya anggota menyerahkan kepada Koperasi untuk difinishing. Apabila barang

selesai difinishing, kemudian diteruskan kepada pemesan atau konsumen. Untuk penentuan harga serta kontrak, dilaksanakan oleh Koperasi.

1.2 Order Langsung kepada anggota.

Dalam hal ini, harga serta kontrak dilakukan oleh anggota sendiri, kemudian difiniskan kepada Unit Permesinan Koperasi dengan imbalan yaitu anggota membayar ongkos finishing atas benda kerja yang difiniskan di Koperasi "Batur Jaya".

Perlu peningkatan teknologi dan mutu.

Upaya mengadakan peningkatan teknologi dan mutu dengan cara :

1. Mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) teknologi pengecoran.
2. Bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin (BBILM) Bandung, sebagai supervise teknik atas kontrak yang diterima.
3. Mengadakan studi banding ke perusahaan besar dan menengah.
4. Mengadakan kunjungan ke perusahaan-perusahaan diluar negeri (Jepang, Muangthai dan Korea Selatan).
5. Mengikuti seminar penerapan Standardisasi Industri Indonesia.
6. Mengadakan hubungan keterkaitan dengan perusahaan besar dan menengah.
7. Membentuk kelompok diskusi tentang ilmu keusahawanan yang diberi nama Kerabat Cinta Prestasi.

Anggota KIBJ (Koperasi Industri Batur Jaya) cukup banyak, agar hasil produksi setiap anggota mempunyai standart mutu yang sama, maka kepada setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan uji mutu produksi di Laboratorium Logam Ceper.

Pada tahun 2002 ini ada kontrak kerja dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia untuk membuat **Rem Block**. Dalam perjanjian tersebut salah satu clausula adalah tidak boleh menggunakan bahan baku bekas dari PT. KAI, kecuali ada imbal-beli yang sah, dalam hal ini ada S.K Dirjen. Hal ini adalah untuk menghindari daur ulang memblock yang tidak resmi. (mungkin hasil curian). Agar KIBJ dapat mengontrol hasil produksi setiap anggota, maka kepada setiap anggota diberi nomor kode pada cetakan masing-masing, sehingga kalau ada klaim karena produksi yang tidak memenuhi standart mutu, dapat segera diketahui anggota mana yang memproduksi tidak memenuhi standart mutu.

Untuk melindungi anggota dari paokan barang-barang terlarang, maka anggota boleh membeli barang pasokan sebagai bahan baku hanya dari pedagang lokal karena mudah memantaunya, tetapi kalau dari luar daerah akan ditangani oleh K.I.B.J.

Sumber Bahan Baku yang berupa :

Besi cor berasal dari ex dalam negeri yakni PT.Krakatau Steel dan para pedagang/supplier, besi murni berasal dari ex import yakni Australia, Jepang, Taiwan dan ex Lampung yakni Lembaga Metallurgi Nasional. Cokes berasal dari ex import yakni Australia, Jepang dan Taiwan.

Pelaksanaan pengadaan besi murni dan cokes ex import bekerjasama dengan importer dan besi murni ex Lampung bekerjasama dengan PT.Krakatau Steel.

Pelayanan Kepada Anggota

1. pengadaan bahan baku berupa besi cor, cokes dan pig iron.
2. pelayanan jasa mesin.
3. pemasaran produk-produk yang dihasilkan para anggota.
4. pembinaan administrasi perusahaan yang baik meliputi administrasi permohonan kredit kepada Bank dan cara pengisian SPT Pajak.

Kesejahteraan Karyawan

Disamping karyawan menerima gaji tetap tiap bulan atau tiap minggunya, perusahaan juga memberikan sarana-sarana lain sebagai upaya peningkatan kesejahteraan karyawan antara lain :

1. memberikan bonus kepada semua karyawan bilamana kontrak telah berakhir.
2. biaya pengobatan dan opname di Rumah Sakit bila karyawan sakit.
3. cuti besar bagi karyawan wanita yang melahirkan.
4. cuti pendek bagi karyawan menjelang dan setelah lebaran kurang lebih selama 7 hari.
5. cuti pendek bagi karyawan yang akan melaksanakan perkawinan.
6. memberikan pakaian kerja setiap tahun satu kali.

7. mengadakan karyawisata sebagai sarana penyegaran dalam bekerja.
8. memberikan uang duka kepada karyawan yang tertimpa musibah (kematian dan kecelakaan).
9. mengansurakan para karyawan pada asuransi tenaga kerja (Astek).

Jumlah karyawan Koperasi Industri Batur Jaya yang diasuransikan pada perusahaan Astek sejumlah 49 orang.

Kesejahteraan anggota

Pada saat ini pengusaha pengecoran logam anggota K.I.B.J ada yang masih produktif aktif dan ada juga yang sudah tidak lagi memproduksi. Bagi yang memproduksi aktif ada order yang melalui K.I.B.J dan ada juga yang mendapat pesanan langsung dari langganannya masing-masing untuk anggota yang sudah tidak memproduksi, dari K.I.B.J tetap mendapatkan bagian order sekalipun yang mengerjakan adalah anggota yang lain, dengan demikian dia masih menerima ongkos garap.

K.I.B.J dan Kepedulian Sosial.

Setiap tahun K.I.B.J pada bulan Romadhon mengeluarkan paket lebaran, yang tiap paket berisi beras, gula, teh dan roti untuk para **dhuafa**, dengan bekerjasama dengan Kepala Desa dan Kepala Dukuh disekitar lokasi K.I.B.J yang untuk tahun 2002 ini mengeluarkan 400 (empat ratus) paket.

Juga mengeluarkan bea-siswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan bagi karyawan mulai tahun 2001 ada hadiah berupa pembayaran ONH dengan cara diundi secara terbuka dan jujur.

f. Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

BMT adalah Lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 21 (dua puluh satu) diantaranya telah ada B.M.Tnya. BMT-BMT tersebut berdiri mandiri yang terlepas dari satu kepada yang lain. Ada persatuan BMT-BMT pada tingkat Kabupaten yang berupa perkumpulan-perkumpulan yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan bersama dan untuk kemajuan bersama. Selain dari pada itu juga berfungsi sebagai Dewan Pengawas. Bentuk hukum dari BMT adalah **Koperasi**. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu pasal 21 ayat (1) berbunyi :

Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas.
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

BMT menempatkan diri sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, karena :

1. BMT tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. dalam melaksanakan kegiatannya baik pada waktu menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan BMT dalam menghimpun dana masyarakat berupa antara lain :

- a. simpanan mudharabah;
- b. simpanan wardi'ah berjangka;
- c. tabungan haji;
- d. tabungan Qurban;
- e. deposito;

Kegiatan BMT untuk pembiayaan antara lain :

- 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah;
- 2. berdasarkan prinsip musyarakah;
- 3. berdasarkan jual-beli; dll

BMT adalah suatu Koperasi dan sebagai Koperasi harus mempunyai anggota. Disini terlebih dahulu harus dipisahkan antara mereka yang menyimpan dana di BMT dan mereka yang menjadi anggota BMT. Untuk mereka yang menyimpan dana, tidak ada ketentuan atau batasan-batasan tertentu, ini berarti siapa saja bisa menjadi anggota. Dari pelajar yang belum dewasa, sampai orang dewasa, sebagai perorangan atau pedagang. Untuk menjadi anggota, disyaratkan sudah dewasa. Hal ini karena adanya perbedaan hak yaitu penyimpanan dana tidak mempunyai hak untuk mendapatkan atau meminjam dana dari BMT sedangkan yang menjadi anggota mempunyai segala hak yang dimiliki anggota antara lain hak untuk mendapat dana pembiayaan (kredit), hak suara dll.

BMT merupakan koperasi simpan pinjam dan karenanya untuk mendapatkan dana pembiayaan dari BMT syaratnya harus menjadi anggota

terlebih dahulu. Syarat untuk menjadi anggota harus mengisi terlebih dahulu formulir yang telah disediakan dan dalam formulir dicatat secara lengkap identitas pemohon dan identitas ahli waris.

Untuk mengajukan dana pembiayaan (kredit) harus mengisi formulir yang telah disediakan yang memuat identitas secara lengkap pemohon, identitas secara lengkap ahli waris dan jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian, periode angsuran dan jaminan pembiayaan.

Selain mengisi formulir permohonan yang telah disediakan juga harus melampiri **Surat Rekomendasi** yang memuat :

- 1) Pernyataan pemohon yang berisi bahwa pemohon mempunyai usaha dagang, dapat dipercaya dan jujur, dan dana pembiayaan digunakan untuk usaha-dagang.
- 2) Pernyataan dari Ketua RT/RW dan
- 3) Pernyataan dari Ketua Pengajian.

Perjanjian “Kredit” dengan plafond maximal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibuat dengan akta dibawah tangan, dengan plafond sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perjanjian dibuat dibawah tangan yang dilegalisir Notaris dan dengan plafond diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibuat dengan akta Notaris.

Agunan dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan tidak ada kredit tanpa jaminan. Jangka waktu kredit umumnya jangka pendek 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan dan maximum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Bentuk hukum jaminan yang digunakan

adalah dengan akta : **Jual-beli dengan hak untuk membeli kembali** baik untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Bunga Bank (bagi hasil) yang diterapkan dengan kredit sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), diasumsikan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi hasil 70 % (tujuh puluh persen) untuk pedagang dan 30% (tiga puluh persen) untuk BMT per bulan atau kalau dihitung dari pokok hutang sebesar 3 % (tiga persen) per bulan.

g. Bank Konvensional

yang dimaksud dengan Bank Konvensional adalah Bank yang didalam melaksanakan kegiatannya tidak melaksanakan prinsip syariah. Di Kabupaten Klaten, Bank Konvensional dengan kedudukan sebagai Bank Umum milik pemerintah antara lain :

- a. PT. Bank BRI;
- b. PT. Bank BNI;
- c. PT. Bank Mandiri;
- d. PT. Bank Tabungan Negara;
- e. PT. Bank BPD Jawa Tengah;
- f. PT. Perusahaan Daerah Bank Pasar;
- g. PT. Bank Niaga.

Sedangkan yang milik swasta antara lain :

- a. PT. Bank BCA.
- b. PT. Bank Danamon;
- c. PT. Bank Lippo;

d. PT. Bank Bumi Artha.

e. PT. Bank Haga;

Selain daripada itu yang berkedudukan sebagai Bank Perkreditan Rakyat ada beberapa diantaranya :

a. BPR Danagung Sakti;

b. BPR BKK;

c. KBPR Ceper;

d. BPR Nusumma Ceper.

Diantara Bank Umum yang mempunyai jaringan yang luas adalah PT. Bank BRI, yang mempunyai Kantor Cabang dan ditiap-tiap kecamatan ada BRI Unit. Pada saat ini Kantor Cabang BRI dipimpin oleh Ir. H.Wahyu Winarno.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BRI meliputi antara lain :

1. menghimpun dana dari masyarakat;
2. pemberian kredit;
3. pemindahan uang (transfer);
4. penerbitan surat pengakuan hutang;
5. penerimaan pembayaran tagihan surat berharga;
6. kartu kredit dll

Penghimpunan dana dari masyarakat dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan

lembaga keuangan baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat berupa :

- a. Tabungan Brimatama (untuk di Unit Tabungan Simpedes);
- b. Giro;
- c. Deposito berjangka;
- d. Sertifikat deposito;
- e. Tabungan haji dll

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Saat ini di BRI ada ketentuan bahwa :

- a. Tabungan hanya dapat diterima dalam mata uang Rupiah;
- b. Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu atau pada jam kerja dan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi Kantor Bank tersebut dan dapat juga dengan menggunakan ATM.
- c. Penarikan tidak boleh melebihi saldo tabungan, dalam hal saldo tabungan lebih kecil dari saldo tabungan minimal, maka apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada lagi tambahan tabungan maka tabungan tersebut dihapus dari daftar pemilik tabungan. Hal ini berbeda dengan tabungan deposito berjangka yang hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Untuk tabungan Haji, pada saat ini ditentukan sebagai berikut :

1. tabungan haji dibuka dengan setoran awal sebesar Rp. 5.000.000,0 (lima juta rupiah).
2. tabungan haji otomatis ditutup pada saat oleh penabung digunakan untuk membayar Ongkos Naik Haji atau ditarik kembali yang berarti batal digunakan untuk membayar ONH.

Pemberian Kredit

Dana yang diterima dari masyarakat baik berupa tabungan, deposito berjangka, giro dan lain-lain, akan disalurkan kembali kepada masyarakat dengan bentuk pemberian kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena merupakan pendapatan terbesar dari sektor kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Bank memberi kredit kepada nasabah tidak sekedar masyarakat untuk masyarakat, tetapi penuh perhitungan karena banyak hal yang terkait antara lain :

- a. sumber dana;
- b. alokasi dana;
- c. organisasi dan manajemen kredit;
- d. kebijakan perkreditan;
- e. dokumentasi dan administrasi kredit;
- f. pengawasan kredit dan yang sangat diperhitungkan adalah kemampuan nasabah penerima kredit untuk membayar kembali kreditnya;

g. dan penyelesaian kredit macet.

Unsur-unsur pemberian kredit

1. **Kepercayaan** : pada dasarnya kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atas dasar kepercayaan bahwa nasabah akan menggunakan kredit sesuai yang telah disepakati dan keyakinan bahwa kredit yang telah disalurkan dapat diterima kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
2. **Jangka waktu** : adalah jarak antara saat kredit dicairkan dan saat penentuan waktu untuk pelunasan, disini yang perlu diperhitungkan adalah nilai uang pada saat penentuan pelunasan karena adanya faktor inflasi dan sebagainya.
3. **Tingkat resiko** yang akan dihadapi karena adanya jarak waktu, makin panjang jarak waktu, makin tinggi faktor resiko, sebab makin banyak hal-hal yang sulit untuk diperhitungkan.
4. **Obyek kredit** yang diberikan pada umumnya berupa uang atau barang, tetapi pada masa sekarang ini lebih mudah dengan menggunakan uang.

Macam-macam Kredit

1. Pada pokoknya ada 2 (dua) macam kredit yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Yang dimaksud dengan kredit konsumtif adalah kredit yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi si pemohon kredit, misalnya kredit untuk membeli sepeda motor, mobil atau rumah. Kredit konsumtif pada saat ini hanya diperuntukkan bagi karyawan atau

pegawai negeri dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan, karena itu kredit ini tingkat bunga relative mudah dan jarak waktu cukup panjang sehingga tidak membebani biaya hidup karyawan.

Kredit Produktif ada 2 (dua) macam yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi.

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk modal kerja baik untuk perdagangan, pertanian, industri, jasa dan lain-lain.

Kredit modal kerja ada 2 (dua) macam yaitu kredit modal kerja musiman : yaitu kredit yang diberikan untuk modal kerja yang berkaitan dengan musim, misalnya pada tanam tembakau. Kredit ini digunakan untuk pembelian bibit tembakau, pupuk dan ongkos garap dan kredit akan dibayar lunas pada waktu panen. Kredit modal kerja musiman juga dimanfaatkan oleh pedagang yang biasanya menjelang hari besar (hari raya, tahun baru) membutuhkan stock barang yang cukup banyak. Industri kecil pada saat-saat tertentu juga membutuhkan modal tambahan. Konveksi pakaian jadi, pada Hari Raya, Tahun Baru atau pada saat Tahun Ajaran Baru, membutuhkan stock bahan yang cukup banyak. Kredit modal kerja musiman sesuai dengan namanya digunakan untuk jangka pendek yaitu antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.

Kredit modal kerja sesuai dengan namanya adalah untuk menambah modal kerja, kredit jenis ini umumnya jangka waktu lebih panjang

daripada KMKM, bentuknya bisa berupa Kredit Umum Berjangka dan bisa Rekening Koran.

Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk investasi, misalnya untuk pembangunan tempat usaha, pabrik, pembelian mesin-mesin, sarana angkutan, kredit investasi hanya boleh dicairkan dalam bentuk berjangka. Untuk industri-industri kecil yang menurut ketentuan bisa dicairkan maksimum Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah bentuk kredit investasi kecil.

Dari macam-macam kredit tersebut, bentuk kredit ada beberapa macam antara lain : kredit berjangka : kredit ini untuk pelunasannya untuk jangka waktu tertentu (misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya), plafond kredit dan jangka waktu tergantung dari kesepakatan antara bank dan debitur. Pencairan sekaligus pada saat akad kredit berlangsung, sedangkan angsuran pokok tergantung dari kesepakatan, bisa tiap bulan, atau setiap tiga bulan, sedangkan bunga harus dibayar setiap bulan.

Rekening Koran adalah bentuk kredit dengan jangka waktu tertentu (misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya).

Sedangkan plafon kredit jumlahnya tergantung dari kesepakatan antara bank dan debitur.

Pencairan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau Giro Bilyet sebagai penarikan, dengan ketentuan penarikan tidak boleh melebihi batas plafond kredit yang telah disepakati karena

debitur dapat mencairkan dengan cek, maka debitur otomatis sebagai pemegang rekening giro. Bunga dihitung secara harian sesuai dengan yang dipergunakan. Bunga bank baik untuk kredit konsumtif maupun untuk kredit produktif berkisar antara 18 % sampai dengan 24 % pertahun, atau bunga bank sekitar 1,5 % perbulan sampai 2 % perbulan.

h. Pendapat Ulama.

Responden : K.H. Drs. Muchlis Hudaf.

Jabatan : a. Wakil Ketua M.U.I Klaten.

b. Pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo, Ceper.

Atas pertanyaan : *"mungkinkah hukum perdata nasional khususnya hukum mengenai perseroan terbatas digabungkan dengan syariat islam?"*

Jawabnya dengan mantap : Mungkin.

Landasan dan dasar jawaban yang diberikan .

Ajaran islam adalah ajaran yang universal, karena itu bersifat lentur, luwes dan dapat bertahan sepanjang jaman. Ini bukan berarti situasi dan kondisi pada zaman Rosul dan zaman sekarang sama keadaannya, bahkan situasi dan keadaannya jauh berbeda. Apakah ini berarti hukum islam tidak mempunyai kepastian hukum karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi ? Allah memberi tuntunan dan ketetapan melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rosul, yang didalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rosul (Hadist) ada hal-hal yang jelas untuk difahami dan mudah untuk diamalkan, ada yang berupa ayat-ayat yang susunan kalimatnya singkat tetapi luas pengertiannya,

sedangkan didalam lafaz yang sedikit dan singkat saja terhimpun sekian banyak makna. Atas dasar Al-Qur'an dan Hadits, para fuqoha (ahli hukum) yang diakui kepakarannya seperti *Imam Syafii*, *Imam Hambali*, *Imam Maliki* dan *Imam Hanafi*, merumuskan menjadi kaidah-kaidah hukum, yang diikuti oleh para pengikutnya.

Suatu Contoh :

- a. Anak angkat tidak menyebabkan putusnya hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya.
- b. Anak angkat tidak berhak mewaris dari orangtua angkatnya.

Adakah tidak adil dari pandangan masyarakat bahwa orangtua angkat yang meninggal dunia tanpa keturunan, harta warisannya diwaris oleh saudara-saudaranya yang tidak pernah ngurusi, sedangkan si anak angkat yang sejak kecil dirawat orangtua angkatnya, sesudah dewasa merawat orangtua angkatnya tidak mendapatkan apa-apa.

Atas dasar itu Godi (Hakim) dan para fuqoha merumuskan hukum "Wasiat wajib" yaitu suatu ketentuan seakan-akan orangtua telah memberi wasiat bahwa anak angkatnya berhak menerima warisan dan karena tidak sempat maka kewajiban membuat wasiat diambil alih oleh Hakim.

Contoh Lain :

Adalah nash Al-Qur'an :

Jual-beli halal Riba diharamkan.

Ketentuan ini berlaku sepanjang zaman, tidak terikat oleh ruang dan waktu, masalahnya sekarang jual-beli yang bagaimana yang dihalalkan, apakah jual-beli dengan hak untuk membeli kembali itu juga halal ? sedangkan jual-beli dengan hak untuk membeli kembali pada hakekatnya adalah utang-piutang, demikian juga masalah riba, riba yang bagaimana yang diharamkan ?

Hal-hal inilah yang perlu dirumuskan oleh para fuqoha. Jadi sekali saya tegaskan bahwa tuntunan dan ketentuan Allah melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rosul itu berlaku sepanjang jaman karena menyangkut hal-hal pokok, menyangkut asas-asasnya, sedangkan yang bisa kembali adalah perumusan hukum oleh para fuqoha.

Hukum perdata termasuk hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dalam hal ini ada 3 (tiga) hadits yang sekiranya dapat dijadikan pegangan.

- a. dalam sebuah hadits yang berasal dari Mu'ade bin Jabal disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW akan mengutusnyanya ke Yaman beliau bertanya :

“Apa yang akan dilakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara untuk diputusi?” Mu'ade menjawab “Saya akan memutus atas dasar ketentuan dalam Kitab Allah “Al-Qur'an
 “ Nabi bertanya pula: “Jika dalam Kitab Allah tidak kau jumpai ketentuannya bagaimana ?” Mu'ade menjawab :
 “Dengan Sunah Rosulullah.” Nabi bertanya lagi : “Jika dalam

Sunah Rosullullah pun tidak kau jumpai ketentuannya bagaimana ?” Mu’ade menjawab : “Saya akan berijtihad menggunakan pikiranku dan tidak akan saya biarkan perkara itu tanpa putusan apapun.” Mu’ade mengatakan : “Beliau (Nabi) kemudian menepuk dadaku dan mengatakan, “Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufikNya kepada utusan Rosulullah dengan hal yang melegakan hati Rosulullah.” (HR Al-Baihaqi).

b. Hadits Nabi Saw yang berbunyi :

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”

c. “Tak boleh melaratkan dan tak boleh dimelaratkan.”

(HR. Ibnu Majah).

Didalam melaksanakan muamalah, yang berkaitan hubungan antara manusia dengan manusia, atau melaksanakan hukum perdata islam, berpedoman paling tidak pada 3 (tiga) hadits yang telah disebutkan diatas, juga berpegang pada prinsip :

Seorang muslim tidak boleh memudharatkan dirinya dan orang lain, tidak boleh memudharatkan dan saling memudharatkan dalam islam.

Adapun prinsip Hukum Muamalat adalah :

1. pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rosul.

2. muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

3. muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

2. Islam adalah ajaran fitrah, ajaran kebersihan.

Inti dari ajaran fitrah adalah keadilan dan kebenaran. Hukum perdata nasional dibuat oleh orang Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi dan sekalipun orang Belanda, mereka adalah manusia yang mempunyai hati nurani sebagai fitrah manusia. Dan karena itu pada waktu membuat perumusan ketentuan-ketentuan hukum perdata dilandasi oleh fitrahnya sebagai manusia, dilandasi oleh hati nuraninya dan tidak ada kepentingan pribadi yang digunakan sebagai pertimbangan, maka ketentuan-ketentuan tersebut akan diterima oleh manusia.

Ketentuan peraturan perundang-undangan buatan manusia tadi terikat oleh ruang dan waktu, karena itu selalu ada perbaikan-perbaikan untuk menyesuaikan dengan ruang dan waktu. Hukum perdata islam (muamalah) atau lebih tepatnya syariah islam ibarat sungai yang besar yang mengalir. sungai-sungai kecil (hukum perdata nasional) yang seterusnya mengalir sawah-ladang yang memberi manfaat bagi manusia.

3. Sekarang masalahnya untuk menampung kegiatan manusia Indonesia dalam bermuamalah, apakah wadahnya adalah hukum perdata islam (muamalah islam) ataupun hukum perdata nasional sebagai wadah, terserah anda untuk merenungkannya.

i. Pendapat Hakim Agama.

Nara Sumber : K.H Drs. Achmad Muzni.

Jabatan : Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta

Atas pertanyaan : *"Mungkinkah hukum perdata nasional khususnya hukum mengenai perseroan terbatas digabungkan dengan syariah islam." ?*

Untuk menjawab pertanyaan Saudara, perlu difahami lebih dahulu apa itu syariah islam. Kalimat "Syariah" dalam bahasa arab digunakan dalam dua makna yaitu bermakna "jalan yang lurus" dan bermakna "Sumber air minum". Firman Allah dalam surat Al-Jaatsiyah 45 (8) yang artinya :

"Kemudian Kami Jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

Dalam ayat ini kata syariat diartikan sebagai jalan yang lurus. Menurut telaan para ulama Fuqoha, memakai syariah sebagai "Hukum-hukum Allah untuk hamba-hambaNya." Dimana hukum tersebut diturunkan lewat RosulNya.

Mengapa hukum-hukum tersebut dinamai syariah, karena lurusnya dan karena sifat konstannya, tidak bergeming dari pengaruh zaman dan tidak tergantikan oleh apapun yang ingin merubah maksudnya.

Dalam ajaran islam yang tidak mungkin berubah dan bersifat abadi hanyalah kaidah-kaidah dasar syariah dan berbagai fondasi dasar. Dalam hal-hal yang bersifat kondensial (misalnya menyangkut teknis), islam tetap mengacu dan menunjuk sumber asalnya, namun demikian dilibatkan pada peran akal, peran ini yang kemudian disebut menurut terminologi fikih dengan ijihad. Agar praktek ijihad tidak keluar dari rel islam, maka untuk itu disyaratkan banyak hal dan berbagai kriteria kelayakan, agar si mustahid (subyek ijihad) tidak menyimpang.

Manusia didalam menjalani hidupnya ditentukan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah melalui Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Nabi Muhammad SAW (Sunnah Rosul) agar manusia tidak tersesat. Didalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan dasar-dasar akidah, kaidah-kaidah syariah dan hukum, serta asas perilaku menuntun mereka ke jalan yang paling lurus tentang sesuatu masalah, terkadang menyerahkan perincian-perinciannya kepada Sunnah (Hadits) Nabi dan terkadang menyerahkannya kepada akal orang-orang muslim.

Didalam Al-Qur'an maupun pada Sunnah Rosul, manusia diberi petunjuk, bimbingan berupa perintah atau larangan, berupa prinsip-prinsip saja, asas-asas saja dan agar umat manusia bisa memahami, mentaati dan mengamalkannya, maka prinsip-prinsip

didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosul, perlu diterangkan dan dirumuskan sebagai kaidah-kaidah hukum oleh para ulama dan para fuqoha. Pada garis besarnya apa yang diterangkan dan dirumuskan oleh para ulama dan fuqoha meliputi 2 (dua) bidang yaitu :

1. apapun yang mengatur Allah.

Pada bidang ini, Allah telah mengatur melalui Kitab Allah, melalui Nabi Muhammad saw, bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, bidang ini meliputi **Akidah, Ibadah dan Akhlak** yang kesemuanya mengacu pada ukhrowi.

Akidah ajaran tentang kepercayaan, tentang keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Ajaran ini dikenal dengan ajaran tentang masalah **iman** dan **tauhid**. Sebagai contoh : didalam al-Qur'an hanya dikatakan/disebutkan :

“Katakanlah : Allah Maha Esa” (Surat Al-Ikhlash).

Hal ini dijabarkan oleh para ulama bagaimana umat manusia menyikapi keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dengan memberi batasan-batasan, umat manusia dilarang untuk mempersekutukan sesuatu dengan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah, baik kekuasaanNya maupun sifatNya.

Sebagai contoh didalam kehidupan sehari-hari :

Di Parangtritis, pantai selatan Jawa tengah, ada orang yang menjual degan (kelapa muda), ketika degan dibeli dengan maksud untuk diminum airnya, pedagang melarangnya dan

mengatakan : degan dibelah, airnya ditapungkan (dicampurkan) dengan segoro kidul, ketika ditanya : untuk apa? Jawabnya : biar selamat.

Kalau kita percaya apa yang dikatakan penjual degan dengan melakukan apa yang dikatakannya.

Ini berarti telah bergeser iman kita, telah berganti keyakinan kita bahwa keselamatan kita ditentukan oleh Nyai Segoro Kidul. Islam mengajarkan, hidup dan mati, keselamatan adalah karena Allah, bukan oleh Nyai Segoro Kidul.

Ibadah : adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana tata caranya manusia menyembah kepada Allah, mulai dari ajaran tentang wudhu, shalat, puasa, zakat dan naik Haji dan sebagainya.

Akhlak : ajaran yang menyangkut bagaimana manusia agar bisa mempunyai akhlak yang mulia.

2. sesuatu ditetapkan Allah .

untuk kebaikan dan kepentingan manusia itu sendiri, Allah menetapkan sesuatu, melalui Al-Qur'an. Contoh :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai 1), darah 2), daging babi 3), daging yang disembelih atas nama selain Allah 4), yang dicabik 5), yang dipukul 6), yang jatuh 7), yang ditanduk 8), yang dimakan binatang buas 9), kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan yang disembelih

untuk berhala 10). Diharamkan pula bagimu mengundi nasib dengan anak panah, karena itu sebagai kefasikan.

Al-Maidah (5) : 3.

Contoh diatas adalah untuk kepentingan dan kebaikan perorangan, dan ada juga Allah menetapkan hubungan antar manusia. Contoh :

Dihalalkan jual-beli,

Diharamkan riba.

Apa yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur'an hanya pokok-pokoknya saja, hanya prinsip-prinsipnya saja dan bersumberkan kepada Al-Qur'an, para fukoha, para imam madzhab merumuskan menjadi hukum (fikih) dan materinya adalah hukum syara' atau disebut juga muamalah: (Hukum Perdata Islam).

Muamalah adalah bidang yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Muamalah meliputi bidang yang sangat luas, dari anak yang masih didalam kandungan yang sudah mempunyai hak kalau kepentingannya memerlukan, lahir, kawin, mati dan bekerja untuk mencari nafkah, bidang ini menjurus kearah kepentingan duniawi.

Allah telah memberi penetapan kepada manusia melalui al-Qur'an dan Sunah Rosul, bagaimana manusia harus menjalani hidup didunia. Untuk hidup perlu makan, maka Allah telah menyediakan dunia serta isinya untuk kepentingan manusia. Untuk hidup sehat perlu makanan sehat, maka diberi petunjuk makanan yang diharamkan.

Hukum yang dirumuskan para fukoha dalam berlangsungnya waktu seringkali ditafsirkan untuk kepentingan pribadi (perorangan).

Contoh : Perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah, tetapi diijinkan.

Atas dasar ini, untuk kesenangan pribadi maka terjadilah kawin cerai-kawin cerai. Melihat kenyataan ini Pemerintah berdasarkan fikih dari Imam Madzhab, menetapkan suatu undang-undang. Contohnya Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang yang dibuat pemerintah ini digolongkan sebagai **Siyasi**.

3. pemisahan antara muamalah dan Ibadah, tidak bisa dilihat sebagai pemisahan antara hitam dan putih. Setiap muslim didalam menjalani hidup dunia dengan tujuan untuk mencapai sorga dan untuk mencapai itu segala perbuatannya, segala aktivitasnya diniati untuk ibadah. Jadi bagi seorang muslim didalam melaksanakan muamalah terkandung didalamnya niat untuk beribadah.

Semua ketentuan-ketentuan yang meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah itulah yang disebut Syariat (Syariat Islam)

Dengan demikian untuk menjawab pertanyaan Saudara :

“Mungkinkah hukum perdata nasional, khususnya hukum mengenai perseroan terbatas digabungkan dengan syariah islam ?”

Jawabnya : Mungkin dan Bisa.

B. Undang-Undang No.1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas mampu menampung 2 (dua) sistem hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas, diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan berlaku efektif mulai tanggal 7 Maret 1996. dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan atas dasar undang-undang yang lama dan telah mendapat pengesahan, harus sudah disesuaikan dengan undang-undang ini, dan ini berarti sejak tanggal 7 Maret 1998, semua perseroan sudah disesuaikan dengan undang-undang ini. Sementara itu, dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1999, badan hukum yang didirikan berdasarkan Ordonansi Maatschappij op Aandeelen, Staaatsblad 1939, wajib mengajukan permohonan pengesahan atas Akta Pendirian dan Anggaran Dasar kepada Menteri. Dengan demikian semua badan hukum, sejak tanggal 7 Maret 1999, sudah berdasarkan undang-undang ini.

Perseroan Terbatas yang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nya sudah habis masa berlakunya, tidak dapat memperpanjang TDP sebelum Anggaran Dasar perseroan disesuaikan dengan UUPT, dengan demikian pada saat ini perseroan terbatas yang mempunyai TDP yang masih berlaku adalah perseroan terbatas yang Anggaran Dasarnya sudah disesuaikan dengan undang-undang ini. Sampai saat ini Perseroan Terbatas yang TDP nya masih berlaku di Kabupaten Klaten sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perusahaan.

Dari Kantor Notaris H .M.Imron, S.H, Klaten dari periode tanggal 7 Maret 1996 sampai sekarang telah membuat akta Perseroan Terbatas sebanyak 21 (dua puluh satu) yang terdiri dari :

P.T. P.M.A	- 1	: 4,7 %
P.T. Umum/bukan keluarga	- 2	: 9,6 %
P.T Keluarga	- 18	: 84,7 %

P.T Keluarga semuanya dari keluarga muslim.

Kalau persentasi ini diasumsikan Perseroan Terbatas di Kabupaten Klaten.

P.T P.M.A	: 4,7 %
P.T Umum/bukan keluarga	: 9,6 %
P.T Keluarga (keluarga muslim)	: 84,7 %

Kalau asumsi ini dapat diterima, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas dapat diterima dan dimanfaatkan oleh Keluarga Muslim.

Atas pertanyaan :

"Apakah Syariah Islam dapat dilaksanakan bagi umat islam yang melaksanakan kegiatan usaha?"

Pertanyaan ditujukan kepada Ulama dan Tokoh Masyarakat.

Jumlah Responden : 20

Jawaban : Ya.	: 16 orang	: 80 %
Ragu	: 2 orang	: 10 %
Tidak	: 2 orang	: 10 %

Alasan yang menjawab : Tidak.

UPT-PUSTAK-INDIP

“Syariat islam adalah wahyu Illahi melalui Nabi Muhammad SAW, sedangkan masalah melaksanakan kegiatan usaha, hukumnya dibuat manusia, untuk kepentingan manusia karena itu tidak mungkin wahyu Illahi tunduk pada hukumnya manusia, yang benar hukum yang dibuat manusia tunduk pada wahyu Illahi.”

Atas pertanyaan :

“Apakah pada waktu berdagang mengingat Tuhan.”

Pertanyaan ditujukan kepada pedagang dan pengusaha **Non muslim**.

Jumlah Responden : 10 orang.

Jawaban	: Ya.	: 1 orang.
	Kadang-kadang	: 1 orang.
	Ragu-ragu	: 2 orang.
	Tidak	: 6 orang.

Alasan yang menjawab : Tidak.

“Urusan dagang ada tempatnya, urusan Tuhan ada tempatnya.”

Penduduk Kabupetan Klaten saat ini berjumlah kurang lebih 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) jiwa.

Penduduk yang beragama Islam 85 %

Penduduk yang Non muslim 15 %

Kalau asumsi ini dapat diterima, maka sebagian besar umat islam didalam melaksanakan kegiatan usaha melaksanakan Syariah islam.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas mampu menampung 2 (dua) sistem hukum, di dalam Praktek.

Penggabungan 2 (dua) sistem, yaitu Hukum Perdata khususnya hukum perseroan terbatas dengan syariah islam dalam satu wadah secara harmonis dan humais. Hal ini terlihat dari apa yang telah dilaksanakan oleh PT. Aneka Adhilogam Karya dan PT. Baja Kurnia. Tidak saja bentuk hukum perseroan terbatas, bentuk hukum Koperasipun sebagai badan hukum juga mampu menggabungkan dua sistem hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Koperasi Industri Batur Jaya yang berkedudukan di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

Kegiatan usaha perseroan terbatas dilaksanakan dengan berlandaskan syariat islam, dimulai sejak pengecekan bahan baku, dalam arti halal dan haramnya bahan baku, pada waktu produksi, produksi dan distribusi (pemasaran) dan manfaat produksi dan pemasaran baik bagi diri pribadi pengusaha, keluarganya maupun masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian juga pada waktu pengembangan usaha, prinsip-prinsip syariat islam telah dilaksanakan. Hanya saja pada waktu pengembangan usaha membutuhkan modal tambahan, di Klaten tidak ada Bank Syariah.

C. Kendala untuk memanfaatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas yang mampu menampung 2 (dua) sistem hukum.

1. Ada Ulama yang berpendapat :

“Ordonansi Maatschappij iku hukum gaweyane Londo, kamongko Londo kuwi imperialis, kolonialis, Islam kuwi anti imperialis, kolonialis, dadi yen hukum gaweyane Londo digatukke karo Syariat Islam, yo ora gatak.”

“Ordonansi Maatschappij itu hukum buatan Belanda, sedangkan Belanda itu Imperialis, Kolonialis. Islam anti imperialis, kolonialis, jadi kalau hukum buatan Belanda dipertemukan dengan Syariat Islam, ya tidak bisa.”

2. Ada yang berpendapat :

Hukum Perdata, khususnya, hukum tentang Perseroan Terbatas, dibuat oleh manusia dan urusan manusia pada pokoknya adalah masalah perut, sedangkan Syariat Islam adalah wahyu Allah yang mengurus surga dan neraka, karena itu hukum tentang perseroan terbatas tidak bisa digabungkan dengan Syariat Islam.

3. Ada juga yang berpendapat :

“Hukum Perdata khususnya hukum perseroan terbatas, adalah hukum buatan manusia, sedangkan Syariat islam adalah wahyu dari Allah, karena itu bukan Syariat islam yang menggabungkan diri kepada hukum perdata (hukum perseroan terbatas sebagai wadah), tetap sebaliknya, Syariat Islam yang sebagai wadah dan hukum perdata/hukum perseroan terbatas yang menggabungkan diri.

4. Untuk melaksanakan undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, seringkali bahkan selalu didalam rangka melaksanakan kegiatannya, perseroan terbatas berhubungan dengan Bank untuk berbagai kepentingan : transfer, Giro, maupun Kredit. Dalam berhubungan dengan Bank, apalagi kalau berhubungan dengan kredit, dan ini berarti ada bunga Bank, sedangkan bunga bank diharamkan oleh UU No.1 Tahun 1995 sebagian ulama. Kalau undang-undang perbankan telah diadakan perubahan yaitu UU. Nomor 7 Tahun 1992 telah diubah dengan UU.Nomor 10 Tahun 1998, yang memberi landasan hukum bagi Bank Syariah yang bebas bunga, mengapa tidak sekalian diubah, sehingga memungkinkan dan menjadi landasan hukum bagi perseroan terbatas untuk menjalankan Syariat Islam.
5. Bagi masyarakat yang mau menerima UUPT dapat menampung Syariat Islam atau dengan kata lain sekalipun berusaha dengan memilih bentuk hukum perseroan terbatas, tetapi dapat melaksanakan Syariat Islam dan sebagai tindak lanjutnya berhubungan dengan Bank Islam yaitu Bank Syariah. Kenyataan sampai saat ini di Klaten belum ada Bank Syariah, hal ini juga merupakan ganjalan untuk melaksanakan Syariat Islam, yang ada di Klaten adalah BMT.
6. Masyarakat berpendapat bahwa BMT yang didalam melaksanakan kegiatannya berkiblat kepada Bank Syariah, yaitu dengan menghapus *sistem bunga* dan diganti dengan *sistem bagi hasil*, tetapi kenyataan dilapangan pelaksanaan BMT sama saja dengan Bank Konvensional,

yaitu ada lembaga jaminan dan bagi hasil (bunga) di BMT jauh lebih tinggi daripada di Bank Konvensional.

Pembahasan :

1. **Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas mampu menampung 2 (dua) sistem hukum yaitu Hukum Perdata, khususnya tentang perseroan terbatas dengan syariat islam dalam satu wadah secara harmonis.**

- a. **Ditinjau dari segi hukum, UU No. 1 Th. 1995 adalah Undang-Undang Terbuka.**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang yang **terbuka** artinya di dalam menyusun atau membuat anggaran dasar perseroan terbatas ada bagian-bagian yang harus berdasarkan UUPT, tetapi pada bagian yang lain berdasarkan asas kebebasan berkontrak diperbolehkan menambah ketentuan-ketentuan yang ada didalam UUPT. Yang menyebabkan UUPT itu terbuka adalah UU itu sendiri, melalui pasal 4 UUPT yang berbunyi :

“Terhadap perseroan berlaku Undang-Undang ini, Anggaran

Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya “

Dari pasal ini jelas bahwa Anggaran Dasar perseroan terbatas memuat 3 (tiga) bagian yaitu :

1. UUPT (UU No. 1 Tahun 1995).
2. Anggaran Dasar;

3. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Yang dimaksud dengan UUPT dapat diartikan :

1. dengan berlakunya UUPT dapat diartikan tidak ada lagi Anggaran Dasar dari suatu perseroan yang didasarkan pada undang-undang lain, kecuali undang-undang PT.
2. dapat juga diartikan bahwa didalam menyusun Anggaran Dasar PT harus ada bagian-bagian berdasarkan kepada UUPT artinya pokok-pokok atau ketentuan-ketentuan yang diatur didalam UUPT, tidak boleh disimpangi. Adapun pasal-pasal dalam UUPT yang tidak boleh dilanggar antara lain :

a. pasal 1.1 :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seharusnya terbagi dalam saham. Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ini berarti didalam menyusun Anggaran Dasar perseroan unsur-unsur yang ada pasal ini tidak boleh disimpangi.

b. pasal 7 ayat (1) :

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Ini berarti Anggaran Dasar perseroan adalah suatu perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, Anggaran Dasar perseroan harus dibuat oleh Notaris, tidak boleh Anggaran Dasar perseroan dibuat dengan akta dibawah tangan dan Anggaran Dasar perseroan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, tidak boleh dibuat dalam bahasa daerah atau bahasa asing.

c. pasal 7 ayat (6) :

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.

Ini berarti Anggaran Dasar perseroan yang dibuat dengan akta Notaris, harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman untuk dimohonkan pengesahan dari Menteri kehakiman dan setelah mendapat pengesahan dari Menteri, Anggaran Dasar perseroan sudah sah dan perseroan memperoleh status badan hukum.

d. pasal 5 :

Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Ini berarti didalam Anggaran dasar perseroan wajib memuat dengan tegas alamat tempat kedudukannya di wilayah Negara Republik Indonesia, tidak boleh memilih atau menentukan beralamat di luar Indonesia.

e. pasal 21 ayat (1.a) :

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :

- a. akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (b)

f. pasal 22 ayat (1)

Perseroan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dari pasal-pasal ini jelas bahwa sekalipun Anggaran Dasar perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri tetapi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan dan perseroan benar-benar berkedudukan sebagai perseroan dengan segala tanggung-jawab dan kewajibannya. Setelah Anggaran Dasar perseroan dimuat didalam Tambahan Berita Negara dan untuk dapat dimuat didalam Tambahan Berita Negara, Anggaran dasar perseroan terlebih dahulu sudah didaftarkan di Departemen Perdagangan dan Perindustrian untuk memenuhi wajib daftar perusahaan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 bahwa terhadap perseroan berlaku Undang-Undang ini dan Anggaran Dasar perseroan. Dengan demikian didalam menyusun anggaran dasar perseroan ada

bagian-bagian yang boleh menyimpangi UUPT. Atau dengan kata lain Anggaran Dasar perseroan, dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan batasan :

1. tidak boleh bertentangan dengan UUPT;
2. mentaati asas etikad baik, asas kepastan dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan.

Undang-undang P.T ada hal-hal yang boleh disimpangi. Contoh : dalam pasal 1.2 : Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Pada Bank Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah, di dalam pasal 19 disebutkan :

- (1) Kepengurusan Bank terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Bank wajib memiliki Dewan Pengurus Syariah yang berkedudukan di Kantor pusat Bank.
- (3) Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dengan demikian pada Bank Syariah ada Direksi ada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Komisaris dan Dewan Pegawas Syariah, kedua-duanya mempunyai fungsi pengawasan terhadap Bank. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional dan manajemen bank. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah fungsinya semata-

mata terbatas meneliti dan menentukan suatu produk, jasa atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank yang bersangkutan.

Apakah sudah bersesuaian atau tidak dengan prinsip syariah ²⁷?

Dari contoh yang dilakukan pemerintah dengan menambah ketentuan yang ada didalam UUPT melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/34/Kep/Dir, tentang Bank Umum, masyarakat luas pun dapat dan boleh menyimpangi dengan menambah ketentuan yang tercantum didalam UUPT pada waktu membuat Anggaran Dasar.

Penyimpangan dengan menambah ketentuan di dalam Anggaran Dasar diperbolehkan dengan syarat :

1. adanya kesepakatan para pendiri/para pemegang saham;
2. tidak bertentangan dengan UUPT;
3. mentaati asas etikad baik, asas kepantasan asas kepatuhan dalam menjalankan perseroan.

Suatu contoh apabila para pendiri/pemegang saham perseroan telah sepakat, dengan menambah ketentuan yang ada pada UUPT.

Pasal 2 UUPT berbunyi :

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

²⁷ Rachmadi Usman, S.H : Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam.

Atas dasar ketentuan ini dapat saja para pendiri/pemegang saham merumuskan didalam Anggaran Dasarnya dengan memasukkan unsur syariah islam sehingga didalam Anggaran Dasarnya, misalnya dirumuskan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang :

1. Pertanian;
2. Industri;
3. Perdagangan;
4. Jasa;

yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam.

Penambahan dengan mencantumkan “yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam”, penambahan ini tidak bertentangan dengan UUPT dan tidak melanggar asas etikad baik, asas kepastan, asas kepatuhan dalam menjalankan perseroan.

b. Ditinjau dari Syariat Islam.

Alasan Pemerintah mengganti peraturan perundang-undangan yang lama dengan Undang-Undang Baru (UUPT) didalam konsiderannya disebutkan bahwa salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama. Dengan ketentuan-ketentuan baru ini, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu

pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi umat islam sebagaimana disampaikan oleh para ulama, prinsip-prinsip esensial sistem ekonomi islam terkait erat dengan akidah, ibadah dan moral (akhlaq), dengan mengfungsikan nilai-nilai akidah, nilai-nilai moral dalam perilaku ekonomi, akan mewujudkan manusia ekonomi yang bersikap lebih adil dan humanis. Sebagaimana telah disampaikan para ulama syariat islam meliputi bidang yang sangat luas bagi kehidupan manusia, baik menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan. tersebut kemudian dirumuskan oleh para fukoha menjadi hukum. Di Negara-negara Islam, hukum fikih menjadi hukum positif, hukum yang berlaku. Seandainya Indonesia sebagai Negara Islam maka akan terjadi 2 (dua) sistem hukum yaitu hukum perdata nasional dan hukum perdata islam, dalam hal ini pasti dua sistem tersebut tidak dapat dipersatukan karena mempunyai landasan hukum, sumber hukum yang berbeda.

Prinsip-prinsip yang terkandung didalam Syariat Islam adalah prinsip-prinsip yang universal, prinsip-prinsip yang diperuntukkan bagi manusia pada segala jaman dan dimana saja. Prinsip-prinsip syariat islam yaitu prinsip-prinsip nilai akidah, nilai-nilai moral inilah yang dialirkan kedalam undang-undang perseroan. Dan undang-undang perseroan sebagai wadah untuk menerima "aliran" prinsip-prinsip syariat islam dan untuk digabungkan

dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada, untuk kemashlahatan umat manusia.

c. Ditinjau dari Kegiatan Pengusaha Muslim dalam Praktek.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya ada pengusaha muslim yang menggunakan bendera umum dan dalam kegiatannya melaksanakan syariat islam. Tetapi ada juga pengusaha muslim yang didalam kegiatannya menggunakan nama islam yang didalam melaksanakan kegiatannya justru tidak islami.

Pengusaha muslim yang didalam melaksanakan kegiatannya melaksanakan syariat islam dalam hal ini sebagai contoh adalah PT. Aneka Adhilogam Karya dan Koperasi Industri Batur Jaya.

Prinsip-prinsip syariat islam yang dilaksanakan oleh kedua perusahaan tersebut :

1. masalah halal dan haram.

Bagi pengusaha muslim bekerja adalah ibadah dan agar bekerja dan beribadah mendapat ridho Allah kuncinya adalah menghindari barang haram. PT. Aneka Adhilogam Karya dan Koperasi Industri Batur Jaya bergerak dibidang pengecoran logam yang bahan bakunya adalah besi rongsokan (bekas pakai). Untuk menghindari barang haram, ada petugas khusus yang menyeleksi barang pasokan, apakah ada barang yang terlarang misalnya block-rem kereta api, block rem kereta api sekalipun barang bekas tidak boleh diperjual-belikan di pedagang umum. Block-

rem kereta api atau barang-barang lain ex kereta api, baru bisa dikeluarkan dari gudang apabila ada perjanjian imbal-beli yang ditandatangani Direktur Jenderal. Kalau ada barang ex kereta api di pasar loak tanpa didukung S.K Dirjen, maka dapat dipastikan barang tersebut adalah barang gelap alias barang haram.

2. Memproduksi dengan ilmu pengetahuan

Dunia dan isinya disediakan untuk manusia dan untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi, apa yang ada di laut dan apa yang ada di langit harus dengan ilmu.

Memproses suatu barang, dari bahan rongsokan menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi harus dengan ilmu.

Meningkatkan mutu barang harus dengan ilmu. Untuk menjadi pengusaha yang berilmu maka pemimpin perusahaan dikirim ke Jepang untuk memperdalam ilmu manajemen perusahaan. Dikirim ke Korea untuk mendapat ilmu teknik industri pengecoran logam, dikirim ke Eropa untuk mendapatkan ilmu manajemen pemasaran. Untuk karyawan diadakan latihan-latihan dan pemasaran, misalnya bagaimana membaca gambar sehingga dari gambar diwujudkan dalam pola cetakan dan sebagainya.

Untuk peningkatan mutu produksi selalu diadakan penelitian dan eksperimen sehingga didapat alat teknik industri tepat guna. Dari penelitian dan eksperimen, yang semula menggunakan tungku tungkik,

berkembang menjadi tungku cepola dan saat ini sudah menggunakan Dapur Induksi.

Dengan penggantian alat ini tentu ada yang menjadi korban, yaitu tenaga kerja yang biasa menjalankan alat tersebut diganti tenaga kerja yang mampu, cakap dan trampil untuk mengoperasikan peralatan baru. Penggunaan metode modern, peralatan teknik modern, perubahan ini kadangkala mengakibatkan mudharat bagi manusia, akan tetapi akan lebih besar mudharatnya akan menimpa umat manusia, apabila peralatan yang sudah kadaluarsa dipertahankan, syariat islam mengajarkan *"Dipikul mudharat yang lebih kecil untuk menghindari mudharat yang lebih besar dan dipikul mudharat yang khusus untuk menghilangkan mudharat yang umum."*

3. ajaran islam tidak membenarkan adanya monopoli

perkembangan dan kemajuan perusahaan dengan dimilikinya sarana produksi yang canggih, tidak menimbulkan hasrat untuk memonopoli semua jenis produksi tetapi disebarkan ke perusahaan-perusahaan kecil disekitarnya dengan memberi bantuan modal, bimbingan teknis dan pekerjaan.

4. Produksi tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada umat

Kegiatan produksi, distribusi (pemasaran) yang ingin dicapai oleh perseroan adalah untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Tetapi sebagai umat islam yang menyelenggarakan perusahaan dalam

perseroan, selain mendapatkan keuntungan dan atau laba (*qimah madiyah*), juga berusaha untuk mendapatkan *qimah insaniyah*. Hal ini telah dilaksanakan oleh pengusaha Klaten.

Perkembangan dan kemajuan perusahaan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya, dari 3 (tiga) perusahaan saja PT. Aneka Adhilogam Karya, PT. Baja Kurnia dan Koperasi Industri Batur Jaya sudah menyerap tenaga kerja lebih kurang 600 orang, K.I.B.J mempunyai anggota lebih kurang 330 perusahaan, kalau tiap perusahaan menyerap 5 (lima) tenaga kerja, maka dari perusahaan pengecoran logam Batur sudah menyerap lebih dari 2000 tenaga kerja dan tiap tenaga kerja mempunyai keluarga 3 (tiga) orang yaitu isteri dan 2 (dua) orang anak. Maka ada lebih dari 8000 jiwa yang menggantungkan hidupnya diindustri pengecoran logam.

Perusahaan telah mengeluarkan infaq dan sodaqoh dengan memberikan santunan kepada keluarga yang kurang mampu dengan memberikan beasiswa sampai lulus setingkat SMU. Selain infaq dan sodaqoh, perusahaan juga membayar zakat melalui lembaga BAZIS. Hal ini sesuai dengan ajaran syariat islam bahwa rejeki yang kita dapatkan, sebagian adalah hak Allah.

Selain daripada itu ketiga perusahaan juga menyelenggarakan pengajian setiap bulan satu kali, yang jatuh pada hari Ahad pertama dan semua karyawan baik sebagai pimpinan perusahaan sampai pegawai harian. Dengan demikian terjadi hubungan yang harmonis antara pengusaha-

pengusaha perusahaan dan karyawan, hal ini sesuai dengan ajaran islam, kegiatan usaha perusahaan juga untuk mencapai *qimah khuluqiyah*. Dengan adanya pengajian-pengajian yang diselenggarakan secara rutin, juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesuai dengan ajaran islam *qimah ruhiyah*.

UU No.1 Tahun 1995 sebagai wadah untuk menampung 2 (dua) sistem hukum.

Sebagaimana diuraikan didepan bahwa UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah undang-undang yang terbuka sehingga didalam menyusun Anggaran Dasar perseroan dapat menerima kaidah-kaidah yang lain dengan syarat kaidah-kaidah tersebut tidak bertentangan dengan UUPT, asas etiket baik, asas kepantasan dan asas kepatutan.

Sementara itu syariat islam adalah prinsip-prinsip yang diberikan Allah kepada manusia untuk menjalani hidup didunia, prinsip-prinsip akidah, ibadah, akhlak dan muamalah adalah untuk kebaikan umat manusia yang tidak membedakan warna kulit dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan prinsip-prinsip inilah yang diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

B. Kendala untuk memanfaatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, sebagai undang-undang yang mampu menampung 2 (dua) sistem hukum.

1. Pendapat bahwa Ordonansi Maatschappij adalah hukum buatan Belanda dan karenanya tidak akan dapat dipertemukan dengan Syariat Islam.

Pendapat ini adalah cerminan jiwa nasionalisme.

Islam mengajarkan : *Husbul waton minal iman*.

Cinta tanah air , sebagian dari iman. Pendapat ini tidak didukung suatu fakta bahwa Ordonansi Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939, justru telah dicabut dengan adanya UU No.1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas.

Terlepas dari Ordonansi Maatschappij telah dicabut atau tidak, adalah kenyataan Ordonansi Maatschappij bahkan hukum perdata yang berlaku saat inipun dibuat oleh Belanda dan harus disadari, harus difahami Belanda adalah manusia yang mempunyai hati nurani. Ajaran Islam adalah ajaran fitroh, ajaran kebersihan, ajaran kesucian, Belanda atau siapapun manusiannya, kalau dia bertindak dalam keadaan fitroh, bersih, suci, maka dalam tindakannya akan dibimbing oleh hati nuraninya yang bersih, tidak ada **vested interest**.

Maka hasilnya akan diterima oleh manusia, akan bermanfaat bagi manusia. Undang-undang yang dibuat orang Belanda yang pada waktu membuat dibimbing oleh hati nuraninya yang bersih, tidak ada **vested interest**, maka undang-undang itu akan diterima oleh manusia dan

bermanfaat bagi manusia. Syariat Islam adalah ketentuan-ketentuan dari Allah melalui Kitab Allah dan Sunnah Rosul berupa bimbingan tentang Akidah, Ibadah dan Akhlak, yang bersifat ukhrowi dan ketetapan-ketetapan berupa hukum-hukum muamalah, yang kesemuanya demi kebaikan manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akherat. Karena itu Syariat Islam ibarat *sungai besar* yang akan mengalir *sungai kecil* (hukum perdata, termasuk hukum perseroan terbatas) yang seterusnya membasahi sawah dan ladang yang bermanfaat bagi manusia.

2. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas, dibuat oleh manusia yang pada pokoknya masalah perut, sedangkan syariat islam adalah wahyu Allah, yang mengurus masalah surga dan neraka karena itu hukum perdata, khususnya hukum perseroan terbatas, tidak akan dapat dipertemukan dengan Syariat Islam. Undang-undang perseroan terbatas adalah undang-undang yang mengatur hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih yang membuat perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama, dengan patungan modal, mengatur organisasinya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Keuntungan dan atau laba ini bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat maupun bagi bangsa dan Negara.

Syariat islam adalah ketentuan-ketentuan bagaimana mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melalui ajaran Akidah, Ibadah dan

Akhlak, yang kesemuannya menjurus ke ukhrowiyah dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan hukum muamalah, yang menjurus ke duniawi. Syariat Islam tidak memisahkan ajaran ukhrowi dan duniawi, seperti memisahkan antara hitam dan putih. Didalam setiap perbuatan duniawi terkandung didalamnya perbuatan untuk mencapai ukhrowi. Tujuan orang membentuk perseroan terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha agar mendapat keuntungan atau laba, ini semua adalah perbuatan duniawi. Agar kegiatan usahanya mendapat ridho Allah, agar keuntungan dan atau laba mendapat ridho Allah, maka semua kegiatan diawali dengan niatan untuk ibadah, agar keuntungan dan atau laba dimulai dengan melakukan kegiatan yang dijauhan dari barang haram. Dan ini semua adalah perbuatan yang bersifat duniawi tetapi membawa akibat ke ukhrowi.

3. Pendapat yang mengatakan :

Hukum Perdata, khususnya hukum tentang perseroan terbatas adalah hukum buatan manusia, sedangkan Syariat Islam adalah wahyu Allah, karena itu yang seharusnya menjadi wadah adalah syariat islam.

Pendapat ini pada dasarnya dapat menerima bahwa hukum perseroan terbatas digabungkan dengan Syariat Islam, yang dimasalahkan adalah supremasi hukum. Indonesia adalah Negara Hukum dan yang berlaku sebagai hukum positif adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atas dasar ketentuan ini undang-undang tentang perseroan terbatas

berlaku. Kalau Indonesia umpamanya menjadi negara Islam, maka yang menjadi hukum positif adalah Syariat Islam dengan demikian yang menjadi wadah adalah Syariat Islam, tetapi Indonesia bukan negara islam, karena itu Syariat Islam tidak dapat digunakan sebagai wadah, lebih-lebih yang Syariat Islam yang diwadahi oleh undang-undang perseroan terbatas bukan kaidah hukum, tetapi kaidah-kaidah tentang ibadah, Akidah dan Akhlak (moral) dan prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum muamalah saja.

4. Pendapat yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan undang-undang perseroan terbatas yang mampu menampung 2 (dua) system hukum, perlu diadakan perubahan UU No.1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah dilakukan terhadap undang-undang perbankan. Undang-undang nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas adalah undang-undang terbuka artinya didalam membuat Anggaran Dasar suatu perseroan terbatas, dapat dimasukkan apa saja yang dikehendaki para pihak atas dasar asas kebebasan berkontrak, dengan syarat :

1. Adanya kesepakatan para pendiri/para pemegang saham;
2. tidak bertentangan dengan UUPT;
3. mentaati asas etika baik, asas kepantasan dan asas kepatuhan dalam menjalankan perseroan.

Dengan demikian tidak perlu ada perubahan terhadap undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

5. Keluhan masyarakat bahwa sampai saat ini belum ada Bank Syariah, hal ini adalah masalah teknis yang pada suatu saat akan ada Bank Syariah, apabila masyarakat membutuhkannya.
6. Masyarakat berpendapat bahwa BMT yang didalam melaksanakan kegiatannya berkiblat kepada Bank Syariah, yaitu dengan menghapus *sistem bunga* dan diganti dengan *sistem bagi hasil* , tetapi kenyataan dilapangan pelaksanaan BMT sama saja dengan Bank Konvensional, yaitu ada lembaga jaminan dan bagi hasil ("Bunga") di BMT jauh lebih tinggi daripada di Bank Konvensional. Hal ini terjadi karena pihak pengelola BMT tidak faham pada hakekat syariat islam, karena itu dibuatlah terobosan-terobosan agar BMT yang dikelolanya bisa jalan dan digunakanlah **Hukum sebagai alat pembenar**. Pemberian dana pembiayaan dengan prinsip Mudharabah, menurut ketentuan hukum tanpa agunan/jaminan dan untuk menghindari istilah agunan atau jaminan maka dibuat jual-beli semu, jual-beli pura-pura; yang digunakan oleh Notaris dengan istilah : jual-beli dengan hak untuk membeli kembali dan surat kuasa untuk menjual.

Dalam putusan-putusan Pengadilan, jual-beli dengan hak untuk membeli kembali adalah utang-piutang. Prinsip dasar pada utang-piutang adalah kreditur tidak boleh menjual langsung. Untuk keperluan pelunasan hutang, barang jaminan harus dilelang. Kuasa untuk menjual dalam perikatan jual-beli dikategorikan sebagai kuasa mutlak yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Syariah Islam, bunga bank diharamkan. Untuk menghindari bunga bank yang diharamkan maka digunakanlah teknik **bagi hasil**.

Orang yang membutuhkan dana pembiayaan, sejak awal sudah diperjanjikan bagi hasilnya, sekian persen untuk BMT dan sekian persen untuk nasabah Bank. Biasanya dari dana pembiayaan diperkirakan lebih dahulu bahwa keuntungan dari usaha tersebut, dari perkiraan keuntungan ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) bruto untuk nasabah dan 30% (tiga puluh persen) untuk BMT, atau 3 % (tiga persen) perbulan tetap. Penerapan sistem ini tidak ada bedanya dengan Bank Konvensional bahkan lebih berat. Bunga bank sebesar ini mendekati bunga yang diperlakukan oleh para rentenir.

C. Konsep Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariat islam :

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor :

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal enam Desember dua ribu dua -----

(06-12-2002), hadir dihadapan saya, Haji MOCHAMAD IMRON, -----

Sarjana Hukum, Notaris di Klaten dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----

akan disebut dan telah dikenal oleh saya, notaris : -----

1. tuan Haji RACHMAD IMANTYOKO MUNAJAD, -----

Sarjana Hukum, Wiraswasta, -----

2. nyonya Hajjah JANJANG KRISNASARI, Sarjana Hukum -----

Wiraswasta, -----

-keduannya bertempat tinggal di Surabaya, -----

Baruk barat IV No. 16 A, -----

-untuk keperluan ini mereka berada di Klaten; -----

3. tuan haji MOCHAMAD SOFI ARIOTEDJO, Sarjana Hukum, -----

swasta, -----

4. nyonya Hajjah NUR CHASANAH, Sarjana Hukum, swasta, -----

-keduannya bertempat tinggal di Klaten, Jalan Mayor Kusmanto -----

nomor 15; -----

5. tuan Haji MUCHAMAD IMANTYOKO ALI IBRAHIM, Sarjana -----

Teknik Arsitektur, swasta, -----

6. nyonya Hajjah ULFAH MARIA, swasta, -----
 -keduannya bertempat tinggal di Klaten, Perumahan Daerah II -----
 Gergunung, Klaten Utara; -----
 -Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya -----
 sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan -----
 tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan -----
 setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan -----
 Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini -----
 (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai -----
 berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. ANA AGNIYA MANDIRI -----
 (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----
 "Perseroan"), berkedudukan di Klaten, Jalan Sulawesi nomor 30; -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain -----
 baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia -----
 sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan -----
 Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Peseroan didirikan untuk 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya. -----

UPT-PUSTAKA-UNDIP

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseran ialah berusaha dalam bidang : -----

1. Pertanian ; -----

2. Industri; -----

3. Perdagangan; -----

4. Jasa; -----

-yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan -----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

1. Menjalankan usaha pertanian, perikanan dan peternakan; -----

2. Menjalankan dan mengelola Industri pertanian dan -----

Makanan ternak; -----

3. Menjalankan perdagangan umum secara export dan import serta ---

sebagai agen penjualan barang export dan import; -----

4. Menjalankan usaha dibidang jasa pada umumnya kecuali jasa -----

hukum dan perpajakan. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----

Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terbagi atas -----

300.000 (tiga ratus ribu) saham masing-masing -----

saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

2. dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, -----

yaitu : -----

a. nyonya Hajjah ULFAH MARIA tersebut, sebanyak -----

50.000,- (lima puluh ribu) saham atau sebesar -----

Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) .-----

b. tuan Haji MOCHAMAD IMANTYOKO MUNAJAD, -----

Sarjana Hukum, tersebut, sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu)---

Saham atau sebesar ----- Rp. 20.000.000,- -----

(dua puluh juta rupiah). -----

c. nyonya Hajjah JANJANG KRISNASARI, -----

Sarjana Hukum, tersebut, sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) ---

Saham atau sebesar ----- Rp. 20.000.000,- -----

(dua puluh juta rupiah). -----

d. tuan Haji MUCHAMAD SOFI ARIOTEDJO, tersebut -----

sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu) saham atau sebesar -----

Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) .-----

e. nyonya Hajjah NUR CHASANA, Sarjana Hukum, -----

tersebut, sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) -----

Saham atau sebesar ----- Rp. 20.000.000,- -----

(dua puluh juta rupiah). -----

f. tuan Haji MOCHAMAD IMANTYOKO ALI IBRAHIM, -----

Sarjana Teknik Arsitektur, tersebut, sebanyak 20.000,- -----

- (dua puluh ribu Saham atau sebesar -----
 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
 -sehingga seluruhnya berjumlah 180.000 (seratus delapan puluh -----
 ribu) saham atau sebesarRp. 180.000.000, -----
 (seratus delapan puluh juta rupiah). -----
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ----
 ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah -----
 Rp. 180.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah disetor -----
 penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing -----
 masing pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ----
 Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
 Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
 Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
 Mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam --
 Jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
 Dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak -----
 Mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka --
 Miliki (proporsional). -----
 Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa -----
 Saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
 Menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham -----

yang masih berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari -----

terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut -----

masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang --

saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan -----

perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah -----

penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham ----

yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas -----

menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -----
atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum -----
sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa -----
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu -----
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau -----
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk ----
atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan -----

- hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, -----
maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan –
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan -----
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
 6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk -----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta –
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham -----
Diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang ---
pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangai oleh ---
Direktur Utama dan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, -----
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi -----
akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian -----
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka -----
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham ----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu -----
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu -----
oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka -----
asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu -----
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku -----
bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang -----
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau -----
surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan -----
hak gadai tersebut; -----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain -----
uang; dan -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta -----
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain -----
serta tanggal saham itu diperoleh. -----

4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan ----
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. -----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala -----
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah ----
sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang -----
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. ----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang -----
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor -----
Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil -----
mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
atau salinannya disampaikan kepada Perseroan. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila -----
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham -----

tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain -----
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia -----
atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang ---
saham kehilangan Kewarganegaraan Indonesianya, maka -----
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ----
tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak ----
atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau ---
suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan -----
Anggaran Dasar. -----
6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum -----
dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap -----
tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham -----
itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -----
terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -----
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----
seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur -----
Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah -----

- Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan -----
 memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang -----
 undangan yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----
 Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu -----
 4 (empat) tahun dan dengan tidak mengurangi hak -----
 Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -----
 sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -----
 tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum -----
 Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat -----
 Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada -----
 Komisaris. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi -----
 lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 -----
 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus -----
 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----
 mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
 anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu -----
 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----
 lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat -----

Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi -----

baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh -----

Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri -----

dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----

perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum -----

tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----

ayat 7; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----

undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusann Rapat -----

Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- -- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan -----

Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -----

- dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya -----
 dengan mengindahkan peraturan perundang -----
 undangan yang berlaku. -----
3. --Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----
 diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
 segala kejadian, mengikat Perseroan dengan -----
 pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
 menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
 kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
 dengan pembatasan bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
 Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
 Perseroan di bank); -----
- b. mendirikan suatu badan usaha baru atau turut -----
 serta pada perusahaan lain baik di dalam -----
 maupun di luar negeri; -----
 harus dengan persetujuan Komisaris. -----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan -----
 hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----
 sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu -----
 tahun buku baik dalam satu transaksi atau -----
 beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun -----
 yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----

- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham -----
yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga -----
per empat) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau -----
menjadikan sebagai jaminan utang atau -----
melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula -----
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang beredar di tempat -----
kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum -----
tersebut. -----
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir -----
atau berhalangan karena sebab apapun juga, -----
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka salah seorang anggota -----

Direksi lainnya berhak dan berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----

mewakili Perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil -----

atau kuasanya dengan memberikan kepadanya -----

kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----

Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -----

Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat -----

Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan -----

kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan -----

yang bertentangan dengan kepentingan pribadi -----

seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan -----

diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan -----

dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----

bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, -----

maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu -----

bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----

- anggota Direksi atau atas permintaan tertulis -----
 dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau -----
 atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham -----
 atau lebih yang bersama-sama mewakili -----
 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh -----
 saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
 Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----
 Ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan -----
 dengan surat tercatat atau dengan surat yang -----
 disampaikan langsung kepada setiap anggota -----
 Direksi dengan mendapat tanda terima paling -----
 lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -----
 dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
 dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -----
 acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
 Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
 -Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
 diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
 disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----

- dimanapun juga dan berhak mengambil -----
 keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, -----
 dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
 berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -----
 kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan -----
 dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----
 dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----
 rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----
 lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
 keputusan yang mengikat apabila lebih dari -----
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi -----
 hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
 berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -----
 hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
 mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -----
 dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----
 setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
 dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----

berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----
lain yang diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup -----
tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan -----
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. –Direksi dapat juga mengambil keputusan -----
yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, -----
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -----
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
 mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
 keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
 Rapat Direksi. -----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13 -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
 anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari -----
 seorang anggota Komisaris maka seorang -----
 diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris -----
 hanya Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan -----
 memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
 Pemegang Saham untuk jangka waktu 4 (empat) -----
 Tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat -----
 Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -----
 Sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau -----
 tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -----
 Umum Pemegang Saham. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota -----

- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu -----
 paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya -----
 lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----
 Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu -----
 dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan -----
 diri dari jabatannya dengan memberitahukan -----
 secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
 Perseroan sekurangya 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
 tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
 ayat 6; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
 perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
 Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas -----
 kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan -----

- serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----
 setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan -----
 berhak memasuki bangunan dan halaman atau -----
 tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai -----
 oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
 pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa -----
 dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain -----
 serta berhak untuk mengetahui segala tindakan -----
 yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
 memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
 ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan -----
 untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi -----
 apabila anggota Direksi tersebut bertindak -----
 bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----
 Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
 kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) -----
 hari sesudah pemberhentian sementara itu, -----
 Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan -----

Rapat Umum Pemegang Saham yang akan -----
 memutuskan apakah anggota Direksi yang -----
 bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -----
 dikembalikan kepada kedudukannya semula, -----
 sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan -----
 sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna -----
 membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin -----
 oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, -----
 oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan -----
 apabila tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir, -----
 maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih -----
 oleh dan dari antara mereka yang hadir, -----
 ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan -----
 kepada pihak lain. -----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut -----
 tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) -----
 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka -----
 pemberhentian sementara itu menjadi -----
 batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak -----
 menjabat kembali jabatan semula. -----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
 sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----

seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara -----
 Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan -----
 dalam hal demikian Komisaris berhak untuk -----
 memberikan kekuasaan sementara kepada -----
 seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan -----
 mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka -----
 segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
 kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris -----
 dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----
 bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -----
 anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -----
 seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -----
 permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih -----
 yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -----
 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara -----
 yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----
 Komisaris Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada -----

- setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun -----
 dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima -----
 yang layak, sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
 diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
 panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal -----
 waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan -----
 Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
 apabila semua anggota Komisaris hadir atau -----
 diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----
 tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan -----
 dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan -----
 yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris -----
 Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat -----
 hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu -----
 dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----
 Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang -----
 dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam -----
 Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota -----
 Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris -----
hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -----
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang -----
maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris -----
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -----
lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. -----

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
 tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -----
 serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -----
 yang dikeluarkan. -----
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
 tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan -----
 semua anggota Komisaris telah diberitahu secara -----
 tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan -----
 persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
 tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
 Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
 yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----
 Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
 Desember. -----
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
 Perseroan ditutup, Untuk pertama kalinya buku Perseroan -----
 dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup -----
 pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga -----
 (31-12-2003). -----

UPT-PUSTAK-UNDIP

2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
 buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan -----
 tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan -----
 yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota -----
 Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat -----
 Umum Pemegang Saham tahunan. -----
 -Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan -----
 di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari -----
 sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
 tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh -----
 para pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, -----
 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran -----
 Dasar ini. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya -----
 selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut -----
 Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu -----
 Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan -----
 sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ---

ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham -----
 tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, -----
 kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan -----
 tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun -----
 buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan -----
 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi -----
 dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan -----
 atas dokumen tersebut untuk mendapat -----
 pengesahan rapat. -----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai -----
 keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah -----
 dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan -----
 dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan -----
 dan perubahannya selama tahun buku serta rincian -----
 masalah yang timbul selama tahun buku yang -----
 mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk -----
 mendapatkan persetujuan rapat. -----
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----

- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----
 diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan -----
 dalam Anggaran Dasar. -----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum -----
 Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan -----
 pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya -----
 kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas -----
 pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
 selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
 tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. -----
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka -----
 pemegang saham berhak memanggil sendiri -----
 Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas -----
 biaya perseroan setelah mendapat izin dari -----
 Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -----
 meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----
- Pasal 19 -----
1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan -----
 Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----

- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -----
 pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -----
 mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah -----
 seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
 -Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara -----
 tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak -----
 dibicarakan disertai alasannya. -----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 -----
 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung -----
 sejak surat permintaan itu diterima, maka -----
 pemegang saham yang bersangkutan berhak -----
 memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan -----
 setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri -----
 yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
 Perseroan. -----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam -----
 ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua -----
 Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di -----
 tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -----
 Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan -----
 paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -----
 rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut -----
 dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari -----
 sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan -----
 tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
 mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara -----
 rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan -----
 yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor -----
 Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan -----
 sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----
 -Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -----
 harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan -----
 sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah -----
 tersedia di Kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara -----
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka -----
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu -----
dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat -----
mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan -----
Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
diselenggarakan dimanapun juga dalam -----
Wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, -----
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -----
Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ada -----
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin -----
oleh seorang Direktur; -----
dalam hal semua Direktur tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris -----
dalam hal semua anggota Komisaris tidak ada atau -----

berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak -----
 perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat -----
 dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari -----
 antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan -----
 dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita -----
 Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani -----
 oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau -----
 kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari -----
 antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
 Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap ----
 semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan ----
 dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal -----
 ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -----
 dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
 dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham -----
 yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari -----
 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -----
 telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan -----

- lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a -----
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan -----
rapat kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1b -----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) -----
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung -----
sejak Rapat pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ -----
(satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
yang sah. -----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas -----
permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua -----
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain -----
atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua rapat berhak meminta agar sura kuasa untuk -----

- mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada -----
waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan -----
boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara mereka ----
keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam -----
pemungutan suara. -----
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain -----
secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan -----
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir -----
dalam rapat. -----
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada -----
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
 8. –Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila -----
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju -----

sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
 tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
 ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara -----
 tertulis dan semua pemegang saham memberikan -----
 persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----
 serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
 Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
 kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
 dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
 yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi -----
 yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
 tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan ----
 oleh rapat tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak -----
 menentukan penggunaannya, laba bersih setelah -----
 dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-----
 undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai -----
 dividen. -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
 menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
 dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -----
 dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam -----
 tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak -----
 mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
 dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum -----
 sama sekali tertutup. -----
4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -----
 diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk -----
 dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus -----
 diperuntukkan untuk itu. -----
 -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil -----
 oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka -----
 waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya -----
 atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----
 Perseroan. -----
 -Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut -----
 menjadi milik perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan -----
 ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya -----
20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya -----
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh -----
Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah -----
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari -----
modal yang ditempatkan tersebut -----
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan -----
agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah -----
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi -----
keperluan perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -----
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap ---
baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. -Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai -----
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh -----

- 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan -----
 dengan sah dalam rapat. -----
- Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan -----
 akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan ---
 nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -----
 Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan --
 dan disetor dan pengubahan status perseroan tertutup menjadi -----
 Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -----
 Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
 3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -----
 tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri -----
 Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu ----
 selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat -----
 Umum Pemegang Saham tentang Pengubahan tersebut serta didaftarkan --
 dalam wajib Daftar Perusahaan. -----
 4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang -----
 ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari -----
 dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama -----
 itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang ----
 sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali -----
 mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat -----
 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal -----

panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling -----

sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan -----

secara tertulis kepada semua kreditur perseroan dan diumumkan -----

oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia -----

yang terbit dan atau beredar ditempat kedudukan -----

Perseroan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari -----

sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan perundang-undangan -----

yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, -----

hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ----

Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -----

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak -----

suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ -----

(tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ----

rapat. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -----

menegani rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan -----

Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan -----

Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri -----
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh --
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan -----
dengan sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu -----
berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan -----
Penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator .----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat -----
Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan,-----
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar -----
harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan perseroan atau -----
tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada -----
Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian -----
 beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai -----
 dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum -----
 Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -----
 sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -----

Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
 tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

- I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran ---

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan -----

Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

Direktur Utama : penghadap tuan Haji RACHMAD -----

IMANTYOKO MUNAJAD, Sarjana -----

Hukum, -----

Direktur : penghadap tuan Haji MOCHAMAD -----

SOFI ARIOTEDJO, Sarjana Hukum, -----

Direktur : penghadap tuan Haji IMANTYOKO -----

ALI IBRAHIM, Sarjana Teknik -----

Arsitektur, -----

Komisaris Utama : penghadap nyonya Hajjah ULFAH -----
 MARIA, -----

Komisaris : penghadap nyonya Hajjah JANJANG ----
 KRISNASARI, Sarjana Hukum, -----

Komisaris : penghadap nyonya Hajjah NUR -----
 CHASANA, Sarjana Hukum, -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima -----
 oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat ---
 Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah -----
 akta pendirian Ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak -----
 Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

II. penghadap tuan Haji RACHMAD IMANTYOKO MUNAJAD, Sarjana ----
 Hukum, dan tuan EDDY WASKITO, pegawai kantor Notaris -----
 bertempat tinggal di Klaten, -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
 memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -----
 memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari Instansi yang -----
 berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan -----
 dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
 memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----
 menandatangani semua permohonan dan dokumen lain-lainnya , untuk -----
 memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -----

mungkin diperlukan. -----

-Para penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah -----

----- AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Klaten, pada hari dan tanggal -----

sebagaimana tersebut dalam Kepala Akta ini, dengan dihadiri oleh -----

tuan EDDY WASKITO dan tuan SRI WALUYO, kedua-duanya pegawai ----

kantor saya notaris dan bertempat tinggal di Klaten sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada -----

para penghadap dan para saksi, maka seketika akta ini ditanda-tangani -----

oleh para penghadap dan para saksi dan saya, notaris. -----

-Dilangsungkan dengan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas adalah undang-undang yang terbuka artinya di dalam membuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, ada bagian-bagian yang harus mengacu kepada pasal –pasal yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak boleh disimpangi, tetapi ada bagian-bagian yang bisa diubah berdasarkan azaz kebebasan berkontrak. Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai undang-undang yang terbuka ternyata mampu menampung dalam satu wadah 2 (dua) sistem hukum yaitu Hukum Perdata dan prinsip-prinsip Hukum Islam atau lebih tepat syariat islam. Sehingga terjadi “perkawinan” yang harmonis antara dua sistem hukum tersebut sehingga memberi kepastian hukum dan kepastian usaha yang memberi rasa tentram dan aman bagi umat islam. Perseroan Terbatas milik pengusaha muslim dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dapat melaksanakan menurut syariat islam sejak saat akan memulai kegiatannya, dan juga pada waktu mengembangkan usaha perusahaan. Keberadaan perseroan terbatas milik pengusaha muslim sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya baik berupa penyerapan tenaga kerja, meleburnya rejeki pengusaha kepada fakir-miskin, yatim-piatu dan pengusaha kecil.

2. Kendala-kendala :

Ada kendala baik ditinjau dari segi hukum maupun tidak adanya sarana (tidak adanya bank syariah), tetapi kendala-kendala tersebut tidak menyebabkan terhalangnya penggabungan dua sistem hukum menjadi satu kesatuan pelaksanaan yang harmonis dan humanis.

SARAN

1. perlunya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya tentang prinsip-prinsip syariat islam sehingga dapat mengerti serta memahaminya dan tidak ragu-ragu dan tidak takut melaksanakan syariat islam.
2. pada pengambil kebijakan pada Bank Syariah perlu mengkaji kembali penafsiran surat dalam Al-Qur'an yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan Hukum Perdata sehingga tidak terjadinya namanya Bank Syariah tetapi pelaksanaannya "*lebih kejam daripada rentenir*".

DAFTAR PUSTAKA

- Ir. H. Adiwarman Aswar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P , 2001, EKONOMI ISLAM SUATU KAJIAN KONTEMPORER, *Gema Insani press*, cetakan I, Jakarta.
- Dr. Ahmad Muhammad Al-'assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, SISTEM, PRINSIP DAN TUJUAN EKONOMI ISLAM, *CV.Pustaka Setia*, Cetakan I, Bandung.
- Andrinof A. Chaniago, 2001, GAGALNYA PEMBANGUNAN (Kajian Ekonomi politik terhadap Akar Krisis Indonesia), *PT. Pustaka LP3ES*, Cetakan I, Jakarta.
- Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H, 1999, HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA, *PT. Citra Aditya Bakti*, Cetakan I, Bandung.
- Afzalur Rahman, 1995, DOKTRIN EKONOMI ISLAM Jilid I, *PT. Dana Bakti Wakaf*, Yogyakarta.
- 'Abdul Hamid Mahmud Thihmaz, 2001, HIDANGAN HALAL HARAM KELUARGA MUSLIM (Kajian Al-Qur'an Surah Al-Maidah), *CV. Cendekia Sentra Muslim*, Cetakan I.
- K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A, 2000, ASAS-ASAS HUKUM MUAMALAT (Hukum Perdata Islam), *Ull press*, Yogyakarta.
- Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi, M.A, 1993, BUNGA BANK DALAM ISLAM, *Al-Ikhlash*, Surabaya.
- DR. H. Buchari Alma, 1994, AJARAN ISLAM DALAM BISNIS, *CV.Alfabeta*.

Burhan Ashshofa, S.H, 1996, METODE PENELITIAN HUKUM, *PT. Rineka Cipta*, Cetakan I.

Drs.C.S.T. Kansil, S.H, 1995, HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), *PT. Pradnya Paramita* , Cetakan V, Jakarta.

Prof. DR. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H, 1994, PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA PADA AKHIR ABAD KE-20, *Alumni*, Cetakan I, Bandung.

Chidir Ali, S.H, 1987, BADAN HUKUM, *Alumni*, Cetakan I, Bandung.

CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1996, PETUNJUK PELAKSANAAN PERSEROAN TERBATAS, *CV. Laksana Mandiri*.

_____ , 2001, SUPLEMEN PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS TAHUN 2001, *CV. Novindo Pustaka Mandiri*, Cetakan I.

DR. Heru Nugroho, 2001, NEGARA, PASAR, DAN KEADILAN SOSIAL, *Pustaka Pelajar*, Cetakan I.

Hadi Setia Tunggal, S.H, 1997, UNDANG-UNDANG DOKUMEN PERUSAHAAN, *Harvarindo*, Jakarta.

Imamudin Yuliadi, S.E,M.S.i, 2001, EKONOMI ISLAM (Sebuah Pengantar), *LPPI*, Cetakan I.

I.G. Rai Widjaya, S.H, M.A, 2000, HUKUM PERUSAHAAN (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan undang-undang di bidang usaha).
Megapoint divisi dari Kasaint Blanc, Cetakan I, Jakarta.

Dr. Iwan Triyuwono, 2000, ORGANISASI DAN AKUNTANSI SYARIAH, *IkiS*,
Cetakan I.

K. Wantjik Saleh, S.H, 1981, TIGA UNDANG-UNDANG DASAR (UUD RI 1945, Konstitusi RIS dan UUD Sementara RI), *Ghalia Indonesia*,
Cetakan IV.

Koentjaraningrat, 1997, METODE-METODE PENELITIAN MASYARAKAT
Edisi III, *PT. Gramedia Pustaka Utama*, Cetakan XIV,
Jakarta.

Komar Andasasmita, 1983, LEASING (Teori dan Praktek), *Ikatan Notaris Indonesia* Komisariat daerah Jawa Barat , Bandung.

Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, MPA dan H. Muhammad Syafe'i Antonio, M,EC,
1992, APA DAN BAGAIMANA BANK ISLAM, *PT. Dana Bakti Prima Yasa*, Yogyakarta.

Dr. Lexy J. Moleong, M.A, 2001, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF,
PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan XIV, Bandung.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1996, KEGIATAN EKONOMI DALAM ISLAM,
PT. Bumi Aksara, Cetakan II.

Mochtar Naim, 2001, KOMPENDIUM HIMPUNAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN
YANG BERKAITAN DENGAN EKONOMI, *CV. Hasanah*,
Jakarta.

DR.M. Umer Chapra, 2000, ISLAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI, *Gema Insani press*, Cetakan I , Jakarta.

DR. M. Umer Chapra, 1999, ISLAM DAN TANTANGAN EKONOMI (Islamisasi Ekonomi Kontemporer), *Risalah Gusti*, Cetakan I, Surabaya.

_____, 2001, MASA DEPAN ILMU EKONOMI (Sebuah Tinjauan Islam), *Gema Insani press*, Cetakan I, Jakarta.

_____, 2001, SISTEM MONETER ISLAM, *Gema Insani press*, Cetakan I, Jakarta.

DR. M. Umer Chapra, Amim Akhtar, Anwar Ibrahim, Khursid Ahmad, Abul Hasan Bani Sadr, M. Dawam Rahardjo, 1997 ETIKA EKONOMI POLITIK (Elemen-elemen strategis pembangunan masyarakat Islam), *Risalah Gusti*, Cetakan I.

Prof. M.Abdul Mannan,M.A.,Ph.D, 1997, TEORI DAN PRAKTEK EKONOMI ISLAM, *PT. Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta.

Moenaf H. Regar, 2000, DEWAN KOMISARIS PERANANNYA SEBAGAI ORGAN PERSEROAN, *PT. Bumi Aksara*, Cetakan I

DR. M. Natzir said, S.H, 1987, HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA (Perorangan), *Alumni*, Cetakan I, Bandung.

Muhammad Irianto, Abdul wahid, joko setiawan, 1999, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, *Bp. Panca Usaha*, Cetakan III, Jakarta.

Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., 1999, HUKUM ANTI MONOPOLI (Menyongsong Era Persaingan Sehat), *PT. Citra Aditya Bakti*, Cetakan I, Bandung.

_____, 2001, HUKUM TENTANG AKUISISI, TAKE OVER DAN LBO, *PT. Citra Aditya Bakti*, Cetakan I, Bandung.

Muhammad, 2000, LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN UMAT KONTEMPORER, *UII press*, Cetakan I, Yogyakarta.

Muhammad Jawad Mughniyah, 2000, FIQIH LIMA MAHZAB, *PT. Lentera Basritama*, Cetakan V, Jakarta.

Drs. Muhammad Djumhana, S.H., 1993, HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA, *PT. Citra Aditya Bakti*, Cetakan I, Bandung.

Muhammad Syafe'i Antonio, 2001, BANK SYARIAH DARI TEORI, *Gema Insani press*, Cetakan I, Jakarta.

Morris L. Cohen, 1995, SINOPSIS PENELITIAN ILMU HUKUM, *PT. Rajagrafindo persada*, Cetakan I

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995, METODE PENELITIAN SURVAL, *LP3ES* (Lembaga Penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan Sosial), Cetakan II.

Drs. Mardalis, 1999, METODE PENELITIAN (Suatu Pendekatan Proposal), *PT. Bumi Aksara*, Cetakan IV, Jakarta

Maria S.W. Sumardjono, 1997, PEDOMAN PEMBUATAN USULAN PENELITIAN (Sebuah Panduan Dasar), *PT. Gramedia Pustaka Utama* Cetakan II, Jakarta.

DR. Nana Sudjana, 1995, TUNTUNAN PENYUSUNAN KARYA ILMIAH (Makalah – Skripsi – Tesis – Disertasi), *Sinar Baru Algensindo*, Cetakan III, Bandung.

Pieter Tedu Bataona, S.H, 1994, MENGENAL PASAL MODAL DAN TATA ATURAN PERDAGANGAN EFEK SERTA BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN DI INDONESIA, *Nusa Indah*, Cetakan I.

Rahimi Sutan, K.H. AR Fachruddin, Arifin M.Siregar, Nasrudin Suminta pura, Karnaen A. Perwataatmadja, Mar'ie Muhammad, Sjarifudin Baharsyah, Junus Jahja, Probo Sutedjo, Sutrisno Bachir, Harry Kutoro, Sri Sultan Hamengkubuwono X, 1991, DIALOG BISNIS MUHAMMADIYAH KEBANGKITAN PENGUSAHA MUSLIM, *PT. Bina Rena Pariwisata*, Cetakan I.

Prof. Dr. R. Slot dan R. A.Fadli, 1972, PENGANTAR EKONOMI PERUSAHAAN, *PT. Karya Nusantara*, Cetakan VI.

Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, 1990, METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DAN JURIMETRI, *Ghalia Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta.

Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, S.H, 1993, HUKUM PERSEROAN TERBATAS YAYASAN DAN WAKAF, *PT. Eresco*, Cetakan I, bandung.

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H dan Dr. Sumantoro, 1992, PENGERTIAN POKOK HUKUM PERUSAHAAN (Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia), *CV. Rajawali*, Cetakan II, Jakarta.

Dr. Syauqi Ahmad Dunya, 1994, SISTEM EKONOMI ISLAM (Sebuah Alternatif), *Fikahati Aneska*, Cetakan I, Jakarta.

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H, M.B.A, 1999, HUKUM PERUSAHAAN MENGENAI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA, *CV. Mandar Maju*, Cetakan I.

Soerjono Soekanto, 1986, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM, *Universitas Indonesia (UI-press)*, Cetakan III.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A dan Sri Mamudji S.H, M. L.L, 2001, PENELITIAN HUKUM NORMATIF (Suatu tinjauan Singkat), *PT. RajaGrafindo persada*, Cetakan V, Jakarta.

Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, 1993, KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DI INDONESIA, *Institut Bankir Indonesia (IBI)*, Jakarta.

_____, 1999, HAK TANGGUNGAN ASAS-ASAS, KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAN MASLAH YANG DIHADAPI OLEH PERBANKAN (Suatu Kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), *Alumni*, Cetakan I.

Dr. Sutan Remy Sjadeini, S.H 1999, PERBANKAN ISLAM DAN KEDUDUKANNYA DALAM TATA HUKUM PERBANKAN INDONESIA, *PT. Pustaka Utama Grafiti*, Cetakan I.

Prof. Drs. Sutrisno Hadi, M.A, 2000, METODOLOGI RESEARCH, *ANDI*, Cetakan XXX, Yogyakarta.

_____, 1987 METODOLOGI RESEARCH (Untuk penulisan paper, skripsi, thesis, disertasi), *Yayasan penerbitan fakultas psikologi UGM Yogyakarta*, Cetakan XVII

Prof. Dr. S. Nasution, M.A, 2001, METODE RESEARCH (Penelitian Ilmiah)Usul tesis, Desain penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, observasi, wawancara, angket, *PT. Bumi Aksara*, Cetakan IV, Jakarta.

Prof. Dr. S. Nasution, M.A dan Prof. Dr. M. Thomas, 2000, BUKU PENUNTUN MEMBUAT TESIS, SKRIPSI, DISERTASI, MAKALAH, *PT. Bumi Aksara*, Cetakan VI, Jakarta.

DR. H. Sudjarwo, MS, 2001, METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL, *CV. Mandar Maju*, Cetakan I.

Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 1996, PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTEK, *PT. Rineka Cipta*, Cetakan X(Edisi revisi III).

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H, 2000, KAPITA SELEKTA HUKUM EKONOMI, *CV. Mandar Maju*, Cetakan I.

Sayid Qutub, 1994, TAFSIR AYAT-AYAT RIBA, *Mutiara Ilmu*, Cetakan I, Surabaya.

Sugiarto, Dergibson Siagian, Lasmono Tri Sunaryanto dan Denny S. Oetomo, 2001, TEKNIK SAMPLING, *PT. Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi, 2001, PERAN NILAI DAN MORAL DALAM PEREKONOMIAN ISLAM, *Robbani press*, Jakarta.

_____, 1997, NORMA DAN ETIKA EKONOMI ISLAM, *Gema Insani press*, Cetakan I, Jakarta.

_____, 2001, ISLAM DAN GLOBALISASI DUNIA, *Pustaka Al-Kautsar*, Cetakan I.

_____, 2001, BUNGA BANK HARAM, *Akbar Media Eka Sarana*, Cetakan I.

_____, 2001, HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM, *Robbani press*, Cetakan II.

DR. Yusuf Faishal, 2001, PEDOMAN PRAKTIS UNTUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN TERBUKA(Tbk) & BUMN, *Yayasan Global Synergi*, Jakarta.

Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H dan H. Hadi Wuryan, SH, CN, MH, 1997, HUKUM EKONOMI Buku I, *Karya Abditama*, Surabaya.

Drs. Zainul Arifin, M.B.A, 2001, DASAR-DASAR MANAJEMEN BANK SYARIAH, *Alfabet*, Cetakan I, Jakarta.